

Percakapan dengan

Zuhairi Misrawi



**Zuhairi Misrawi**, Direktur Moderate Muslim Society (MMS). Ia menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren al-Amien, lalu menyelesaikan S-1 di Departemen Akidah-Filsafat, Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum di MMS, ia cukup lama aktif di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta.

---

Manifestasi Islam di ruang publik harus mengambil bentuk “*value*”, pesan-pesan profetis, yang menginspirasi kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-’âmmah*) yang berupa semangat perdamaian, keadilan, kebersamaan atau persaudaraan, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Islam jangan dihadirkan sebagai “*modus vivendi*” yang mempublikkan wajah formal agama dan, akibatnya, akan sarat kekerasan. Tantangannya, Islam tidak lagi menabukan interpretasi atau proses hermeneutis terhadapnya; mengubah simbolisasi dan corak beragama yang dogmatis-teosentris menjadi antroposentris-partisipatoris melalui pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan terhadap umat. Konsekuensinya, hasrat politik praktis dari institusi-institusi keagamaan harus dikebiri demi mendorong demokrasi dan rasionalitas.

*Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme yang kerap dipahami negatif di Indonesia?*

Menurut saya, sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara. Sebagai paradigma filsafat politik, sejauh ini, sekularisme merupakan paradigma terbaik. Dia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil pergulatan dinamis antara realitas politik dengan institusi keagamaan. Memang, dalam sejarahnya, sekularisme identik dengan pengalaman Barat ketika gereja melakukan intervensi berlebihan terhadap negara. Kekuasaan gereja melahirkan eksese yang sangat negatif, terutama lahirnya otoritarianisme dengan jubah agama. Meski demikian, sekularisme kini mulai dilirik dunia Islam sebagai salah satu tawaran alternatif untuk merasionalkan institusi-institusi politik. Sebab, dunia Islam juga menganut sistem negara-bangsa.

Sekularisme dalam dunia Islam penting dikedepankan. Sebab, tak ubahnya di Barat pada Abad Pertengahan, di dunia Islam pun (terutama sejak Dinasti Muawiyah) selalu terjadi campur tangan institusi keagamaan dalam negara. Agama yang mestinya menjadi kekuatan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan politik yang adil, justru digunakan sebagai kendaraan untuk mengamankan kekuasaan. Khalifah mengklaim dirinya sebagai representasi Tuhan di muka bumi (*zhillullâh fi al-ardl*). Kedaulatan dalam sistem ini bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Tuhan yang 'dimandatkan' kepada khalifah.

Karena itu, menurut saya, tidak ada salahnya jika negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menjadikan sekularisasi sebagai upaya untuk keluar dari determinasi sejarah yang destruktif (berdarah-darah). Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pergantian kekuasaan di masa kekhalifahan sebagian besar terjadi dengan cara yang sangat tragis. Para khalifah wafat dengan cara yang tidak terhormat, karena mereka mencapai kekuasaan tersebut dengan menggunakan kekuatan agama.

Sekularisme niscaya diterapkan di dunia Islam, jika dimaknai sebagai upaya memisahkan agama dengan negara. Saya sangat setuju dengan M. Abid al-Jabiri yang mengatakan bahwa dunia Islam membutuhkan dua hal: demokrasi dan rasionalitas. Dia menerjemahkan dua hal itu sebagai

inti sekularisme. Sayangnya, dua hal itu tidak pernah dimiliki dunia Islam. Padahal, demokrasi dan rasionalitas sangat penting bagi sekularisme di dunia Islam.

Sejauh ini, di dunia Islam terjadi perdebatan tentang definisi sekularisme antara Hasan Hanafi dan M. Abid al-Jabiri. Al-Jabiri mengatakan, kita perlu pemikiran baru untuk meneguhkan sekularisme di dunia Islam, terutama dalam konteks membangun demokrasi. Sementara Hasan Hanafi mengatakan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk memahami sekularisme, karena Islam sudah sekular sejak awal ketika menelorkan ungkapan populer: *i'mal li dunyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamûtu ghadan*, yang artinya bekerjalah untuk urusan duniamu seolah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.

Persoalannya, bagaimana mendefinisikan sekularisme? Menurut Hasan Hanafi sekularisme adalah pemisahan antara dunia dan akhirat. Sementara menurut al-Jabiri sekularisme

adalah pemisahan antara agama dan negara. Saya lebih tertarik mendefinisikan sekularisme sebagai pemisahan antara agama dan negara, bukan pemisahan antara dunia dan akhirat. Menurut saya, agama dan negara adalah masalah duniawi, bukan masalah akhirat. Ketika kita membicarakan agama, kita membicarakan institusi keagamaan dan manusia yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan. Demikian juga dalam politik, kita tidak membicarakan kedaulatan Tuhan, tapi bagaimana mekanisme *sharing of power* dapat dilakukan secara lebih damai dan mewakili semua kelompok. Sekali lagi, saya lebih tertarik pada pemisahan antara agama dan negara.

---

Tidak ada salahnya jika negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menjadikan sekularisasi sebagai upaya untuk keluar dari determinasi sejarah yang destruktif (berdarah-darah).

---

*Dalam Islam biasanya muara perdebatan sekularisme banyak merujuk ke Piagam Madinah. Piagam ini, bagi sebagian kalangan, dianggap sebagai manifestasi dari bentuk negara dalam Islam. Tapi sebagian yang lain memandangnya berbeda, justru Piagam Madinah adalah benih sekularisme, karena*

*di sana Nabi memisahkan secara jelas antara wilayah dunia dan akhirat. Bagaimana menurut Anda?*

Menurut saya, Piagam Madinah bukanlah rujukan sekularisme dalam Islam, melainkan *prototype* pluralisme. Piagam Madinah menjamin keragaman melalui kesepakatan-kesepakatan berbagai kelompok masyarakat (*modus vivendi*). Kalau kita mengkaji sekularisme dalam sejarah Islam, tidak ada bukti yang tegas dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Karena itu, menurut saya, dunia Islam gagal untuk menerapkan sekularisme, kecuali Turki. Turki adalah satu-satunya negara yang konsisten menjadikan sekularisme sebagai denyut nadi dari politik di negaranya. Keberhasilan Turki sendiri dalam menerapkan sekularisme disebabkan dua hal. *Pertama*, Turki tidak banyak memiliki institusi keagamaan atau mazhab-mazhab seperti dalam negara-negara bermazhab Sunni. Yang justru berkembang di Turki adalah gerakan sufisme, yang merupakan satu-satunya kelompok yang tidak punya *interest* pada politik. Hal ini tentu sangat berbeda dengan institusi keagamaan di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki *interest* politik sangat tinggi. *Kedua*, Turki sadar dan belajar dari masa lalu bahwa intervensi agama dalam politik selalu membawa dampak yang sangat berat.

Sekali lagi, menurut saya, Piagam Madinah bukan contoh terbaik untuk sekularisme. Contoh sekularisme yang lebih dekat dengan pengalaman dunia Islam yaitu Turki, sebuah negara yang cenderung tidak memiliki masalah yang lahir dari motif-motif keagamaan. Mereka memahami agama bukan dalam konteks politisasi, tapi dalam konteks penghayatan yang dimanifestasikan dalam ranah yang lebih luas. Mereka relatif mempunyai kebudayaan dan cara pandang global yang lebih terbuka. Karena kebetulan daratannya berdekatan dengan Eropa, mereka lebih bisa melakukan komunikasi dengan Eropa.

Dalam konteks keindonesiaan, menurut saya, masih banyak agenda besar sekularisme, sebab tidak sedikit oknum yang secara telanjang berambisi menggunakan institusi keagamaan untuk tujuan politik. Di masa yang akan datang, kita harus mengedepankan perjuangan agar sekularisme dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi-institusi keagamaan. Kalau institusi ke-

agaamaan di Indonesia masih mempunyai syahwat politik praktis, maka sekularisme akan gagal.

*Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali mengintervensi urusan agama yang sejatinya privat bagi setiap warga. Menurut Anda, sejauh mana agama dapat berperan dalam urusan publik atau negara? Apakah sekularisasi sama sekali tidak memungkinkan adanya peran agama dalam negara?*

Menurut saya, sekularisasi sesungguhnya mencoba memisahkan wilayah agama dan politik. Artinya, politik berusaha diselesaikan dengan mekanisme yang rasional dan sistemik, yang telah tersedia dalam perangkat atau institusi politik itu sendiri. Dalam sekularisme, peran agama dimungkinkan sebagai *supporting ideas* atau *supporting morality*, sehingga politik tidak pincang. Negara dapat terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lantas, apa yang dilakukan agama dalam konteks ini? Hemat saya, agama harus dipahami dalam konteks menciptakan kepen-  
tingan bersama (*public good*).

Sebab, politik bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan agama sesungguhnya mempunyai modal yang sangat baik untuk mendorong penegakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, politik bekerja secara demokratis dan agama bekerja secara rasional untuk melahirkan interpretasi atau kesadaran profetis.

Hanya, kendala yang dihadapi adalah perdebatan keagamaan tidak bisa dilepaskan dari anasir-anasir politik yang melekat dalam agama. Sepanjang pengetahuan saya, dalam ranah teologi, kalam, dan hukum Islam, selalu ada intervensi politik. Sehingga upaya untuk melahirkan agama sebagai moralitas yang mendorong kemaslahatan sosial selalu terhambat. Saya kira, baru belakangan ini pemikiran tentang *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu cita-cita kesejahteraan dan keadilan, mulai terungkap. Tepatnya, ditandai dengan munculnya karya-karya al-Syatibi, Sheikh Muhammad Thahir bin 'Asyur, dan lainnya, yang melampaui pemahaman

---

Saya sangat setuju dengan M. Abid al-Jabiri yang mengatakan bahwa dunia Islam membutuhkan dua hal: demokrasi dan rasionalitas. Dia menerjemahkan dua hal itu sebagai inti sekularisme.

---

tradisional (*beyond the traditional understanding*). Mereka menegaskan pesan sesungguhnya yang dibawa agama Islam.

Saya kira, hal itu menjadi jalan baru agar agama tidak terjebak dalam perdebatan politis yang dilahirkan pada masa lalu. Sebagaimana kita tahu, perdebatan dalam teologi Islam (Asy'ariyah dan Mu'tazilah) tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik, sehingga mereka sering disebut sebagai teologi politis. Teologi politis mempunyai beban historis yang sangat tinggi, di antaranya eksklusivitas dan *killing the others*. Mu'tazilah membunuh Asy'ariyah, begitu pula sebaliknya. Terjadi *homo homini lupus*. Kini, pemikiran untuk menjadikan agama sebagai sumber keadilan sosial memang menjadi alternatif. Dengan begitu, saripati agama dapat ditangkap dan mampu mendorong lahirnya sekularisme yang akan mewarnai dunia politik secara baru.

Masalahnya, seperti apakah sekularisme di dunia Islam? Tentu saja, kita tidak bisa mengidealisasi. Idealisme memang harus ada, tapi kita harus melihat realitanya. Sekularisme selalu gagal di dunia Islam, karena mereka yang merepresentasikan kelompok sekular ternyata tidak memahami inti dari sekularisme. Bagi saya, inti dari sekularisme adalah rasionalisasi ranah politik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Problemnya, selama ini di Indonesia, kelompok sekular atau nasionalis tidak membawa misi keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru menyokong kelompok yang otoriter. Tak hanya di Indonesia, di Mesir pun demikian. Meski belakangan Mesir melirik sekularisme karena terpana dengan kemajuan pesat Barat, tapi pemerintahnya tidak secara serius mewujudkan kesejahteraan sosial rakyatnya.

Singkatnya, demokrasi dan kesejahteraan sosial yang merupakan inti sekularisme belum terwujud di dunia Islam. Ironisnya, negara-negara Muslim justru menempati indeks korupsi yang tinggi, di samping menguatnya ekstremisme dan radikalisme. Di dunia Islam, negara yang telah mewujudkan cita-cita ideal sekularisme atau setidaknya mengakomodasinya, hanya Turki. Sementara, sebagian besar dunia Islam, belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

*Tetapi, sekularisme tidak bisa sama sekali menghilangkan peran agama dalam negara. Jose Casanova pun mendekonstruksi sekularisme dengan konsep*

*deprivatisasi. Baginya sekularisasi tidak sama dengan privatisasi. Karena bagaimanapun agama memiliki peran yang jelas dalam menyokong sekularisasi di publik. Apa komentar Anda?*

Bagi saya, tanpa harus disebutkan bahwa agama mempunyai peran publik, dengan sendirinya agama sudah mempunyai peran publik. Karena, semua agama memiliki ajaran yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tidak ada agama yang hanya membicarakan soal akhirat. Semua agama tidak akan terlepas dari membicarakan kepentingan duniawi, karena agama lahir di dunia. Persoalannya, bagaimana menjamin agar institusi keagamaan tidak mengintervensi politik. Menurut saya, salah satu caranya adalah dengan memperkuat sekularisme. Agama harus diposisikan sebagai *elan vital* dan penyokong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Agama boleh tampil di publik untuk mewarnai kehidupan politik, tapi tidak untuk mengintervensi. Institusi keagamaan apapun, tidak boleh masuk ke dalam ranah politik.

---

Piagam Madinah bukan contoh terbaik untuk sekularisme. Contoh sekularisme yang lebih dekat dengan pengalaman dunia Islam yaitu Turki, sebuah negara yang cenderung tidak memiliki masalah yang lahir dari motif-motif keagamaan.

---

Oleh sebab itu, menurut saya, yang dikatakan Casanova adalah sesuatu yang sudah *taken for granted* dalam agama itu sendiri. Karena itu, perannya pun hanya peran moral, bukan institusional. Dan dia tidak boleh memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Karena jika agama sudah mengintervensi keputusan politik, sangat dimungkinkan hasilnya hanya menguntungkan agama tertentu. Padahal, sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus menjamin kebebasan beragama. Tidak mungkin dalam sebuah negara hanya ada *mono-agama*. Setiap negara memiliki banyak agama. Kalau kita kaitkan dengan Islam, tidak mungkin juga hanya ada *mono-tafsir* dalam agama. Dalam Islam sendiri ada multitafsir. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak sekularisme sebagai tawaran untuk menempatkan agama dalam proporsi yang sesungguhnya.



*Bagaimana dengan gagasan Islam emansipatoris yang sering Anda dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) perjuangkan, apakah itu sebetulnya publik religion yang Anda tawarkan bagi Indonesia?*

Sebenarnya, gagasan Islam emansipatoris merupakan salah satu upaya untuk menerjemahkan agama dalam konteks sosial, bukan konteks politik. Sebagaimana kita ketahui, belakangan muncul istilah *political society* dan *civil society*. Kami memandang ranah agama berada dalam *civil society*. Dan itu juga merupakan kehendak dari sekularisme, agar agama tidak bermain dalam level *political society*.

Mengemukanya pemikiran untuk menempatkan agama dalam ranah *civil society* adalah relevan, karena agama sejak dulu memiliki peran langsung kepada masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan. Sehingga kehadiran agama betul-betul membebaskan dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia. Dan dalam paradigma sosial mutakhir, ternyata wilayah *civil society* adalah wilayah yang begitu luas dan dinamis. Jika dibandingkan, pengaruh gerakan *civil society* lebih riil ketimbang pengaruh gerakan di ranah *political society*. Yang kami lakukan di P3M adalah bagian dari semangat *civil society* yang mulai berkembang pascareformasi.

*Perda syariah diyakini dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi problem sosial di tengah mandulnya hukum positif. Tapi, kenyataannya, perda syariah justru mencederai sekularisme dan membatasi hak dan kebebasan warga. Bagaimana pandangan Anda tentang fenomena tersebut?*

Menurut saya, fenomena maraknya penegakan syariat Islam di Indonesia merupakan salah satu bentuk kegagalan sekularisme. Mengapa? Ada beberapa alasan yang membuktikannya. *Pertama*, sekularisme gagal menyadarkan masyarakat terhadap sejarah kelam intervensi institusi agama ke dalam ranah politik. *Kedua*, tidak adanya kebesaran jiwa mereka (kelompok Islamis) untuk menerima sekularisme sebagai solusi dalam ranah politik. *Ketiga*, munculnya perda syariah di Indonesia juga akibat dari kegagalan kelompok sekular-nasionalis untuk secara konsekuen menerjemahkan sekularisme dalam konteks demokrasi di satu sisi, dan kelompok Islam untuk menyerap nilai-nilai demokrasi di sisi lain. Hemat

saya, munculnya perda syariah dapat dikatakan sebagai kegagalan dua kelompok sekaligus.

Saya pun berpendapat, fenomena formalisasi syariat Islam mencerminkan kian menyeruaknya paradigma politik Islam (*fiqh al-siyâsyah*) yang dibangun di atas mimpi-mimpi surgawi. Di mana berpolitik, dalam konteks ini, bermakna menjalankan perintah Allah, untuk selanjutnya mendapatkan imbalan (*reward*) berupa surga. Mimpi surgawi ini, saya kira, ide yang absurd dalam berpolitik, yang kini sudah tidak relevan. Karena itu, wacana dekonstruksi

paradigma politik Islam klasik menjadi salah satu proposal yang harus kita kedepankan di masa yang akan datang. Terutama dalam konteks untuk memahami bahwa kemaslahatan umum atau dikenal dalam kaidah fikih *tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlahah*, “kebijakan seorang pemimpin dibangun di atas prinsip kemaslahatan,” itu juga harus didefinisikan sebagai esensi

atau hakikat dari politik. Sehingga, politik Islam yang kita definisikan tidak sekadar simbolisasi Islam, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pesan profetik Islam terwakili. Karena itu, tindakan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% juga dapat dikatakan sebagai tindakan politik yang Islami. Melestarikan lingkungan yang bersih dan asri juga bisa disebut Islami.

Memang, hal itu berkaitan dengan dua ranah sekaligus. *Pertama*, ranah umat Islam: umat harus melakukan akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sekularisme serta demokrasi secara lebih dinamis. *Kedua*, ranah sekular: kelompok-kelompok sekular harus memantapkan diri sebagai salah satu manifestasi dari sekularisme. Yang terjadi sekarang ini justru *switch*. Kelompok-kelompok sekular malah mulai terpengaruh kelompok-kelompok Islamis. Sementara, kelompok-kelompok Islamis justru beralih mengusung isu-isu sekular. Menurut saya, ke depan, simbol-simbol keagamaan dalam ranah politik harus dihilangkan. Dan ini di-

---

Bagi saya, inti dari sekularisme adalah rasionalisasi ranah politik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Problemnya, selama ini di Indonesia, kelompok sekular atau nasionalis tidak membawa misi keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru menyokong kelompok yang otoriter.

---

butuhkan kedewasaan kelompok-kelompok sekular dan agama. Tapi, saya ingin menegaskan kembali, bahwa formalisasi syariat Islam adalah bentuk dari kegagalan dua kubu, baik kubu Islam maupun kubu sekular.

*Liberalisme kerap kali dimaknai oleh kalangan agamawan, baik di Islam maupun non-Islam, sebagai kebebasan tanpa batas. Menurut Anda, apa sebenarnya esensi dari liberalisme?*

Menurut saya, liberalisme adalah kebebasan. Kebebasan tanpa tambahan atau embel-embel batas. Kebebasan merupakan salah satu anugerah terbaik yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Kita bebas melakukan apa saja; untuk beragama atau tidak beragama; berdosa atau tidak berdosa dan lainnya. Sebagai anugerah Tuhan, kebebasan harus diformulasikan untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita kemanusiaan. Mengapa banyak orang yang resisten terhadap liberalisme? Karena mereka tidak begitu meyakini pentingnya kebebasan. Padahal, tanpa kebebasan, kita tidak dapat mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pandangan.

Kebebasan merupakan hak prerogatif setiap manusia yang harus dijaga. Bila kebebasan betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, akan terjalin dialog-dialog yang konstruktif. Sebaliknya, jika kebebasan dikontrol atau bahkan ditutup, maka esensi dari kemanusiaan akan hilang sama sekali. Saya meyakini, setiap orang diciptakan mempunyai akal, perasaan, dan hati nurani. Sebab itu setiap orang mempunyai hak untuk bebas menyampaikan pandangannya, ekspresinya, berkelompok, dan lain-lain. Memang, dalam konteks Indonesia – saya setuju dengan Mas Dawam – agar liberalisme dipahami sesuai dengan konteksnya. Makna liberalisme adalah kebebasan, yang merupakan khazanah terbaik yang diberikan Tuhan kepada manusia.

*Liberalisme tentu bukan kebebasan tanpa batas. Sebab, tanpa batasan, kebebasan justru dimaknai oleh kalangan tertentu untuk mencederai liberalisme dan demokrasi itu sendiri. Karena itu, memang harus ada batasan agar kebebasan seseorang tidak melanggar kebebasan orang lain. Bagaimana pandangan Anda?*

Kita memang harus mendefinisikan kebebasan dalam ranah individu yang bersifat kultural dan kebebasan dalam ranah publik atau politik. Keduanya saya kira berbeda. Kebebasan individu dalam ranah kultural menjadi sesuatu yang niscaya, karena pola interaksi hubungan individu dalam masyarakat dibangun sesuai dengan karakter kebudayaan dan sejarah masyarakat tersebut. Batasannya, menurut saya, sejauh kesepakatan yang dilahirkan sebuah tradisi dalam masyarakat, atau *habitus* yang sudah diterima. Misalnya, kebebasan individu di Madura dengan di Los Angeles jelas berbeda, karena kulturnya juga berbeda. Tetapi, dalam ranah politik, kebebasan sangat terikat dengan konteks masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia, dalam konteks politik, akan sangat berbeda dengan masyarakat di Arab Saudi. Di mana Indonesia dibangun oleh keragaman agama, suku, bahasa, dan ras, sedangkan Arab Saudi dibangun hanya dengan homogenitas politik, yang diwakili oleh Wahhabisme.

Karena itu, menurut saya, kebebasan individu dalam konteks politik ditentukan sejauh mana homogenitas atau heterogenitas

masyarakat yang ada pada suatu bangsa. Pada akhirnya, hal itu tergantung pada bangunan kesepakatan-kesepakatan dalam ranah politik. Tetapi, sebagai sebuah nilai, liberalisme atau kebebasan, memang harus didorong oleh semua masyarakat. Karena itu, saya setuju dengan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa liberalisme Indonesia dan Amerika berbeda. Karena, memang konteksnya berbeda. Makanya, sekarang muncul istilah *local democracy*, mungkin juga muncul *local liberalism*. Saya kira liberalisme atau kebebasan juga harus diterjemahkan dalam konteks Indonesia.

Terkait masalah agama, menurut saya, memang agama Islam tidak terlalu serius melahirkan pandangan yang sejalan dengan liberalisme. Karena, dalam Islam ada otoritas ulama yang sangat kuat, yang kerap kali

---

Sekularisme dalam dunia Islam penting dikedepankan. Sebab, tak ubahnya di Barat pada Abad Pertengahan, di dunia Islam pun (terutama sejak Dinasti Muawiyah) selalu terjadi campur tangan institusi keagamaan dalam negara. Agama yang mestinya menjadi kekuatan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan politik yang adil, justru digunakan sebagai kendaraan untuk mengamankan kekuasaan.

---

mengkekang kebebasan individu. Salah satunya melalui fatwa keagamaan. Fatwa menjadi ancaman bagi liberalisme, karena dia mengontrol atau mengawasi pandangan-pandangan keagamaan yang muncul dalam masyarakat. Bahkan, tak sekedar mengawasi tetapi juga memutuskan baik-buruk dan halal-haram. Ini jelas dapat menjadi ancaman serius bagi liberalisme. Karena, agama tidak begitu serius dipahami sebagai kekuatan pendorong untuk mendinamisir pemikiran. Tetapi, agama dipahami sebagai polisi bagi pemikiran keagamaan.

Ada dua hal yang harus dilakukan ke depan. *Pertama*, mendefinisikan kebebasan dalam konteks Indonesia yang sesuai dengan kultur dan keragaman politik yang ada. *Kedua*, kita harus betul-betul menformulasikan bagaimana sesungguhnya kebebasan dalam pandangan Islam. Kita tidak perlu sebuah institusi seperti MUI untuk mengontrol kelompok keagamaan. Karena, kelompok seperti itu menjadi ancaman serius bagi lahirnya gagasan-gagasan kreatif di Indonesia. Kita juga sudah cukup lama merasakan intervensi agama dalam kebebasan, sehingga hampir tidak ada gagasan-gagasan besar yang lahir di Islam Indonesia belakangan ini. Hal itu terjadi karena otoritas keagamaan yang sangat dominan. Dan belakangan, peran yang dilakukan oleh MUI adalah satu bukti yang cukup kuat bahwa bangsa ini harus bersiap-siap untuk tidak akan melahirkan ijtihad-ijtihad pemikiran baru. Tentu saja pengharaman liberalisme juga harus dibayar mahal, yaitu matinya kreativitas dalam pemikiran Islam. Yang terjadi kemudian adalah taklid. Celaknya, taklid yang dikopi dari Timur Tengah, hanya melahirkan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

*Meski praktik insitusi Islam seperti MUI sangat bertolak belakang dengan ide kebebasan, tapi apakah Islam sendiri mempunyai doktrin tentang liberalisme?*

Ya, sesungguhnya Islam banyak mengajarkan kebebasan. Dalam Islam ditegaskan “Tidak ada paksaan dalam beragama,” artinya ada kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Dalam ayat lain disebutkan “*lakum dînukum waliya dîn.*” Karena itu, sesungguhnya kebebasan menjadi ruh dalam Islam. Tetapi, kebebasan yang dimaksudkan dalam Islam adalah kebebasan yang dibangun berdasarkan pemikiran yang rasional. Sebab ini merupakan inti dari ajaran Islam. Kenapa ini menjadi inti dari ajaran Islam? Sheikh Yusuf Qardlawi mengatakan, dalam al-Quran terdapat sekitar 300

ayat lebih yang mendorong umat Islam untuk berpikir. Bahkan, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Fashl al-Maqâl fi mâ bayna al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishâl* juga mengatakan, berpikir merupakan kewajiban. Islam mendefinisikan kebebasan sebagai kebebasan yang dilandasi rasionalitas. Karena itu, para ulama meyakini hanya dengan cara demikianlah liberalisme akan melahirkan suatu entitas pemikiran yang produktif dan inovatif. Sehingga, kebebasan tidak liar seperti apa yang kita lihat.

Dalam konteks fikih, Islam mempunyai ijtihad. Kita juga mengenal ada kehendak dari kalangan agamawan untuk berbeda pendapat. Dan itu menjadi khazanah yang sangat menarik. Kebebasan individu menjadi salah satu piranti yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi, ada hal yang menarik, kelak kita akan menghadap Tuhan secara individu. Hal itu merupakan jaminan, bahwa yang kita lakukan sesungguhnya juga akan dijadikan modal untuk menghadap Tuhan secara individu. Di atas itu semua, Islam sangat menghargai kebebasan, sejauh dibangun di atas landasan rasionalitas.

---

Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara. Sebagai paradigma filsafat politik, sejauh ini, sekularisme merupakan paradigma terbaik. Dia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil pergulatan dinamis antara realitas politik dengan institusi keagamaan.

---

*Munculnya perda syariah dinilai melanggar HAM. Dalam konteks negara demokratis, apakah kemunculan aturan-aturan yang bersumber dari agama tertentu, yang pada saat bersamaan juga mencederai kebebasan, dapat dibenarkan?*

Menurut saya, pemerintah pusat seharusnya tegas menolak perda-perda yang secara nyata mencederai kebebasan, terutama kebebasan individu untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam konteks keberagamaan, kelak di akhirat negara tidak akan ditanyakan Tuhan. Yang ditanyakan Tuhan adalah individunya. Karena itu, negara harus menghormati kebebasan individu dalam masyarakat. Beragam peristiwa yang mencederai

kebebasan beragama belakangan ini, terjadi karena negara tidak cukup berwibawa, lemah, sehingga negara tidak punya kekuatan penekan yang bisa menjamin kebebasan, baik dalam ranah kultural maupun ranah politik.

Sejatinya, ke depan, perlu ada pemberdayaan yang lebih serius oleh kalangan agamawan untuk menjelaskan betapa pentingnya kebebasan pada ranah internal umat beragama dan ranah yang lebih luas. Lalu, negara juga harus tegas untuk mengeliminasi perda yang bertentangan dengan kebebasan individu. Sebab, perda syariah telah mengintervensi peran-peran yang semestinya dilakukan oleh institusi keagamaan, karena negara tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Padahal, dalam Islam banyak pandangan tentang sebuah masalah. Misalnya, bagaimana hukum jilbab dan sebagainya. Ke depan, harus ada keberanian dari kelompok-kelompok progresif untuk menjelaskan pentingnya pemisahan agama dan negara. Juga jaminan negara terhadap kebebasan individu. Itu yang harus kita dorong. Kondisi yang sekarang kita alami adalah bagian dari proses yang harus dilalui bangsa ini untuk keluar dari masalah yang dihadapi.

*Selain mencederai kebebasan, perda syariah juga mencederai pluralisme. Bagaimana konsep pluralisme mestinya dipahami?*

Menurut saya, kita harus mengakui bahwa ada perbedaan di antara agama, aliran, mazhab, dan lainnya. Itu prinsip dalam pluralisme. Tapi, perbedaan itu harus dimaknai dalam konteks membangun kebersamaan. Bangsa ini telah melahirkan suatu ijtihad kultural yang sangat kreatif yaitu Bhinneka tunggal ika. Itu merupakan salah satu khazanah pluralisme yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena itu, keragaman yang ada dalam bangsa ini harus dikonstruksi sebagai upaya untuk – seperti yang disampaikan oleh Muhammad Imarah – mengambil pengkhususan-pengkhususan yang ada dalam setiap entitas, baik agama maupun kultur yang ada pada bangsa ini.

Dengan cara pandang yang konstruktif itu, maka kita akan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan yang disebabkan perbedaan. Perbedaan tidak dianggap sebagai suatu persaingan yang saling menegasikan kelompok yang lain, tapi dianggap sebagai sebuah potensi untuk membangun sebuah prestasi. Di sinilah menurut saya kita harus berbesar hati, untuk mengakui kebenaran atau hikmah yang datang dari kelompok manapun. Karena, seperti yang dikatakan Imam Ali, “Kebaikan yang

bersumber dari manapun kita anggap sebagai kebaikan.” Itu salah satu ciri yang menonjol dari pluralisme. Apabila kita melihat kebaikan dalam agama Budha, maka itu kita anggap sebagai unsur yang bisa membangun sebuah peradaban, demikian juga yang lainnya. Itu bisa dijadikan sebagai energi positif untuk membangun masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Hanya saja, hambatan yang sekarang terjadi adalah kita selalu terjebak dalam monisme atau kebenaran tunggal. Yakni, perasaan bahwa yang paling benar adalah kelompoknya. Apabila keragaman ini tidak bisa ditemui sebagai alternatif untuk membangun kebersamaan, inilah tantangan yang paling berat dalam pluralisme. Harus diakui, fatwa MUI menjadi salah satu bulldoser atau entitas yang merusak terhadap kebhinekaan yang sudah ada pada bangsa ini. Dengan mengharamkan pluralisme, MUI berarti tidak mengakui nilai-nilai luhur yang ada pada agama lain. Padahal, itu yang menjadi ruh dari pluralisme. Ketika MUI mengharamkan gagasan semua agama itu sama, berarti ada kekuatan monisme, yaitu MUI sendiri. MUI memperlihatkan diri sebagai kelompok yang ingin dikatakan terbaik dalam Islam, meskipun mereka tidak punya basis massa yang jelas. Singkatnya, fatwa MUI menurut saya telah membunuh khazanah pluralisme atau keragaman yang ada pada bangsa ini.

Ke depan, yang harus kita lakukan ada tiga hal: *pertama*, membangun paradigma toleransi. Artinya, munculnya pemahaman dan tindakan yang menganggap keragaman sebagai energi positif untuk menghimpun kebenaran-kebenaran atau kekuatan yang ada dalam agama itu sendiri. *Kedua*, toleransi yang liberatif dan transformatif. Seharusnya, potensi-potensi besar yang ada pada bangsa ini sebisa mungkin didorong untuk melahirkan atau menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa ini, misalnya kemiskinan. Saya merasakan bahwa kemiskinan bukan hanya tanggung jawab umat Islam. Kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh

---

Agama harus diposisikan sebagai *elan vital* dan penyokong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Agama boleh tampil di publik untuk mewarnai kehidupan politik, tapi tidak untuk mengintervensi. Institusi keagamaan apapun, tidak boleh masuk ke dalam ranah politik.

---



umat beragama yang ada pada bangsa ini. Karena sebenarnya kita sudah mempunyai kesepakatan politik sebagai sebuah bangsa yang menjamin kesejahteraan semua warga negara.

*Ketiga*, tanpa toleransi yang dibangun oleh agama-agama tersebut, maka tidak akan muncul perasaan bersama. Padahal, perasaan bersama sangat penting bagi sebuah bangsa, agar masalah yang begitu besar ini bisa diemban bersama sehingga lebih cepat teratasi. Contohnya meja. Anggap sebuah meja adalah kemiskinan, konflik, dan kebodohan. Kalau meja itu hanya dibawa umat Islam, maka akan terasa amat berat, di mana umat Islam tidak cukup punya kekuatan. Makanya, untuk menyelesaikannya, harus diusung bersama-sama. Karena itu, sesungguhnya toleransi dapat menjadi penyelamat masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia. Saya sangat menyesalkan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme. Sebab, dengan mengharamkan pluralisme, berarti MUI telah menutup peluang untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi bangsa ini secara bersama-sama.

*Bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme yang dianggap sebagai relativisme dan sinkretisme?*

Menurut saya, hal itu terjadi karena monisme. Cobalah untuk memahami agama tidak sekadar teologis. Agama bukan sekadar kumpulan teks, bukan pula sekadar kesadaran yang lahir dari wahyu. Agama adalah pergulatan manusia dengan realitasnya. Atau yang dikenal dengan *hablun min al-nâs*. Kalau kita coba membuka mata dan akal pikiran terhadap realitas yang ada di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pada ranah sosiologis, keragaman menjadi fakta yang tak terbantahkan. Bukan hanya keragaman antar-agama, tapi juga internal agama itu sendiri.

Karena itu, menurut saya, kita harus mengubah corak keagamaan yang dogmatik-teosentrik menjadi keagamaan yang antroposentris-partisipatoris. Keberagaman dalam konteks ini bukan dari Tuhan ke manusia, tetapi dari manusia ke Tuhan. Artinya, basis sosiologis yang plural menjadi semacam kesadaran baru untuk memahami apa sesungguhnya yang perlu kita pahami dalam beragama. Dengan demikian, kita tidak akan mengatakan bahwa pluralisme adalah sinkretisme dan relativisme. Yang kita inginkan adalah agama harus betul-betul menyapa dan berdialog dengan realitas kemanusiaan. Dalam konteks ini, MUI tidak mempunyai

pemahaman bahwa agama sudah menjadi milik realitas kemanusiaan. MUI mengatakan bahwa agama itu wahyu. Agama sebagai wahyu memang mempunyai aturan main yang sangat ketat dengan standar-standar dan kode etiknya sendiri. Tetapi agama sebagai realitas itu menembus batas-batas yang paling sempit sekalipun.

Mengapa Islam menjadi agama yang ekspansinya sangat luar biasa? Kalau kita perhatikan, di antaranya memang karena Islam dalam konteks realitas bisa menembus batas-batas tersebut. Islam sebagai agama pluralis, inklusif, dan toleran justru berdampak positif karena Islam bisa melampaui batasnya. Islam lahir di Arab, tapi dia ada di Eropa, Afrika, Indonesia, bahkan di Amerika Latin. Waktu saya ke Chile, saya mendapati banyak umat Islam di sana. Di satu sisi mereka menjadi orang Latin, mereka hidup di sana, tapi sekaligus juga menjadi orang Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang secara realitas mampu menembus batas-batas aturan dan teritorial dari Islam itu sendiri.

---

Kita harus mengedepankan perjuangan agar sekularisme dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi-institusi keagamaan. Kalau institusi keagamaan di Indonesia masih mempunyai syahwat politik praktis, maka sekularisme akan gagal.

---

Menurut saya, kita harus mengubah *mindset* dari teosentris menjadi antroposentris. Sebab, kalau kita hanya terjebak pada *mindset* teosentris, kita akan selalu mengatakan pluralisme adalah sinkretisme dan relativisme, dan itu ciri khas dari monisme: menutup mata terhadap keberagaman yang ada pada ranah sosial. Idealnya, keduanya (teosentris dan antroposentris), dapat saling sinergi. Karena itu, mau tidak mau kita membutuhkan interpretasi dan hermeneutika agar tidak ada *gap* antara realitas dengan unsur-unsur teologis yang terdapat di dalam agama. Sejauh ini, dalam waktu yang cukup panjang, agama masih berada di langit. Seolah, belum ada semacam kerelaan dan keinginan kuat dari para ulama untuk menerjemahkan atau merelakan agama berada di bumi. Padahal, Islam sebagai agama selalu bergulat dengan realitas menjadi *living religion*, agama yang hidup di tengah masyarakat. Munculnya fatwa MUI menunjukkan bahwa agama hanya dipahami dalam ranah teologis.

*MUI menganggap sesat dan melarang Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiyah, dan Lia Eden, tapi agama-agama lokal tidak pernah disentuh oleh isu perbedaan agama dan pembatasan religious freedom, mengapa?*

Menurut saya, sebesar apa pun MUI mengeluarkan fatwa, tidak akan mampu memberangus keragaman yang ada di masyarakat. Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi MUI kecuali harus menerima fakta keragaman itu sendiri dan menjadikan keberagaman itu sebagai energi positif untuk membangun kebersamaan. Pilihannya hanya ada dua, *pertama*, menolak pluralisme dan terjebak dalam monisme. Atau, *kedua*, menerima pluralisme dan mencoba untuk melakukan semacam proses-proses kreatif agar keragaman agama, suku dan lainnya, dapat membangun paradigma kebangsaan yang lebih ideal, yang di dalamnya ada watak keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, saya menolak tegas fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, karena bisa menegasikan ke-indonesiaan yang di dalamnya ada agama lokal, budaya lokal, dan institusi keagamaan yang sangat luar biasa beragam.

*Praktik pluralisme hendaknya tidak sekadar mengakui perbedaan, tetapi harus ada pembelaan secara konkret terhadap kaum minoritas yang tertindas. Apa komentar Anda?*

Benar, ketika kita mengakui perbedaan berarti harus membela kelompok minoritas. Mengakui perbedaan berarti seluruh kelompok harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks politik, apapun partai politiknya mereka adalah sama di depan hukum. Sampai di sini, saya kira pluralisme tidak hanya dimaknai pada ranah agama, tetapi juga harus dimaknai dalam ranah politik, yang disebut dengan prinsip kewarganegaraan. Karena itu, ke depan, harus mampu melakukan rekonstruksi dari paradigma pluralisme menjadi paradigma kewarganegaraan (*citizenship*). Paradigma kewarganegaraan sesungguhnya sudah mengadopsi multikulturalisme. Negara-negara yang mengadopsi gagasan ini di dalamnya ditandai dengan keragaman yang harus dimaknai dalam konteks kesetaraan sebagai sesama warga negara. Tetapi, praktik sejauh ini, di Indonesia belum cukup serius memaknainya sebagai kesetaraan sesama warga negara.

*Jika demikian, dalam konteks Indonesia, faktor apa yang menyebabkan sulitnya menciptakan kesetaraan antarwarga?*

Memang dalam konstitusi semua warga negara sama di depan hukum. Tapi, realitasnya, antara kelompok mayoritas dan minoritas terdapat *gap* yang masih terlalu jauh. Sehingga, ada klaim bahwa demokrasi sekadar klaim mayoritas atau kemenangan mayoritas terhadap minoritas. Ke depan, bagaimana agar klaim mayoritas ini dibantu dengan klaim kesetaraan yang merupakan bagian terpenting dalam pluralisme. Sebab, pluralisme tidak akan terbangun tanpa paradigma kesetaraan sebagai sesama warga negara.

Di Amerika, konsep ini dikembangkan dengan sebutan paradigma *melting pot* atau peleburan. Paradigma ini mengandai-kan peleburan antara mayoritas dan minoritas sebagai sesama warga negara yang mempunyai hak

yang sama. Oleh karena itu, untuk membangun pluralisme, pada akhirnya dibutuhkan HAM. Kita melihat seseorang bukan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan haknya.

---

Agama sejak dulu memiliki peran langsung kepada masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan. Sehingga kehadiran agama betul-betul membebaskan dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia.

---

*Apa yang harus kita perbuat, sebagai umat Islam, dalam mempertanggung-jawabkan pelbagai kasus peminggiran, pembatasan, dan pencabutan terhadap hak-hak dan kebebasan kalangan minoritas (yang dianggap sesat), baik di internal Islam sendiri maupun terhadap agama lain?*

Saya kira Islam harus dimaknai sebagai agama kedamaian. Dengan begitu, akan menjadikan kita sebagai umat yang relatif terbuka dan menerima keragaman. Selama ini, kita selalu mendefinisikan Islam sebagai agama kekerasan. Segala sesuatunya seolah bisa dilakukan oleh umat Islam meskipun harus menggunakan kekerasan. Hal ini menjadi ancaman serius dalam paradigma keagamaan kita. Karena, agama selalu diidentikkan dengan kekerasan.

Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami kembali Islam sebagai agama kedamaian. Pemahaman demikian, akan membuka hati nurani kita untuk melindungi kelompok minoritas dan melakukan langkah-langkah transformatif.

*Belum lama ini, Anda menulis buku berjudul Al-Quran Kitab Toleransi. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam buku tersebut?*

Buku itu lahir dari sebuah keprihatinan terhadap tafsir keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras, yang secara nyata membajak nilai-nilai ideal agama. Dalam berbagai forum, saya kerap melihat bahwa al-Quran dipahami oleh mereka (Islam garis keras/radikal) sebagai sumber intoleransi. Ini menjadi hambatan serius, karena ternyata sebagian umat Islam tidak mempunyai kebesaran jiwa untuk menjadikan Islam sebagai agama toleransi. Karena itu, perlu ada upaya serius dari kalangan Muslim untuk menggali khazanah toleransi di dalam tradisi agamanya. Saya memandang bahwa al-Quran merupakan kitab suci yang hadir untuk mendorong bangunan-bangunan pragmatik yang toleran.

Dalam buku tersebut, saya menemukan sekitar 300 ayat dalam al-Quran yang mendukung toleransi. Toleransi dapat dikatakan sebagai spirit utama dalam al-Quran. Di antaranya, al-Quran mengakui Taurat dan Injil, dan umat non-Muslim ada kemungkinan masuk surga. Lalu, Islam secara nyata mendorong kita untuk berdakwah dengan santun, dialogis, dan argumentatif. Islam juga mendorong kebebasan beragama dan lainnya.

Jadi pangkal keprihatinan saya: umat Islam mempunyai kitab suci yang sangat mulia, tapi belum mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku *Al-Quran Kitab Toleransi* mencoba menggali ayat-ayat yang mendorong inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme.

Ke depan, saya berharap buku ini menjadi bacaan alternatif bagi generasi muda, terutama kalangan mahasiswa dan eksekutif muda. Sehingga, mereka menjadikan toleransi dan kedamaian sebagai nilai yang sangat mahal harganya, yang harus diambil dari dalam al-Quran, berapapun ongkosnya, supaya kita menjadikan agama sebagai energi yang positif dan dinamis, bukan energi yang destruktif dan statis. Buku ini juga menjadi salah satu cara untuk berinteraksi dengan al-Quran, yang sejauh ini, menurut saya, pesan utama yang terkandung di dalamnya adalah toleransi dan kedamaian.

*Dalam konteks pluralisme, Anda kerap membedakan antara Islam sebagai value dan sebagai modus vivendi, tolong jelaskan? Dan apa yang diharapkan dari pemahaman model demikian?*

Ada sejumlah kalangan yang mengimani bahwa Islam merupakan tumpukan hukum positif yang diyakini kuat dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Menurut mereka, Islam merupakan kesepakatan politik yang mengikat seluruh warga-negara. Islam harus dijadikan sebagai konstitusi sebuah negara. Itu namanya Islam sebagai *modus vivendi*. Dalam hal ini, negara sudah bisa dipastikan akan memberlakukan kelompok minoritas secara tidak adil, karena negara sudah memilih paham agama tertentu untuk dijadikan sebagai undang-undang dan peraturan.

Dalam sejarahnya, Islam sebagai *modus vivendi* telah terbukti gagal, karena yang tampil ke permukaan adalah wajah kekerasan dari Islam. Di antaranya, hukum potong tangan, penindasan terhadap kalangan perempuan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jatuhnya Dinasti Ottoman merupakan contoh dari kegagalan Islam sebagai *modus vivendi*.

Sekarang sebagian besar dunia Islam menghindari upaya menjadikan Islam sebagai dasar politik.

Karena itu, solusinya adalah memahami Islam sebagai *value*, yaitu Islam sebagai kebajikan. Islam sebagai *rahmatan li al-‘alamîn*. Tanpa harus masuk dalam ranah politik praktis, nilai-nilai Islam dapat mendorong transformasi sosial. Islam mendorong demokratisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dalam bahasa fikih, Islam harus menjadi kekuatan sebagai pendorong bagi terciptanya kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-‘ammah*). Islam dapat berperan di ruang publik, tapi bukan untuk menunjukkan otoritarianismenya, melainkan untuk menunjukkan kelembutan dan kerahmatannya. Di samping, Islam harus memberikan inspirasi kepada

---

Agama sesungguhnya mempunyai modal yang sangat baik untuk mendorong penegakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, politik bekerja secara demokratis dan agama bekerja secara rasional untuk melahirkan interpretasi atau kesadaran profetis.

---

umatnya untuk merawat dan merayakan keragaman. Karena keragaman sangat dihargai dan dilindungi oleh Islam.

Dengan demikian, jika Islam dikedepankan sebagai *value*, maka Islam akan senantiasa dipahami sebagai agama yang membawa pesan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan. Adapun kekerasan yang mengatasnamakan Islam akan sirna, karena sesungguhnya kekerasan sangat jauh dari inti ajaran Islam.

*Tidak jarang pencederaan nilai pluralisme dan kebhinekaan bangsa ini bermula dari pemahaman keislaman yang kelewat tekstual dan eksklusif terhadap “the other”. Tidakkah dalam al-Quran dan Hadits juga bertabur nilai-nilai yang sangat tidak toleran?*

Saya memandang, bahwa pemahaman Islam *per se* tanpa memandang konteks historis akan melahirkan keberagaman yang eksklusif. Bahkan di pihak lain bertentangan dengan semangat pluralisme dan toleransi yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ketika Islam turun ke muka bumi, Islam bukanlah agama yang pertama kali turun. Islam merupakan kelanjutan dari agama-agama samawi lainnya, utamanya Yahudi dan Kristen. Karena itu, relasi antar-umat agama-agama samawi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Rasulullah sendiri pernah berpesan kepada Siti Aisyah agar bersikap lemah-lembut kepada umat Yahudi. Sikap benci tidak boleh dibalas dengan sikap benci pula.

Di pihak lain, Nabi Muhammad menyebut umat-umat lain sebagai satu umat (*ummah wâhidah*) bersama umat Islam, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad sangat menghargai pemuka agama-agama lain, dan di dalam al-Quran mereka juga disebutkan sebagai orang-orang saleh. Jadi, sesungguhnya kalau merujuk pada khazanah Islam, sedikit-banyak terdapat fakta yang memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kebhinekaan. Meskipun harus diakui bahwa ada juga pesan dan kisah yang menyiratkan tentang adanya intoleransi dan konflik.

*Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah dan civil society terkait paham dan praktik keislaman yang agresif dan intoleran?*

Hemat saya, kelompok masyarakat sipil harus menjadi penyeimbang dan pengingat bagi pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi

untuk memberikan jaminan bagi keragaman dan hak hidup setiap warga negara, apapun agama dan keyakinannya. Di samping itu, kelompok masyarakat sipil juga mempunyai tugas untuk menghadang laju fundamentalisme dan ekstremisme, yang mana mereka mempunyai agenda untuk mengganti konstitusi kita dengan mengajukan proposal negara agama.

Karena itu, langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan penyadaran kepada masyarakat agar tidak terkecoh dengan janji-janji manis kalangan ekstremis. Kita harus sebariskan pesan Imam Ali, *“Kedaulatan Tuhan adalah kalimat yang baik, tetapi sebenarnya mengandung kebatilan.”* Sebab, kedaulatan Tuhan bukan untuk tujuan peribadatan, melainkan untuk ambisi dan animo kekuasaan. Mereka sebenarnya

berpolitik dengan cara-cara murahan, dengan menjadikan agama sebagai modal politik kekuasaan. Di sini, letak pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mengenal dengan baik kandungan agama yang mengajarkan pada kedamaian, keadilan, kesetaraan, dan menjauhi pelbagai janji-janji palsu yang diembuskan oleh kalangan fundamentalis.

*Pengusiran dan pengrusakan rumah ataupun dan tempat ibadah warga Ahmadiyah menjadi salah satu potret betapa pluralisme masih menjadi barang langka di negara kita. Belum lagi kasus yang menimpa Lia Eden, Mushadeq, Usman Roy dengan salat dua bahasanya, dan lainnya. Komentar Anda?*

Saya kira ada dua langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, kelompok-kelompok minoritas harus dilindungi dan memandang mereka sama sebagai warga negara. Sebagai warga negara mereka mutlak mempunyai hak hidup di republik ini. *Kedua*, sebagai bagian dari keberagaman, mereka harus diperlakukan dengan baik, yaitu melalui dialog-dialog konstruktif. Apalagi masalah yang berkaitan dengan keyakinan merupakan sesuatu yang amat privat bagi setiap orang. Cara-cara dialog yang arif, santun, dan

---

Sebesar apa pun MUI mengeluarkan fatwa, tidak akan mampu memberangus keragaman yang ada di masyarakat. Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi MUI kecuali harus menerima fakta keragaman itu sendiri dan menjadikan keberagaman itu sebagai energi positif untuk membangun kebersamaan.

---



konstruktif merupakan jalan terbaik untuk menyikapi keyakinan dan paham keagamaan mereka.

Cara-cara yang identik dengan kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyikapi munculnya kelompok dan aliran baru. Toh, fenomena seperti itu bukanlah hal baru dalam sejarah agama-agama. Jadi, perlu dialog-dialog yang bersifat intensif, terutama dalam rangka mengukuhkan sikap toleran terhadap kelompok minoritas.

*UU No. 1/PNPS/1965 dan turunannya pasal 156a tentang penodaan agama dan gangguan akan ketertiban umum dalam KUHP menjadi amunisi utama pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu untuk membuat agama (Islam) menjadi satu warna. Bagaimana tanggapan Anda dengan kedua ketentuan hukum tersebut?*

Peraturan tersebut dapat menjadi bola liar, sebab sejauh ini belum ada kriteria yang jelas dan terang-benderang tentang ‘penodaan agama.’ Lembaga manakah yang mempunyai otoritas untuk menentukan ‘penodaan agama’? Sejauh ini, MUI dipahami oleh sebagian kalangan sebagai salah satu institusi yang mengeluarkan keputusan atau fatwa tentang penodaan agama. Misalnya, kelompok A dan B difatwa sesat. Di samping itu, pasal penodaan agama merupakan bola liar yang dimainkan oleh kelompok ekstremis. Sebagaimana di negara-negara lain, mereka melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan pasal penodaan agama. Karena itu, sebaiknya peraturan tersebut ditinjau ulang, karena hanya akan menjadi tempat berteduhnya kelompok-kelompok puritan-ekstremis.

*Bagaimana Anda melihat nasib pluralisme di negeri ini ke depan, apakah akan makin terkonsolidasi sehingga menjadi wana hidup bangsa, atau malah makin tercederai untuk kemudian benar-benar punah?*

Kuncinya adalah tegaknya Pancasila dan UUD 1945. Sejauh sebagian besar publik menghendaki keduanya sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara, maka pluralisme akan mempunyai masa depan. Sebaliknya, bilamana nanti keduanya digantikan oleh ideologi agama tertentu, maka pluralisme akan mengalami pembonsaian dari kelompok yang selama ini bermimpi tentang negara agama.

Di samping itu, masa depan pluralisme juga sangat ditentukan sejauh mana komitmen kalangan moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, agar pluralitas dan kebhinekaan yang merupakan karakter dari bangsa ini dijamin dan segenap warga yang berbeda agama dan keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai. Sebaliknya, bilamana kedua ormas besar ini bermain mata dengan kalangan ekstremis untuk tujuan-tujuan politis, maka pluralisme akan mempunyai masa depan yang suram.

Sebagai seorang Muslim yang bangga terhadap kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya memandang pluralisme harus senantiasa dijaga dan ditumbuhkembangkan di negara tercinta ini.

Wawancara dilakukan di Pondok Indah Jakarta, Jumat 22 Februari 2008,

Percakapan dengan

Zuly Qodir



**Zuly Qodir**, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2005-2010, yang sekaligus sejak 2006 mengepalai Litbang majalah Suara Muhammadiyah. Ia meraih gelar master Islamic Studies dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan doktor Sosiologi dari UGM Yogyakarta.

---

Kebebasan menjadi hal yang musykil ketika agama diformalisasi dan diinstitutionalisasi. Agama menjelma rezim. Oleh sebab itu sekularisme menjadi kemestian Indonesia. Ia tidak melemahkan iman umat Islam, justru mempertebal iman apabila ditempuh melalui penguasaan ilmu pengetahuan, bukan dogmatisme agama, dalam menyikapi akutnya segenap persoalan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, korupsi, dan sebagainya. Maka sudah semestinya negara tanggap dalam merespon itu semua. Sementara, pada situasi di mana alienasi mengkristal dalam sikap inferioritas akut, umat Islam ke depan harus merevisi fikih-fikih klasik dan mengubah pemahaman teologi fatalis untuk dirumuskan menjadi solusi-solusi konkret demi mengatasi kompleksitas problem sosial yang mendera umat.

*Kita mulai dari pertanyaan paling dasar: bagaimana pemahaman Anda mengenai sekularisme? Kenapa paham ini seringkali disalahpahami sebagai paham yang ingin menyingkirkan peran agama dari kehidupan?*

Sekularisme mulai menghangat di Indonesia setelah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Dawam Rahardjo mengusungnya. Ketika mendengar konsep itu, yang terpikir oleh masyarakat adalah paham yang tak mengakui Tuhan dan terlalu percaya pada akal manusia. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut berasal dari Barat. Untuk itu, saya berpikir untuk menggunakan istilah lain, seperti kata “keragaman” untuk menunjuk pada istilah pluralisme. Dengan itu masyarakat tampak lebih menerima.

Jadi, ketika kita menggunakan term-term Arab atau lokal, masyarakat relatif lebih menerima dibanding kalau kita menggunakan term seperti sekularisme yang berasal dari Barat. Karena mereka menganggap term tersebut sebagai term kafir dan murtad. Padahal sebenarnya, menurut saya, bahasa itu tidak Barat atau Timur. Memang bahasa bisa tidak netral, tetapi kalau kita tilik dari kata sekularisme itu sendiri, saya pikir bahasa netral.

Fenomena ini menjadi sangat menggejala karena khatib-khatib di masyarakat sering mengkhutbahkan atau memberikan penjelasan bahwa sekularisme adalah paham yang hanya percaya pada nalar manusia. Dengan kata lain mereka yang memeluk sekularisme dianggap atau dituduh terlalu mementingkan akal ketimbang Tuhan. Untuk sekadar menyebut contoh, beberapa kiai di pesantren, sampai beberapa dekade belakangan, sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang mempelajari ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora, karena sekular. Sekalipun kiai non-pesantren juga banyak yang alergi dengan ilmu-ilmu sosial. Padahal, pengetahuan tersebut sangat penting.

Dengan anggapan-anggapan seperti itu, saya duga, jangan-jangan, para kiai memahami dunia ini adalah pesantren, dunia ini adalah Islam, bukan dunia yang penuh perubahan dan dinamika. Tentu saja tidak semua kiai pesantren, sebab belakangan ada kiai-kiai pesantren yang sangat akrab dengan ilmu-ilmu sosial, sekalipun agak terpaksa dan mungkin terlambat. Tetapi, bisa dilihat bedanya mana kiai yang bersedia belajar ilmu humaniora dengan yang tidak bersedia.

Di masyarakat lebih akrab menggunakan istilah seperti *syar’iyah* dan *mu’amalah*, istilah yang membedakan antara yang ibadah dan bukan ibadah.

Ini memudahkan kita memetakan mana yang familiar dengan ilmu-ilmu Arab (bahasa Arab) dan ilmu non-Arab.

Padaahal, bagi saya, sekularisme adalah proses yang tidak mungkin ditolak. Pemisahan antara wilayah dunia dan akhirat adalah proses yang tidak bisa dinafikan. Orang Muslim sering mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ibadah, tapi harus segera ditegaskan bahwa ada hal lain, seperti soal pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang menurut saya, tidak ada kaitannya dengan ibadah, apalagi ibadah *mahdalah*, seperti salat atau zakat fitrah.

Umat Muslim Indonesia saat ini relatif sulit membedakan persoalan dunia dan agama. Mereka menganggap Islam itu *kâffah*. *Kâffah* itu artinya tidak boleh ada tindakan yang tidak ibadah. Memang semua tindakan bila diniatkan ibadah akan mendapat pahala. Karena itu tidak semuanya harus berdasarkan fikih atau syariah. Meski demikian, harus disadari bahwa segala sesuatunya bersifat dinamis. Yang lebih konkret seperti praktik mengentaskan kemiskinan, misalnya. Dari praktik itu kita berniat untuk membantu. Sebab, apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah. Namun juga harus disadari bahwa tidak semua perbuatan bisa diniatkan ibadah, niat korupsi itu tidak bisa berubah menjadi ibadah, karenanya, menurut saya, tetap harus dipilah-pilah.

Menurut saya, hingga saat ini umat Islam belum sampai merumuskan fikih-fikih yang lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pendidikan yang sangat mahal, dan sebagainya. Ke depan harus dilakukan upaya itu. Fikih-fikih yang ditulis abad ke-7 atau ke-9 harus direvisi, sebab persoalan yang tercakup di dalamnya banyak yang belum terjadi seperti saat ini. Atau sekurang-kurangnya belum sekompleks dan separah seperti sekarang.

---

Sekularisme adalah proses yang tidak mungkin ditolak. Pemisahan antara wilayah dunia dan akhirat adalah proses yang tidak bisa dinafikan. Orang Muslim sering mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ibadah, tapi harus segera ditegaskan bahwa ada hal lain, seperti soal pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang menurut saya, tidak ada kaitannya dengan ibadah.

---

*Bagaimana merumuskan fikih yang dapat diterima di wilayah publik secara adil?*

Menurut saya, persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan rumusan-rumusan fikih agar bisa dengan mudah diterima masyarakat, sehingga praksis-sosialnya jelas. Contohnya, gagasan tentang menghargai orang lain harus diwujudkan dalam rumusan dan bentuk seperti apa. Upaya ini akan lebih mudah dipahami dan diterima dibanding mendiseminasikan gagasan tentang perlunya teologi pluralisme. Masyarakat boleh jadi enggan dengan gagasan teologi tersebut, karena telinga mereka belum tahan mendengar istilah-istilah yang berasal dari Barat sebagaimana pluralisme.

Menurut saya, tidak ada yang secara spesifik membahas persoalan sosial, manakala merujuk pada agama tertentu. Misalnya, mengatakan orang miskin atau kelaparan dalam perspektif khusus Islam. Menciptakan rumusan perihal kelaparan secara Islam, kemiskinan secara Islam, atau orang yang tertindas secara Islam. Itu tidak ada. Oleh karena itu, sebenarnya bicara kemiskinan, kebodohan, kelaparan dan bentuk ketertindasan lainnya adalah ranah pluralisme, tetapi lebih konkret pluralisme sosial. Sebab, jika dikatakan pluralisme agama nanti umat Islam marah.

Umat Islam saat ini cenderung senang menggunakan *embel-embel* Islam, seperti pacaran islami, perumahan islami, ekonomi islami dan sebagainya. Memang kita juga tidak perlu menggunakan gagasan tauhid kemiskinan atau teologi kemiskinan. Gunakanlah istilah yang lebih konkret seperti ajaran untuk mengentaskan kemiskinan. Bisa saja menggunakan istilah teologi kemiskinan, tetapi hindari bahasa yang *debatable* karena umat kita banyak yang belum mempersiapkan diri tentang hal-hal yang dianggap baru.

Sehingga, praktik yang lazim adalah upaya bagaimana seorang kiai membahasakan agama ke wilayah publik. Praktik-praktik seperti ini banyak dilakukan kalangan agama konservatif. Agama dalam konteks ini dibahasakan ke publik secara formal, tidak dalam eksplorasi yang bisa lebih membumi dan diterima masyarakat. Dari proses ini saya melihat ada pemaksaan. Proses-proses mempublikasikan agama harus dengan perlahan dan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan, apalagi *sembrono*.

Jika saat ini muncul gerakan fundamentalis Islam, itu adalah gejala yang baru tampak sekitar awal 90-an. Dalam prosesnya saya melihat ada politik yang bermain di dalamnya. Memang sebelumnya pernah muncul tetapi lebih kental politiknya, seperti era 1980-an karena proses peminggiran politik. Tetapi tahun 1990-an gerakan fundamentalisme Islam merambah ke mana-mana, termasuk pemakaian simbol atau arabisme.

Pada titik ini saya sering mengatakan, saya tidak sepakat dengan tesis yang mengatakan bahwa umat Islam sangat marginal dan dimarginalkan oleh kekuasaan politik. Pertanyaannya, pada sisi mana marginalnya? Dari segi anggaran, saya kira tidak, karena anggaran di Departemen Agama untuk pengembangan orang Islam paling besar. Di kabinet, 90% anggotanya beragama Islam, di DPR anggotanya 75% Muslim. Seluruh pejabat-pejabat politik setelah tahun 90-an hampir orang Islam. Saya kira tesis yang mengatakan bahwa Islam termarginalkan setelah tahun 90-an adalah tidak berdasar. Pada masa Soeharto bisa

---

Fikih-fikih yang ditulis abad ke-7 atau ke-9 harus direvisi, sebab persoalan yang tercakup di dalamnya banyak yang belum terjadi seperti saat ini. Atau sekurang-kurangnya belum sekompleks dan separah seperti sekarang.

---

dikatakan bahwa Islam memang termarginalisasi, tapi itupun dilakukan oleh beberapa orang saja, kebetulan oleh kaum fundamentalis Kristiani.

Kebanyakan orang yang tidak tahu karakter umat Islam Indonesia mengatakan bahwa warga Indonesia ini harus memberlakukan prosentase. Artinya, kalau seperti itu Islam harus lebih banyak. “*Loh*, apa salahnya kalau orang Kristen memimpin Indonesia?” kata Theo Syafei dulu. Apa yang dikatakan orang tentang keharusan prosentase itu adalah bentuk ketidakpahaman terhadap karakter umat Islam Indonesia.

Mengapa itu terjadi? Menurut saya disebabkan: pertama, meksi banyak ulama dan intelektual Islam, tapi mereka merasa inferior alias *inlander*. Itulah yang menjadi soal. Dari situasi itu mereka kemudian ingin menegakkan negara Islam, ingin formalisasi syariah. Menurut saya, ini adalah bukti inferioritas Islam.

Menurut saya, keimanan tidak akan selesai dengan urusan formalitas, karena banyak orang yang salatnya rajin dan naik haji tetapi juga korupsi. Banyak di antara mereka yang menginginkan khilâfah tetapi, jika ditilik



secara historis, model itu sendiri eksis dengan melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi pada masa Turki Utsmani.

Kedua, secara ekonomi umat Islam dianggap mundur. Padahal bila Anda mengikuti survei *New York Times* yang meneliti 40 orang Indonesia terkaya, ternyata diketahui bahwa Aburizal Bakrie, sebagai pengusaha Muslim, termasuk orang paling kaya. Sebetulnya banyak pengusaha Muslim yang kaya, tapi kenapa, pada saat yang sama, banyak juga orang Muslim yang miskin?

Mengapa itu terjadi? Hal yang paling mendasar untuk menjelaskannya adalah perspektif teologi umat Islam yang terlalu fatalis. Saya pernah bertanya ke mahasiswa saya: apakah miskin, bodoh, dan pintar sebagai takdir atau bukan? Hampir sebagian besar menjawab takdir. Menyaksikan kenyataan seperti ini, bagaimana umat Islam sendiri melihat situasi masyarakat Muslim yang miskin dan bodoh lebih dikarenakan meng-kristalnya anggapan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan garis takdir. Maka, sudah saatnya pemahaman teologi umat Islam harus diubah.

Saya mengajar di UIN Yogyakarta dan mengamati karakter umum akibat dari pandangan teologi fatalis yang mendiami civitas akademiknya sehingga masih menganggap bahwa zaman ini sebagai zaman megalitikum, zaman batu. Karena itu ketika melihat Amerika mampu membuat pesawat dan maju dalam bidang teknologi, mereka mengatakan bahwa ini ancaman. Mereka juga latah dengan beranggapan bahwa kita miskin secara ekonomi karena dijajah oleh kapitalisme global.

Melihat realitas umat Islam seperti itu, bagaimana mereka bisa bersaing. Ketika menyaksikan negara lain maju, mereka enak saja mengatakan bahwa kita dimiskinkan Amerika. Mereka beranggapan bahwa yang terjadi saat ini tidak lebih dari konspirasi global Yahudi dan Amerika. Anggapan-anggapan ini terus dijejalkan oleh para khatib dan ulama kita di Indonesia.

Ada cerita yang menggelitik ketika terjadi gempa (di Yogyakarta). Saya tidak termasuk orang yang ikut mengungsi. *Alhamdulillah* rumah saya tidak roboh. Tetapi cara pandang masyarakat sekitar tentang hal sepele ini beragam. Ada yang beranggapan bahwa rumah saya adalah rumah antariman, sehingga Tuhan menjaganya. Ada juga yang beranggapan karena konstruksinya bagus, dan ada juga beranggapan bahwa itu adalah keajaiban dari Tuhan.

Cerita lainnya, saat salat Jumat pertama setelah gempa terjadi. Di mimbar sang khatib masjid di kampung saya berceramah dengan mengatakan bahwa gempa yang terjadi adalah akibat dari umat Muslim yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Mengerikan! Padahal mereka datang untuk salat Jumat dan itu untuk mengamalkan Islam. Setelah mengetahui itu semua, saya tertarik untuk ikut khutbah Jumat. Menurut saya, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Karena khutbah-khutbah mereka cukup mengerikan, yaitu menyalahkan masyarakat yang secara jelas sedang mengalami musibah. Ini bukan menenangkan, malah membuat kerumitan bagi masyarakat.

Saya mengganggu mereka (kelompok radikal) memandang fikih sama dengan hukum. Anggapannya terbatas bahwa syariah itu memakai jilbab bagi Muslimah, potong tangan bagi pencuri, dan dirajam bagi pezina.

Padahal syariah itu sendiri bermakna jalan. Sedangkan jalan itu tidak tunggal. Ketika Anda hendak pergi ke Yogyakarta, Anda bisa menujunya melalui tiga jalan. Jalan-jalan inilah yang kira-kira bisa disebut syariah. Anda bisa jalan dengan cepat menggunakan sepeda motor, jalan kaki, atau pakai sepeda kayuh. Itu syariah, yaitu jalan untuk menuju ke sana, ke Allah.

Celakanya, kelompok-kelompok radikal itu beranggapan bahwa yang benar hanyalah jalan tertentu yang mereka yakini. Yang lainnya tidak benar, sesat. Mereka yang tidak mau mengikuti jalan tersebut dianggap sebagai penghuni neraka, termasuk 50 orang tokoh liberal yang terdaftar pada salah sebuah media yang mewakili pandangan Islam yang fundamentalis, revivalis dan konservatif.

Jadi, orang fundamentalis tidak mau menerjemahkan syariat Islam dengan berbagai cara. Orang lain harus mengikuti jalan atau cara dia.

*Dari penjelasan Anda, dapat disimpulkan bahwa sekularisme sebetulnya tidak akan meminggirkan agama?*

---

Umat Islam sendiri melihat situasi masyarakat Muslim yang miskin dan bodoh lebih dikarenakan mengkristalnya anggapan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan garis takdir. Maka, sudah saatnya pemahaman teologi umat Islam harus diubah.

---

Jelas, tidak ada peminggiran agama. Karena bagaimanapun perubahan sosial tidak akan bisa dibendung. Nabi sudah menganjurkan ketika mengajak orang desa jangan menggunakan bahasa kota, atau bahasa Arab yang tidak dimengerti. Karena itu, boleh jadi apa yang dipahami oleh masyarakat desa atau kalangan fundamentalis adalah satu hal yang paling otentik, tetapi apa artinya itu semua bila mereka sendiri tidak mengerti maknanya. Apa yang mereka bahasakan belum tentu dimengerti sepenuhnya oleh mereka sendiri.

Menurut saya, sekularisme tidak akan membuat seseorang menjadi kurang beriman atau menjadi kafir. Sebaliknya, sekularisme akan memperkuat keimanan seseorang. Dalam al-Quran dijelaskan, kalau Anda ingin menaklukkan dunia maka kuasailah ilmu pengetahuan. Buatlah pesawat yang bisa naik ke angkasa.

*Sekularisme mengandaikan bahwa ilmu pengetahuan harus bebas nilai, termasuk dari nilai agama. Namun ada sebagian kelompok yang mendesakkan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan. Meski demikian, disadari bahwa islamisasi ilmu pengetahuan dari segi praktiknya masih sangat normatif. Tanggapan Anda?*

Saya tidak harus sekolah jauh-jauh untuk memercayai bahwa semua ilmu dari Allah. Akan tetapi, Allah tidak pernah mengajarkan secara detail tentang sesuatu. Bila ingin membuat motor, misalnya, harus dibuat bannya terlebih dulu, kemudian rantainya, dan lain sebagainya.

Sampai pada titik tertentu saya percaya bahwa ilmu dari Allah, tapi dalam al-Quran tidak pernah dijelaskan secara mendetil, seperti bagaimana praktik menanam jagung, pisang. Karena itu perlu diterjemahkan atau ditafsirkan. Untuk itu kita perlu ilmu pengetahuan ketika hendak “menguasai” dunia. Ironisnya, itu dilakukan oleh orang Amerika atau Rusia yang dianggap komunis dan tidak beragama, alias sekular.

*Bagaimana tanggapan Anda tentang keinginan integrasi ilmu dengan agama?*

Saya sepakat bahwa di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Namun saya tidak yakin kalau ada ilmu yang islami dan tidak islami. Bila mengatakan bahwa ilmu sumbernya dari Allah maka

tidak harus orang Islam yang menerjemahkan. Terbukti yang mampu menerjemahkan bukan orang Islam, tapi orang di luar Islam.

Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana memahami Islam sebagai sumber ilmu, bukan islamisasi pengetahuan atau pengetahuan yang diislamkan. Jadi, intinya bukan bagaimana, misalnya, membuat gelar yang islami, dan lain sebagainya.

Debat islamisasi pengetahuan telah berlangsung lama. Kita kenal Ismail al-Faruqi, al-Attas dan kawan-kawannya. Jadi menurut saya, tidak terlalu penting islamisasi pengetahuan, yang penting adalah bagaimana Islam itu diilmukan.

Saya setuju bila menjadikan ilmu pengetahuan memiliki spirit kemanusiaan. Ilmu memerlukan etika dan sentuhan nilai. Tentu saja nilai itu bisa berasal

dari mana saja, tidak terkecuali Kristen atau yang bukan dari agama. Bagaimanapun, Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh manusia.

Lagi-lagi, perlu ditegaskan bahwa yang penting adalah Islam dipahami sebagai sebuah ilmu dengan memberikan sentuhan nilai dalam ilmu pengetahuan.

*Belakangan muncul penilaian bahwa agama telah membajak moralitas. Tanggapan Anda?*

Orang sering beranggapan jangan menggunakan istilah moral karena ia berasal dari Yunani, tapi gunakanlah kata akhlak. Menurut saya, yang terpenting adalah substansi dari akhlak itu sendiri. Karena itu, ketika menerapkan keadilan, seyogyanya tidak menganggap sesuatu di luar dirinya sebagai sesuatu yang berbeda, sehingga jangan berbuat tidak adil hanya karena alasan beda agama, misalnya.

Jangan dibalik logikanya, ketika seorang Muslim melakukan korupsi kemudian ditutupi, dengan alasan ada dalilnya, yaitu: membuka aib

---

Adanya fatwa yang kemudian memicu anarki massa atas mereka yang mengaku nabi dan yang mempunyai keyakinan berbeda dari *mainstream* disebabkan, terutama, masyarakat kita tengah mengalami alienasi. Mereka sedang kebingungan dan, celakanya lagi, negara dinilai lambat menghadapi berbagai persoalan sosial, kemiskinan, korupsi dan sebagainya.

---

saudaramu sama juga membuka aib sendiri. Sikap itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Hanya karena sesama Muslim jadi harus ditutupi aibnya.

Contoh yang lain, dalam al-Quran tidak pernah ada kalimat secara *leterlijk* yang menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada orang miskin Muslim saja.

Ketika agama menjadi sebuah institusi atau kita membuat sebuah institusi yang mengurus agama, ia akan menjadi rezim. Ia akan dipenuhi oleh intrik politik dan ekonomi.

Ketika meneliti Depag, ternyata ditemukan bahwa anggaran terbesar itu dialokasikan untuk agama Islam. Di Manado sekalipun yang mayoritas penduduknya Kristen, alokasi anggaran di Depagnya lebih banyak untuk Islam, dan bahkan KUA-nya beragama Islam, bagaimana ini bisa terjadi? Hal yang sama juga terjadi di Bali. Apakah ini adil? Anggapan yang muncul kenapa agama-agama lain tidak diberi dana banyak karena khawatir mereka membuat gereja dan tempat ibadah lainnya. Dari contoh ini Depag RI telah menjadi Depag Islam.

Jadi, telah terjadi pembajakan ketika agama menjadi institusi, dan secara otomatis kepentingan politik banyak bermain di dalamnya.

*Bagaimana tanggapan Anda terhadap liberalisme pemikiran dalam beragama?*

Bagi saya boleh saja liberalisme pemikiran dalam beragama. Meskipun tidak akan dimungkirkan bahwa orang pada titik tertentu pada akhirnya akan menyerah. Misalnya, ketika ada seseorang yang berniat memikirkan tentang Allah, tapi ternyata tidak mampu, kemudian ia mengatakan, “Saya cukup membayangkan bahwa Tuhan sedang melakukan ini atau itu.” Menurut saya, dengan berimajinasi seperti itu tidak merugikan sama sekali.

Saya termasuk orang yang konservatif. Saya mengimajinasikan Allah sedang ini dan itu. Dan terkadang juga saya berpikiran tentang keberadaan Tuhan. Saat masih kuliah saya pernah bertanya, “mungkinkah Allah membuat batu yang karena besarnya hingga Allah sendiri tidak kuat mengangkatnya?” Bagi saya mungkin, karena Dia kuasa. Dengan mengatakan itu, saya dinilai melawan kuasa Allah. Saya katakan tidak, karena Allah tetap berkuasa.

Saya seorang fundamentalis ketika berkeinginan anak saya harus bisa mengaji, saya sekolahkan dia ke TK yang ada belajar *ngaji*-nya. Belajar

*ngaji* adalah perintah Allah, sekalipun ada orang yang tidak mengerjakan, tidak menjadi persoalan.

*Bagaimana pandangan Anda terhadap sebagian kalangan yang menafsirkan konsep liberal dalam arti yang negatif?*

Harus diakui bahwa banyak masyarakat yang menafsirkan kata liberal dalam arti negatif, seperti *free sex*. Namun demikian, Prof. Amin Abdullah, Buya Syafii Maarif dan banyak tokoh Muslim lainnya yang dianggap liberal, tapi apakah Anda berani mengatakan bahwa mereka melakukan *free sex*? Tentu saja tidak. Jadi, jangan salah memahami. Saya mengenal baik Buya Syafii Maarif, boleh jadi salatnya sangat bagus bila dibanding mereka yang menuduh beliau liberal.

Jadi masyarakat kita masih memahami konsep liberal dalam nada yang negatif dan pejoratif; dalam arti permisif, *free sex*, dan lain sebagainya.

---

Keimanan tidak akan selesai dengan urusan formalitas, karena banyak orang yang salatnya rajin dan naik haji tetapi juga korupsi. Banyak di antara mereka yang menginginkan khilafah tetapi, jika ditilik secara historis, model itu sendiri eksis dengan melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi pada masa Turki Utsmani.

---

*Kekhawatiran sebagian pihak ihwal kebebasan berpikir adalah munculnya sifat atau tabiat asusila dalam masyarakat. Untuk itu, mereka berupaya merebut institusi publik (negara) untuk menjaganya melalui formalisasi ajaran agama. Tanggapan Anda?*

Ketika telah terjadi formalisasi, institusionalisasi, atau dalam bentuknya yang lain, yaitu terjadinya rezimisasi agama, maka tidak mungkin tercipta kebebasan. Dalam sejarah sudah banyak buktinya. Ketika agama menjadi sebuah rezim tertentu, Katolikisme Roma, misalnya, maka demikian mendominasi keyakinan pada saat itu. Diketahui telah terjadi perseteruan antara Galileo Galilei dengan Dewan Gereja tentang anggapan bahwa yang berputar adalah bumi mengitari matahari, tapi Gereja Katolik saat itu beranggapan bahwa bumi yang dikitari oleh matahari.

Dengan kasus itu kemudian Dewan Gereja menganggap bahwa setan telah menjelma pada manusia, yaitu pada diri Galileo, karenanya harus dihukum mati. Di sanalah terjadi inkuisisi hanya karena Galileo berbeda pandangan dengan kaum gereja dan penguasa saat itu.

Di Indonesia, pada saat Soeharto memimpin sangat kentara ketika banyak menyaksikan kiai-kiai pesantren mendukung program KB. Mereka mengeluarkan dalil untuk menguatkan dukungan terhadap program itu. Dengan dalil, misalnya: “Hendaklah kamu takut meninggalkan keturunan di belakangmu secara ekonomi”, jadi cukup dua anak saja. Agama pada saat itu menjadi keyakinan rezim dan para ulama yang menjadi wakil dan abadinya.

Soal lainnya seperti menyangkut program transmigrasi. Para ulama juga mendukung dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut terdapat dalil yang menguatkannya, yaitu dengan merujuk pada konsep hijrah. “Jika kamu hijrah, selain kamu akan mendapatkan pahala di daerah yang menjadi tujuan, juga akan mendapatkan tanah seluas 2,5 hektare”. Itu disampaikan oleh kiai-kiai kampung.

Lainnya, menyangkut pembangunan bendungan, para kiai itu menggunakan dalil, “Tidak akan ada perubahan suatu kaum, bila tidak kaumnya sendiri yang melakukan perubahan”. Karenanya, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, perlu dibangun bendungan, dengan ini, *insyâ’ Allâh*, perubahan akan muncul. Demikian para kiai memberi penjelasan.

*Dengan berbagai kebijakan negara dan produk-produk aturannya yang restriktif dan berpihak kepada keyakinan agama kelompok mainstream, tentu situasi ini meminggirkan kelompok minoritas. Tanggapan Anda?*

Yang menjadi persoalan kita adalah seringkali mengukur keimanan atau akidah orang atau kelompok agama lain dengan tolok ukur keimanan kita. Orang Islam sering menganggap bahwa orang Kristen telah syirik karena mereka percaya kepada tri tunggal, bukan keesaan Tuhan. Itu merupakan bentuk cara pandang sepihak dengan semata mendasarkan pada keimanan Islam. Padahal mereka yang beragama Kristen yakin betul dengan kebenaran yang dianutnya.

*Bagaimana dengan atmosfer politik dalam pemerintah ihwal posisi keagamaan bangsa ini?*

Ini merupakan bukti kegagalan negara dalam mengelola pluralisme. Adanya fatwa yang kemudian memicu anarki massa atas mereka yang mengaku nabi dan yang mempunyai keyakinan berbeda dari *mainstream* disebabkan, terutama, masyarakat kita tengah mengalami alienasi. Mereka sedang kebingungan dan, celakanya lagi, negara dinilai lambat menghadapi berbagai persoalan sosial, kemiskinan, korupsi dan sebagainya.

Dalam konteks ini, ketika otoritas negara dan keagamaan hilang, maka yang terjadi adalah munculnya sikap otoriter dari para agamawan. Ingat, hal ini sangat berbahaya.

Secara jelas, apa yang terjadi saat ini membuktikan kegagalan sebuah negara dan sekaligus juga kegagalan dakwah Islam. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan sosial hanya dengan dakwah yang sifatnya memprovokasi orang lain? Padahal mereka (masyarakat) butuh makan dan keamanan.

---

Hingga saat ini umat Islam belum sampai merumuskan fikih-fikih yang lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pendidikan yang sangat mahal, dan sebagainya.

---

*Jika situasinya seperti itu, bagaimana hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa diekspresikan secara bebas di ruang publik?*

Kondisi itulah (hak dan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik) yang tidak ada. Orang yang hendak mengekspresikan keyakinannya yang berbeda dari *mainstream* tidak jarang mendapatkan kesulitan. Di daerah sini ada kelompok yang menamakan dirinya *solat we oleh, ora salat we oleh* (salat saja boleh, tidak salat juga boleh). Jadi salat Jumat ramai sekali, tapi salat Zuhur tidak sama sekali. Kelompok ini kecil jumlahnya. Tapi ada kelompok *mainstream* yang berusaha menguasai kelompok ini dan berusaha memaksa untuk mengikuti keyakinan *mainstream*.

Ada riwayat pada masa Nabi, ketika Nabi ditanya, “*Mâ huwa al-Islâm?*” (Apa itu Islam?). Nabi menjawab, “Jujur”. Ketika seorang sahabat yang sering melakukan dosa ditanya oleh Nabi: “Apakah Anda sudah salat?” Dia jawab, “Sudah, tapi baru salat Maghrib”. Di hari berikutnya ditanya



lagi, ia tidak berbohong, jawabnya, sekarang sudah mampu melaksanakan dua waktu.

Menurut saya, harus ada empati dan simpati kita kepada mereka yang melakukan ibadah dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda. Bagaimanapun tidak bisa dimungkiri bahwa pemahaman agama setiap orang bermacam-macam. Pertanyaannya, mengapa orang yang salat tetap juga diganjar neraka (*fawaylun li al-mushallin*)? Yang mana yang disiksa adalah mereka yang salatnya masih sering tertinggal. Bukan mereka yang keyakinannya berbeda.

*Bagaimanapun hak dan kebebasan beragama serta berpikir adalah hak yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya, upaya pemerintah atau siapapun untuk membatasinya tidak mungkin. Tanggapan Anda?*

Kebebasan adalah hak paling dasar dari manusia. Di antara kita pandangan ini tidak masalah, tapi ketika ini diungkapkan ke kaum fundamentalis, mereka akan menganggap bahwa itu adalah buatan Amerika, budaya Barat.

Lagi-lagi, jangan terburu-buru mencampuri urusan agama dan keyakinan yang lain, berbeda dengan kita. Baik kita maupun mereka berusaha untuk menuju yang terbaik. Apa yang kita lakukan belum tentu baik, dan belum final, karenanya masih mungkin berubah. Jelas dinyatakan dalam al-Quran, sekalipun orang yang taat beribadah, masih tetap bisa masuk neraka.

Demikianpun negara, dalam hal ini, tidak perlu mengurus orang salat atau ibadah. Bila negara turut campur, yang muncul kemudian adalah politisasi agama.

Saya pernah menulis tentang perbedaan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Para kanwil di daerah sini menyatakan bahwa Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan hari Jumat, harus hari Sabtu. Menurut saya, ini tidak benar, apalagi ini soal keyakinan yang seharusnya diserahkan ke masyarakat.

Menurut saya UU atau regulasi yang restriktif harus dihapuskan. Tidak perlu ada UU salat atau pakai jilbab. Saya pernah bertanya ke mahasiswa, "Apa motivasi Anda menggunakan jilbab?" Hampir 90% menyatakan karena alasan lain, seperti mengikuti aturan kampus, mengikuti *trend*,

dan membuat penampilan lebih cantik. Itu tandanya bukan faktor dari diri pribadi. Anggapan saya, bila ada perda yang mewajibkan jilbab, maka masyarakat yang menggunakan jilbab lebih memilih pakai jilbab agar tidak didenda oleh pemerintah daerah.

*Bagaimana Anda menilai tuduhan kelompok fundamentalis bahwa dialog-dialog keagamaan akan berujung pada pelemahan iman? Dan juga tuduhan bahwa pluralisme akan menggiring pada relativisme dan sinkretisme?*

Kaum fundamentalis tidak mau menggunakan pluralisme, tapi memakai terma pluralitas, atau mengganti istilahnya dengan heterogen. Dengan adanya pluralitas dan dialog antaragama justru, menurut saya, akan memperkuat keimanan saya.

Dalam al-Quran jelas sekali bahwa bila saja Allah menghendaki menjadikan semuanya Muslim, maka jadilah, tapi buktinya Allah tidak melakukannya. Saya membaca al-Quran bahwa: Aku ciptakan 12 kelompok di dalam masyarakat, dan masing-masing mendapatkan sumber rizki, sumber mata air. Saya beranggapan

jangan-jangan hak asasi beragama yang ada 12 itu mengambil dari situ. Demikianlah 12 kelompok umat di masyarakat, yang mendapatkan sumber mata air dan sumber kehidupannya masing-masing.

Jadi kebebasan beragama adalah sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Dan masing-masing berusaha menuju yang mutlak dan absolut, yaitu Allah. Hanya saja, kebanyakan kaum Islam menganggap bahwa yang paling benar adalah Islam, di luar Islam sesat. Bahkan kaum fundamentalis banyak mengklaim bahwa yang benar itu Islam versi mereka. Padahal, yang paling benar hanyalah Allah.

Saya tidak menganggap pluralisme agama akan membuat iman seseorang berkurang, tapi sebaliknya, justru akan bertambah kuat. Karena

---

Ketika telah terjadi formalisasi, institusionalisasi, atau dalam bentuknya yang lain, yaitu terjadinya rezimisasi agama, maka tidak mungkin tercipta kebebasan. Dalam sejarah sudah banyak buktinya. Ketika agama menjadi sebuah rezim tertentu, Katolikisme Roma, misalnya, maka demikian mendominasi keyakinan pada saat itu.

---

dengan begitu kita sadar bahwa Allah menciptakan tidak hanya orang Muslim tapi juga yang lain.

Saya tidak menganggap bahwa pluralisme adalah paham yang menyatakan seluruh agama sama. Sangat jelas bahwa agama itu berbeda satu dengan yang lain. Namun agama, sebagaimana yang dipahami manusia, jelas sebagai sesuatu yang relatif dan tidak sama antara pemahaman satu orang dengan orang yang lainnya.

Pluralisme tidak sama dengan relativisme dan sinkretisme, juga tidak menyamaratakan semua agama. Menurut saya, Kristen yang benar adalah mereka yang percaya betul pada konsep ketuhanan Trinitas.

*Sejauhmana batas toleransi dipraktikkan dalam hubungan antarumat beragama? Apakah sebatas memberi penghormatan atau turut melakukan pemihakan?*

Menurut saya, toleransi harus sampai pada sikap pemihakan. Coba lihat Usman Roy, Ahmadiyah, atau Lia Aminudin. Menurut saya, orang seperti Mushadeq agak sedikit melakukan kesalahan ketika mengaku nabi secara sosiologis. Karena dalam sejarahnya tidak ada nabi yang sedari awal menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad, misalnya, dalam proses yang lama dan itupun pertama-tama dinyatakannya kepada istrinya bahwa beliau adalah nabi. Sementara Mushadeq dan Lia dari awal sudah mengemukakan diri sebagai nabi. Menurut saya, itu adalah kesalahan sosiologis.

Dalam sejarahnya, nabi-nabi tidak mengaku pada awal dakwahnya, baru setelah mereka punya jemaah kemudian mereka mengaku. Dan bahkan menurut sebagian riwayat mereka disebut nabi oleh para jemaahnya.

Menurut saya, mereka yang percaya bahwa Nabi Muhammad bukan sebagai nabi terakhir, dalam maknanya yang konvensional, mereka adalah “Islam anonim”. Memang soal apakah Muhammad adalah nabi terakhir atau tidak adalah masalah multiinterpretasi. Tetapi, bahwa Muhammad adalah nabi umat Muslim adalah hal yang tidak boleh hilang dalam sahadat umat Islam.

Sebagai warga negara, mereka (Lia Aminuddin, Al-Qiyadah Al-Islamiah, Usman Roy, dan Ahmadiyah) mempunyai hak untuk berkeya-

kinan bahwa ada nabi lagi setelah Muhammad, tapi mereka salah ketika mengungkapkannya. Salah secara sosiologis.

Syahrur, seorang intelektual Islam, menganggap bahwa hal paling fundamental dalam Islam adalah percaya pada Allah, nabi, dan berbuat baik. Salat adalah perbuatan baik, puasa adalah perbuatan baik, dan lain sebagainya. Tapi jangan tidak percaya kepada Allah dan Muhammad.

Apa yang diyakini Mushadeq, karena dia percaya betul dengan kayakinannya maka ia akan selamat. Karena mereka yakin. Ini sama halnya ketika kita yakin melaksanakan salat Idul Fitri pada hari Jumat, maka lakukanlah. Jangan ragu. Siapapun kalau meyakini bahwa salat hendaknya seperti ini-itu, lakukan saja. Tapi jangan kemudian mereka dipukuli lantaran berbeda dari *mainstream*. Soal apakah mereka salah itu perkara lain. Sekalipun itu salah secara sosiologis.

Wawancara dilakukan pada 21 Maret 2008



# I n d e k s

## A

- Aa Gym, 1: 69, 404, 421, 835; 2: 940, 944, 945, 967
- Abad Pencerahan, 2: 1012, 1318
- Abad Pertengahan, 1: 13, 15, 88, 143, 203, 290, 330, 368, 370, 406, 460, 490, 616, 658, 688, 769; 2: 927, 1182, 1228, 1230, 1317, 1319, 1466, 1471, 1484, 1532, 1536, 1717, 1723, 1724, 1728, 1737
- Abbasiyah, 1: 196, 197, 247, 439, 445, 607, 694, 841; 2: 1182, 1238, 1560, 1693, 1695, 1696, 1705
- Abdul Halim Mahmud, 2: 1700
- Abdul Kahar Mudzakkir, 2: 1040
- Abdul Karim Amrullah, 2: 1002
- Abdul Karim Soroush, 1: 879; 2: 1554
- Abdul Malik bin Marwan, 1: 432; 2: 1396
- Abdul Rauf Singkel, 2: 1536, 1537
- Abdul Shamad al-Palimbani, 2: 1536
- Abdulhamid Mutwalli, 2: 1272, 1285, 1288
- Abdulkarim Soroush, 2: 934
- Abdullah Ahmad, 2: 1002
- Abdullah ibn Zubair, 1: 432
- Abdullah Puteh, 1: 78
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1: 461, 462, 465, 556, 870; 2: 950, 972, 1320
- Abdurrahman ibn 'Auf, 2: 1411
- Abdurrahman ibn Muljam, 2: 1410
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 1: 76, 98, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 158, 212, 257, 280, 281, 437, 614, 747, 857; 2: 933, 1076, 1081, 1091, 1108, 1113, 1170, 1173, 1246, 1310, 1323, 1369, 1599, 1601, 1754
- Abidah Maksum, 2: 973
- Abied al-Jabiri, 2: 1728, 1729, 1731
- Aborigin, 1: 167, 833, 834; 2: 1672
- aborsi, 1: 178, 636, 745; 2: 1150, 1151, 1153, 1176, 1456
- Abou el-Fadl, 1: 36, 41, 183, 186, 451; 2: 957
- ABRI, 1: 198, 614
- absolutely relative*, 2: 911, 918
- absolutisme, 1: 89, 90, 368, 373, 377, 387, 599, 821; 2: 911, 918, 1084, 1318, 1466, 1475, 1476, 1564, 1647
- Abu al-Wafa, 1: 676, 677
- Abu Bakr, 1: 195, 552, 693; 2: 1338, 1411
- Abu Hanifah, 1: 305, 677, 708, 709
- Abu Hurairah, 1: 701
- Abu Lahab, 2: 1109
- Abu Nawas, 1: 607
- Abu Sufyan, 2: 1402, 1410
- Abu Yusuf, 1: 13, 708
- Abul Kalam Azad, 2: 1693
- Aburizal Bakrie, 2: 1758
- abuse of power*, 2: 1511, 1512
- accountable politics*, 1: 753
- Aceh, 1: 22, 37, 78, 81, 100, 101, 201, 228, 242, 244, 248, 279, 410, 419,

## Membela Kebebasan Beragama

- 435, 436, 437, 571, 627, 638, 697, 699, 805, 806, 838, 839, 847; 2: 947, 964, 970, 971, 993, 994, 999, 1044, 1054, 1090, 1134, 1165, 1261, 1262, 1283, 1285, 1286, 1304, 1323, 1434, 1448, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459, 1461, 1536, 1538, 1539, 1555, 1556, 1557, 1573, 1656, 1670
- Adabiyah (madrasah), 2: 1002
- Adam Malik, 2: 899, 900
- Adnan Buyung Nasution, 2: 1310
- adult tv*, 1: 725
- Affandi, 1: 70
- affirmative action*, 1: 247, 252, 363, 364, 622; 2: 969, 978, 979, 1080, 1089, 1140, 1141, 1202, 1203, 1345, 1353, 1354, 1384, 1385, 1505, 1597, 1598, 1618, 1654
- Afghani, al-, 1: 431
- Afghanistan, 1: 97, 164, 230, 246, 296, 298, 414, 426, 432, 605, 609, 881; 2: 890, 1448, 1516
- afinitas, 1: 203, 208; 2: 1663, 1675, 1676, 1688
- Afrika, 1: 518, 587, 882; 2: 897, 959, 960, 969, 986, 1044, 1061, 1062, 1442, 1447, 1743
- “agama sekular”, 1: 326
- Agus Salim, 2: 1019, 1414
- Agustinus, 1: 280, 282
- ahimsa, 2: 1029
- abl al-bayt*, 1: 16
- abl al-hadîts*, 1: 550, 564
- abl al-hall wa al-'aqd*, 1: 110, 118, 429, 430
- abl al-kitâb*, 1: 114, 115, 126, 680, 681; 2: 983, 984, 1407, 1408, 1712, 1713
- Abl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, 1: 794; 2: 1394, 1395
- Ahmad Dahlan (Kiai), 1: 112
- Ahmad ibn Hanbal, 1: 305; 2: 1182, 1543, 1571, 1704
- Ahmad Khan, 1: 306; 2: 1001, 1580
- Ahmad Mushadeq, 2: 1281
- Ahmad Sahal Mahfudz, 1: 81
- Ahmad Suaedy, 1: 281
- Ahmad Sumargono, 1: 137
- Ahmad Syafii Maarif, 1: 720; 2: 924, 1082, 1763
- Ahmad Wahib, 1: 420; 2: 1050
- Ahmadinejad, 1: 486, 488; 2: 1019
- Ahmadiyah, 1: 24, 25, 36, 65, 76, 85, 87, 88, 89, 96, 100, 131, 152, 153, 158, 159, 179, 181, 182, 195, 198, 204, 205, 230, 232, 233, 317, 336, 339, 343, 344, 347, 364, 414, 417, 419, 438, 441, 452, 454, 467, 471, 566, 606, 616, 617, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 648, 706, 721, 750, 793, 800, 806, 807, 837, 851, 853, 862, 863, 866, 867, 868, 869; 2: 1003, 1006, 1013, 1039, 1081, 1087, 1102, 1106, 1113, 1115, 1119, 1146, 1159, 1280, 1282, 1308, 1312, 1327, 1369, 1372, 1385, 1407, 1433, 1438, 1456, 1469, 1495, 1502, 1504, 1541, 1543, 1560, 1561, 1572, 1598, 1600, 1605, 1618, 1628, 1708, 1709, 1710, 1744, 1749, 1768
- ahwâl al-syakhsîyah, al-*, 2: 1444
- Aisyah, 1: 248, 440, 441, 442, 551, 701; 2: 1748
- Ajinomoto, 1: 148
- AKKBB, 1: 878
- Akta Filipus, 1: 769
- akuntabilitas, 1: 145; 2: 1217
- Al Gore, 1: 627
- Alamsyah Prawiranegara, 2: 1073
- Ali Abd al-Raziq, 1: 13, 15, 21, 430; 2: 1271
- Ali ibn Abi Thalib (Imam Ali), 1: 14, 195, 552, 693, 705; 2: 1098, 1113, 1279, 1338, 1410, 1671, 1673, 1740, 1749

- Ali Imron, 1: 59  
 Ali Jinnah, 1: 624; 2: 1693  
 Ali Khamenei, 1: 828, 829  
 Ali Syariati, 1: 67, 68; 2: 1252  
 Aljazair, 1: 296, 433, 533, 534, 621, 882;  
 2: 1061, 1395, 1450, 1693, 1695  
 Alkitab, 1: 270, 330, 337, 338, 766, 767,  
 812, 862; 2: 1157, 1161, 1162, 1163,  
 1514  
 Allen, Judith, 2: 1642  
 Alois A. Nugroho, 1: 265  
 Althaus, 2: 1154  
 altruisme, 2: 1084  
 Alwy Shihab, 2: 1246  
*amar ma'rûf*, 1: 241, 866; 2: 892, 965,  
 977, 1067, 1403, 1478  
 Ambon, 1: 201; 2: 1044, 1203  
 Amerika Latin, 1: 82, 271, 276, 518, 761;  
 2: 1028, 1153, 1154, 1158, 1252,  
 1459, 1666, 1743  
 Amerika, 1: 9, 10, 24, 34, 41, 54, 57, 63,  
 82, 96, 97, 99, 125, 137, 178, 180,  
 192, 193, 216, 230, 232, 242, 243,  
 246, 263, 264, 265, 271, 272, 276,  
 279, 291, 320, 374, 377, 379, 405,  
 408, 409, 413, 414, 418, 421, 426,  
 427, 432, 433, 446, 478, 480, 481,  
 484, 485, 486, 489, 495, 502, 505,  
 515, 518, 570, 593, 598, 607, 612,  
 624, 627, 634, 636, 641, 717, 719,  
 720, 735, 737, 739, 742, 745, 758,  
 761, 762, 833, 837, 842, 847, 848,  
 874, 876, 883; 2: 888, 891, 896, 908,  
 950, 952, 953, 959, 962, 975, 980,  
 981, 982, 983, 990, 995, 997, 1000,  
 1006, 1009, 1014, 1015, 1019,  
 1026, 1028, 1036, 1044, 1048,  
 1058, 1061, 1066, 1074, 1150,  
 1153, 1154, 1158, 1172, 1189,  
 1194, 1252, 1262, 1270, 1271,  
 1298, 1302, 1308, 1309, 1316,  
 1318, 1348, 1420, 1426, 1446,  
 1450, 1456, 1459, 1460, 1466,  
 1470, 1485, 1486, 1505, 1515,  
 1524, 1534, 1621, 1624, 1665,  
 1666, 1677, 1702, 1737, 1743,  
 1745, 1758, 1760, 1766  
 Amien Rais, 1: 70, 535, 581; 2: 1550  
 Amin Abdullah, 1: 34, 507; 2: 1763  
 Amina Wadud, 2: 971  
 Amir Ali, 1: 611  
 Amrozi, 1: 58, 59, 115, 414; 2: 1422  
 Armstrong, Karen, 1: 426, 442; 2: 1160,  
 1706  
 Ananda Marga, 1: 601  
 Andalusia, 1: 85, 92  
 Anderson, Benedict, 1: 749  
*Anglican Church*, 2: 1665  
 Anglikan, 1: 142, 194, 216, 290; 2: 991,  
 1685, 1692  
 animisme, 1: 592, 802  
 antidote, 2: 1509, 1525, 1528  
 antikorupsi, 1: 145  
 antroposentris, 2: 1601, 1727, 1742,  
 1743  
 ANTV, 1: 724, 725  
 Anwar Sadat, 2: 1718  
*apartheid*, 1: 382  
 APBN, 1: 87, 147  
 Appenzell, 1: 506, 508  
*'aql al-'ilmî, al-*, 2: 1023, 1042  
*'aql al-falsafî, al-*, 2: 1023, 1042  
*'aql al-lâhûtî, al-*, 2: 1023, 1042  
*'aql al-târîkhî, al-*, 2: 1023, 1042  
 Arab (budaya), 1: 101, 349, 350, 351,  
 592, 845; 2: 1694  
 Arab Saudi, 1: 62, 63, 70, 143, 164, 240,  
 296, 306, 446, 488, 612, 636, 649,  
 748, 834, 856; 2: 890, 1007, 1044,  
 1236, 1277, 1305, 1306, 1443,  
 1446, 1447, 1560, 1717, 1737  
 Arabisasi, 1: 313, 592; 2: 1277  
 Arifin Ilham, 1: 58, 69, 737, 738  
 Aristoteles, 1: 688; 2: 1397, 1411



## Membela Kebebasan Beragama

- Aristotelian, 2: 1170  
Arkoun, 2: 1234, 1706, 1718  
Arswendo Atmowiloto, 2: 1370  
Arsyad al-Banjari (Syekh), 2: 1536  
arus radikalisasi, 1: 157  
As'ad Syamsul Arifin (Kiai), 2: 1371  
*asbâb al-nuzûl*, 2: 966, 1137, 1579, 1580, 1712  
*asbâb al-wurûd*, 2: 1137  
Asghar Ali Engineer, 1: 439; 2: 1071, 1072  
*ashhâb al-kahf*, 2: 1234, 1247  
Asia, 1: 9, 247, 381, 490, 518, 623, 726, 799; 2: 952, 959, 960, 1044, 1061, 1062, 1442, 1447, 1451, 1459, 1536, 1650, 1688  
Asy'ari, al-, 2: 1395, 1709  
Asy'ariyah, 1: 564, 565, 696, 868; 2: 1554, 1709, 1732  
ateisme, 1: 172, 368, 517, 528, 529, 544, 600, 601, 757, 758, 880; 2: 990, 1467, 1550, 1702  
Atho' Mudhar, 2: 1311  
Attaturk, Kemal, 132, 194, 196, 197, 630; 2: 1467, 1693  
*aufklarung*, 2: 1024  
Australia, 1: 167, 405, 408, 421, 440, 833, 834, 842, 883; 2: 1000, 1318, 1642  
Austria, 1: 495, 509, 611, 882; 2: 1308  
*axiologi*, 2: 1336  
Azhar, al-, 1: 431; 2: 1001  
Azyumardi Azra, 1: 46, 764
- B**
- Babad Diponegoro, 1: 411  
Baghdad, 1: 492, 493, 607, 608, 693; 2: 1570  
Baghdadi, al-, 2: 1709  
Bahrain, 1: 296  
Bali, 1: 64, 314, 507, 537, 638, 720, 847; 2: 933, 1276, 1422, 1708, 1762  
Bandung, 1: 284, 602; 2: 974, 1222  
Bangladesh, 1: 70, 296, 299, 533, 585, 851; 2: 909, 941, 1160  
Bani Aus, 2: 1126  
Bani Nadzir, 2: 1392  
Bani Qainuqa, 2: 1392  
Bani Quraizhah, 2: 1392  
Bani Umayyah, 1: 553; 2: 1396, 1398, 1570  
Banjarasin, 1: 130; 2: 1132, 1413  
Bank Islam, 1: 160, 842  
Bank Muamalat, 1: 160, 214, 215  
bank syariah, 1: 159, 160, 161, 162, 300, 301, 836, 842, 843; 2: 964, 1283, 1284, 1444, 1623, 1631  
Banten, 1: 412; 2: 1322, 1657, 1658  
Bantul, 1: 465, 466  
Barth, Karl, 2: 1155  
Basrah, 1: 551  
Bassam Tibi, 2: 1466  
Batak, 1: 313, 503, 505, 507, 508, 727; 2: 1060, 1153  
bayi tabung, 2: 972, 1553  
Beatty, Andrea, 2: 1166  
*Beijing Platform*, 2: 980  
Belanda, 1: 63, 130, 142, 218, 246, 279, 291, 320, 418, 450, 517, 609, 620, 621, 623, 745, 794, 795, 796, 797, 857; 2: 928, 934, 941, 975, 1002, 1026, 1132, 1198, 1455, 1486, 1598, 1600, 1606, 1667, 1683, 1723  
Bell, Daniel, 2: 1677  
Bellah, Robert N., 1: 263, 990  
*bellum omni contra omnes*, 2: 1179  
Benda, Harry J., 1: 414  
Benny Susetyo (Romo), 1: 825  
Berger, Peter L., 1: 262  
Berlin, Isaiah, 1: 542, 819; 2: 1594  
*Bernas* (harian), 1: 729  
Bertrand, Jacques, 1: 748  
Beshara School, 1: 873

*beyond the limit of intelligent*, 2: 1028  
*beyond the scope of sociology*, 2: 1488  
*beyond the traditional understanding*, 2:  
 1732  
*Bhagavad Gita*, 1: 873  
 Bhinneka Tunggal Ika, 1: 17, 26, 53, 62,  
 63, 70, 261, 269, 279, 284, 323, 340;  
 2: 943, 951, 967, 1164, 1264, 1297,  
 1306, 1329, 1348, 1584, 1585,  
 1657, 1740  
*biblical and theological foundation*, 1: 287  
*Biblical argument*, 1: 281  
 Bielefeldt, Heiner, 2: 950  
 biodiversitas, 1: 483, 507  
*Black Muslim*, 1: 642  
 BLBI, 1: 222  
 Bonaparte, Napoleon, 1: 264  
 borjuis, 1: 480, 494; 2: 1299, 1459, 1648  
 Borobudur (candi), 2: 1329  
 Bosnia, 2: 1455  
 Bourdieu, Pierre, 1: 658, 661, 663  
 BPUPKI, 2: 1667  
 Brahma Kumaris, 1: 601  
 Brigham Young University, 1: 847  
 Brunei Darussalam, 1: 80, 81, 98  
 budaya marginal, 2: 1528  
 Budha, 1: 34, 58, 63, 76, 118, 120, 125,  
 126, 152, 270, 274, 313, 342, 357,  
 391, 394, 479, 484, 492, 493, 516,  
 538, 563, 646, 647, 784, 823; 2: 908,  
 909, 915, 936, 1013, 1044, 1091,  
 1102, 1116, 1247, 1322, 1328,  
 1329, 1360, 1408, 1443, 1741  
 Budhisme, 1: 538, 539, 877; 2: 1443,  
 1590  
 Budhy Munawar-Rachman, 1: 873  
*Bughyat al-Murtasyidîn*, 1: 130  
 Bugis, 1: 313, 843; 2: 1060  
 Bulgaria, 1: 529  
 Bush, George W., 1: 216, 230, 589; 2:  
 1677  
 Bush, George, 1: 137, 405; 2: 1486

## C

California, 1: 848  
 Calvin, John, 1: 265, 282, 286  
 Calvin, Yohanes, 1: 768  
 Calvinisme, 2: 991  
*capacity state*, 1: 772  
*capital market*, 1: 836  
 Caputo, John D., 2: 1162  
 Carrefour, 1: 615, 645; 2: 1380  
 Casanova, Jose, 1: 8, 32, 33, 38, 215,  
 262, 265, 274, 334, 470, 479, 519,  
 520, 655, 739, 740, 741, 791, 792;  
 2: 1018, 1027, 1028, 1152, 1153,  
 1274, 1338, 1339, 1340, 1470,  
 1732, 1733  
 Castles, Lance, 2: 1069  
*Catatan Pinggir*, 1: 418  
 Catherine, 1: 290  
 CEDAW, 1: 45, 446, 581; 2: 979, 1040,  
 1506, 1507  
*celebrating the differences*, 2: 1494, 1499  
 CePDeS (Center for Pesantren and  
 Democracy Studies), 2: 975  
 Cerita 1001 Malam, 1: 196  
 Chang Hai Chi, 1: 136  
 Chicago University, 2: 893  
 Chile, 2: 1743  
 Chomsky, Noam, 1: 432, 454  
 Christlich Demokratische Union (CDU),  
 1: 480  
 Christliche Volkspartei (CVP), 1: 480  
 Cina, 1: 63, 79, 518, 586, 608, 622,  
 623, 624, 728, 795, 842, 845; 2: 899,  
 1044, 1165, 1193, 1195, 1294,  
 1329, 1412, 1454, 1621, 1720,  
 1723  
*citizen rights*, 2: 1539, 1541  
*civic education*, 1: 560, 1192  
*civic liberties*, 1: 572, 573  
*civic religion*, 1: 405; 2: 1189, 1190,  
 1670, 1680  
*civil courage*, 1: 379

## Membela Kebebasan Beragama

- civil liberties*, 1: 20, 181, 195, 198, 201, 224, 500, 501, 530, 569, 572, 578, 580, 581, 582, 583, 586, 589, 743, 745, 746, 747, 808; 2: 1076, 1191, 1192, 1201, 1211, 1212, 1213, 1285, 1344, 1377, 1617, 1623, 1631, 1632
- civil liberty*, 1: 384; 2: 1417, 1431, 1435
- civil rights*, 1: 20, 181, 198, 224, 500, 501, 530, 573, 578, 580, 581, 582, 589, 746, 800, 808; 2: 1076, 1191, 1192, 1201, 1211, 1212, 1213, 1285, 1344, 1377, 1599, 1617, 1623, 1631, 1632
- civil society*, 1: 10, 16, 25, 28, 49, 50, 64, 133, 157, 211, 215, 224, 225, 270, 273, 274, 275, 276, 303, 321, 362, 386, 403, 405, 517, 520, 521, 522, 582, 583, 662, 665, 726, 744, 785, 796, 797, 807, 835, 879; 2: 944, 953, 956, 957, 1028, 1043, 1120, 1122, 1141, 1142, 1149, 1152, 1196, 1200, 1213, 1218, 1330, 1339, 1340, 1354, 1355, 1365, 1412, 1468, 1471, 1485, 1486, 1490, 1497, 1500, 1540, 1541, 1564, 1565, 1603, 1663, 1681, 1734, 1748
- civil war*, 1: 876
- Cixous, Helene, 1: 588, 589, 590; 2: 1487
- clash of civilization*, 1: 136, 519
- clash of religions*, 2: 1029, 1033
- Clinton, Hillary, 2: 1298
- co-existence*, 1: 124, 268; 2: 1080, 1172, 1352, 1502
- Cokro Aminoto, 2: 1002, 1009
- collective action*, 2: 1216
- collective aspiration*, 2: 1216
- collective identity*, 2: 1663, 1675, 1679
- collective memory*, 2: 888
- common denominator*, 1: 595, 598; 2: 1680
- common virtue*, 2: 1210, 1211
- consociational democracy*, 1: 745
- content of law*, 2: 944, 946
- context of discovery*, 2: 1553
- context of justification*, 2: 1553
- contradictio in terminis*, 1: 89, 97, 825
- Cordoba, 1: 608
- Cox, Harvey, 1: 10, 262; 2: 1151
- creative pro-existence*, 1: 268
- crime by omission*, 1: 233; 2: 1365
- cross culture fertilization*, 2: 1672, 1686
- Crowder, George, 2: 1594
- cultural broker*, 1: 410
- cultural capital*, 1: 835, 836
- cultural identity*, 1: 836
- cultural mandate*, 1: 286
- cultural revivalism*, 1: 843
- culture of law*, 2: 944
- cyclic decline*, 2: 1025, 1028

## D

- D'Sa, Francis, 1: 510
- Da Vinci, 1: 1381
- Dali, Salvador, 1: 574
- Damaskus, 1: 143, 298; 2: 1693, 1695
- dâr al-amn*, 1: 438, 677, 681
- dâr al-harb*, 2: 1716
- dâr al-Islâm*, 1: 438, 677; 2: 1132, 1716
- dâr al-Kufr*, 1: 438, 677
- dâr al-salâm*, 2: 1132, 1413
- Darwin, Charles, 1: 604
- teori—, 2: 908
- Daud Beureueh, 1: 410
- Daud Patani, 2: 1538
- Dawkins, Richard, 1: 601, 602
- dawlah islâmiyah*, 1: 174
- Dayak, 1: 503, 507, 746, 747; 2: 1103
- de Tocqueville, Alexis, 2: 1426
- decline of religion*, 1: 9, 10, 27, 192, 654, 736; 2: 1014, 1025, 1150, 1335, 1510, 1610
- deisme, 1: 368

- deklarasi Kairo, 1: 146  
 dekriminalisasi, 1: 524  
 deliberasi, 1: 388, 459, 461  
 demistifikasi, 2: 991, 1664  
 demitologisasi, 1: 831, 833, 834, 835,  
 836, 837, 838, 848, 851  
*democracy with adjective*, 2: 998  
 demokrasi, 1: 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22,  
 28, 50, 51, 67, 84, 116, 123, 141,  
 145, 158, 159, 168, 171, 178, 179,  
 180, 181, 184, 185, 191, 198, 199,  
 201, 211, 213, 219, 220, 221, 222,  
 223, 225, 230, 244, 250, 258, 268,  
 275, 276, 278, 289, 291, 292, 293,  
 295, 299, 307, 320, 374, 379, 380,  
 382, 389, 390, 399, 403, 409, 414,  
 416, 425, 427, 429, 432, 433, 434,  
 435, 440, 446, 447, 450, 454, 463,  
 477, 487, 493, 494, 496, 497, 498,  
 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,  
 506, 507, 509, 522, 529, 530, 532,  
 533, 534, 547, 550, 553, 555, 556,  
 557, 558, 559, 560, 562, 566, 567,  
 572, 573, 577, 581, 582, 623, 626,  
 635, 636, 637, 638, 663, 666, 675,  
 678, 679, 683, 690, 691, 692, 695,  
 711, 727, 733, 737, 740, 744, 745,  
 746, 747, 748, 749, 751, 787, 791,  
 792, 795, 796, 797, 799, 807, 808,  
 815, 820, 844, 846, 847, 848, 850,  
 858, 860, 861, 879, 882; 2: 886, 887,  
 888, 897, 899, 901, 912, 947, 962,  
 970, 986, 989, 992, 993, 994, 995,  
 996, 997, 998, 999, 1003, 1004,  
 1005, 1007, 1008, 1009, 1019,  
 1034, 1035, 1055, 1061, 1062,  
 1083, 1095, 1114, 1123, 1201,  
 1205, 1206, 1207, 1217, 1236,  
 1240, 1251, 1257, 1258, 1259,  
 1260, 1262, 1263, 1270, 1286,  
 1297, 1301, 1323, 1324, 1325,  
 1326, 1330, 1340, 1375, 1377,  
 1378, 1417, 1419, 1421, 1423,  
 1425, 1426, 1427, 1428, 1429,  
 1430, 1431, 1432, 1433, 1434,  
 1435, 1436, 1437, 1438, 1441,  
 1443, 1445, 1447, 1448, 1449,  
 1450, 1451, 1453, 1454, 1456,  
 1457, 1458, 1459, 1460, 1461,  
 1462, 1465, 1470, 1472, 1473,  
 1481, 1498, 1512, 1523, 1524,  
 1528, 1533, 1541, 1556, 1560,  
 1562, 1574, 1579, 1583, 1587,  
 1589, 1596, 1600, 1601, 1603,  
 1610, 1621, 1622, 1623, 1624,  
 1628, 1629, 1631, 1641, 1646,  
 1647, 1648, 1649, 1650, 1654,  
 1670, 1671, 1673, 1674, 1675,  
 1678, 1679, 1684, 1702, 1708,  
 1727, 1728, 1729, 1731, 1732,  
 1734, 1735, 1736, 1745  
 system—, 1: 178, 180, 219, 223, 250,  
 289, 496, 497, 498, 502, 504, 509,  
 532, 533, 553, 558, 559; 2: 993, 995,  
 996, 1055, 1262, 1323, 1325, 1330,  
 1460, 1622, 1623  
 demokratis, 1: 16, 34, 50, 78, 154, 167,  
 180, 181, 184, 201, 220, 221, 222,  
 223, 224, 244, 251, 258, 259, 268,  
 279, 293, 301, 304, 305, 310, 325,  
 347, 361, 365, 367, 370, 371, 375,  
 379, 380, 381, 382, 388, 390, 416,  
 417, 433, 497, 499, 506, 514, 520,  
 521, 522, 530, 531, 532, 534, 558,  
 567, 569, 572, 582, 623, 636, 679,  
 697, 744, 753, 759, 771, 782, 785,  
 791, 806, 807, 837, 848, 849, 851,  
 860, 870; 2: 927, 928, 934, 986, 998,  
 999, 1003, 1005, 1007, 1008, 1013,  
 1034, 1052, 1055, 1061, 1084,  
 1086, 1101, 1126, 1127, 1128,  
 1137, 1171, 1207, 1236, 1237,  
 1251, 1257, 1262, 1263, 1274,  
 1279, 1308, 1315, 1333, 1340,

## Membela Kebebasan Beragama

- 1345, 1353, 1385, 1421, 1430, 1447, 1449, 1451, 1458, 1462, 1506, 1523, 1549, 1556, 1622, 1623, 1629, 1646, 1647, 1648, 1651, 1665, 1671, 1679, 1682, 1702, 1703, 1731, 1739, 1747
- Denmark, 1: 482, 517, 518; 2: 1321, 1486, 1496
- Denneth, Daniel, 1: 601
- Departemen Agama, 1: 33, 76, 87, 132, 212, 243, 255, 326, 345, 346, 359, 362, 364, 449, 613, 616, 635, 640, 642, 647, 775; 2: 912, 928, 935, 936, 952, 998, 1272, 1276, 1289, 1290, 1308, 1361, 1370, 1374, 1412, 1415, 1572, 1731, 1757
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 1: 581; 2: 1267
- Departemen Luar Negeri, 1: 537; 2: 912, 1364
- Departemen Penerangan, 1: 716
- Depdiknas, 2: 912
- derogable rights*, 1: 167, 267, 273, 610
- Derrida, 1: 656
- desakralisasi, 1: 263, 402, 513, 514, 515, 516; 2: 1188, 1189, 1467, 1552
- Deutero-Kanonika, 1: 768
- divide et impera*, 2: 1589, 1598
- Dewan Gereja-gereja se-Dunia, 1: 355
- Dewan Pers, 1: 716, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 728
- Dewan Revolusi Kultur Islam, 2: 934
- DI, 1: 553; 2: 1062
- diferensiasi, 1: 3, 6, 7, 9, 10, 16, 32, 33, 261, 262, 263, 292, 493, 740, 788; 2: 1012, 1337, 1610, 1621
- dimensi “surgawi”, 1: 326
- Din Syamsuddin, 1: 134, 283, 351, 452; 2: 1558
- direct democracy*, 1: 506
- disadvantage*, 1: 180, 661; 2: 979, 1039, 1086, 1089, 1353, 1505, 1598
- disenchantment of the world*, 1: 760
- dislike relationship*, 1: 788
- Djohan Effendi, 2: 1266, 1599
- DKI Jakarta, 1: 250; 2: 958
- doctrina domus*, 1: 382
- dogmatis, 1: 3, 6, 18, 351, 397, 595, 630, 656, 831; 2: 1023, 1029, 1033, 1166, 1484, 1511, 1656, 1723, 1725, 1727, 1753
- doktrin poligami, 1: 968
- DPR, 1: 78, 117, 119, 148, 184, 251, 258, 348, 411, 415, 497, 521, 635, 699; 2: 946, 969, 974, 1032, 1054, 1143, 1263, 1286, 1302, 1303, 1309, 1311, 1346, 1363, 1364, 1365, 1367, 1433, 1461, 1462, 1499, 1536, 1540, 1654, 1757
- DUHAM, 1: 195, 472; 2: 951, 967, 1082, 1327, 1528
- Dunia Ketiga, 1: 19, 504, 505; 2: 959, 960, 1325, 1513, 1644, 1650, 1702
- dzimmî*, 1: 95, 842

## E

- ecclestial religion*, 2: 1030
- economical capital*, 1: 836, 842
- Economist*, 1: 409; 2: 961
- Eden, komunitas, 1: 85, 417, 471, 706, 721, 750, 806, 866; 2: 1146, 1327, 1372, 1456, 1561, 1563, 1575, 1600, 1618
- Edison, Thomas Alfa, 1: 620
- edukasi (proses), 1: 136
- Einstein, 1: 177, 604; 2: 1069
- Eka Darmaputera, 1: 276, 277, 278
- eklektisisme, 1: 469
- ekonomi liberal-kapitalis, 1: 585
- ekonomi sosialis, 1: 301, 304, 1631
- eksklusivisme, 1: 99, 509, 814, 824, 878; 2: 909, 1558
- ekstremisme, 1: 230; 2: 1732, 1749
- ekumenikal, 1: 356, 779, 780

- electoral threshold*, 2: 996  
 Elijah Muhammad, 1: 642  
 emosi traumatis, 1: 329  
 Empedokles, 2: 1397, 1411  
*enlightened despot*, 2: 1008, 1009  
*enlightenment*, 1: 608; 2: 1024, 1045, 1488  
 epistemologi, 1: 374, 657; 2: 1039, 1043, 1155, 1170, 1336, 1562  
*equal citizen*, 2: 1685  
*equilibrium*, 1: 559, 657  
 Erdogan, 1: 132, 789; 2: 1019  
 Eropa, 1: 9, 54, 56, 61, 125, 142, 143, 221, 247, 290, 291, 295, 296, 304, 321, 326, 328, 329, 368, 370, 374, 406, 408, 409, 427, 440, 460, 470, 479, 482, 485, 486, 487, 489, 506, 517, 518, 529, 570, 596, 597, 598, 599, 600, 607, 612, 616, 619, 626, 630, 634, 635, 636, 641, 659, 719, 734, 736, 742, 744, 749, 756, 760, 762, 788, 795, 832, 833, 842, 876, 882; 2: 886, 891, 896, 902, 908, 950, 951, 959, 982, 990, 991, 992, 995, 999, 1008, 1012, 1014, 1015, 1019, 1025, 1026, 1028, 1030, 1044, 1066, 1070, 1071, 1075, 1083, 1157, 1158, 1179, 1189, 1191, 1210, 1240, 1252, 1257, 1262, 1270, 1303, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1442, 1445, 1449, 1456, 1458, 1466, 1471, 1486, 1487, 1489, 1496, 1505, 1524, 1532, 1619, 1640, 1664, 1665, 1683, 1700, 1721, 1723, 1724, 1725, 1730, 1743  
*eshtablished cruch*, 1: 745  
 Essack, Farid, 2: 1252  
 Ethiopia, 1: 768, 876; 2: 1406  
*etnonationalism*, 2: 1657  
 euforia lokalitas, 2: 942, 943  
 Eurocentris, 2: 1488, 1501  
 Evangelical, 1: 356; 2: 1159  
 Evangelis (gerakan), 2: 1470  
*existential security*, 1: 742, 743
- F**
- fanatisme, 1: 6, 24, 26, 59, 378, 379; 2: 1499, 1677  
 Fariduddin al-Attar, 2: 1410  
 fasisme, 1: 409, 960  
 Fatimah Mernisi, 2: 1650, 1718  
 Fatimiyah, 1: 607  
 Fattah, 2: 1044  
 Fauda, Farag, 1: 463  
 Fazlur Rahman, 1: 35, 36; 2: 1545, 1705  
 Feillard, Andre, 2: 1273  
 Feith, Herbert, 1: 414; 2: 1069  
 feminis (gerakan), 1: 575; 2: 1138, 1641, 1651, 1655, 1656, 1657  
 feminisme, 1: 575, 578, 579; 2: 940, 1138, 1323, 1487, 1490, 1641, 1642, 1647, 1649, 1650, 1651, 1654, 1658, 1659  
 feodalisme, 1: 15, 17, 18, 378; 2: 1153, 1154  
 Ferry, Luc, 1: 669  
 filantropi, 1: 215  
 Filipina, 1: 377, 379, 416, 445, 577, 834; 2: 1007, 1443, 1456  
 Finlandia, 2: 1317, 1319  
*fiqh jinâyah*, 1: 78; 2: 1361  
*fiqh oriented*, 1: 310, 311  
 FIS, 1: 533, 534  
*Fitna*, 1: 219  
*fitnah al-kubrâ, al-*, 1: 196, 712  
 FKUB, 1: 83  
 Ford Foundation, 1: 726  
*formal arrangement*, 2: 1685  
*formal arrangment*, 2: 1665  
 formalisasi syariah, 1: 36, 82, 129, 237, 245, 258, 787, 799, 806, 843, 864, 870; 2: 957, 1125, 1757  
 Foucault, Michel, 1: 49, 658

## Membela Kebebasan Beragama

FPI, 1: 26, 38, 77, 80, 150, 151, 153, 257, 718, 775, 850; 2: 1084, 1115, 1118, 1119, 1423, 1424, 1532, 1605, 1708  
Frans Dahler, 2: 1188  
Franz Magnis Suseno (Romo), 1: 269; 2: 960  
Freedom House, 1: 572; 2: 1005, 1432, 1447, 1451, 1541  
Freedom Institute, 1: 627; 2: 960  
*freedom of belief*, 2: 1593, 1598  
*freedom of expression*, 1: 247; 2: 1496, 1497  
*freedom of religion*, 2: 952  
*freedom to act*, 2: 1558, 1563  
*freedom to choice*, 2: 1558, 1563  
*freedom to expression*, 2: 1558, 1563  
Freeport, 1: 522, 586; 2: 1630  
Friedman, Milton, 1: 495, 619  
*friendly religion secularization*, 2: 1531, 1533  
Fuad Hasyim, K.H., 1: 705  
FUI, 1: 84, 1119  
Fukuyama, Francis, 2: 1004, 1009  
fundamentalisme, 1: 12, 28, 65, 193, 264, 272, 291, 302, 321, 336, 418, 509, 575, 577, 740, 761, 762, 774, 777, 779, 782, 783, 801, 817, 824, 849, 850; 2: 925, 981, 982, 1084, 1150, 1155, 1253, 1254, 1258, 1260, 1265, 1277, 1447, 1459, 1470, 1472, 1490, 1491, 1495, 1503, 1681, 1688, 1718, 1749, 1757  
fundamentalisme agama, 1: 28, 302, 321, 575, 577; 2: 981, 982, 1253, 1470, 1491, 1503  
fundamentalisme religius, 1: 761, 762, 774, 777, 779, 783  
fundamentalistik, 1: 304, 305, 649, 697, 761, 770; 2: 1109  
*Fushûsh al-Hikam*, 1: 873  
*fusion of horizons*, 1: 665, 672

## G

G 30 S/PKI, 1: 387  
Gadamer, 1: 672  
Galileo, 1: 493; 2: 1763, 1764  
GAM, 2: 971, 1304  
Gamal Abdul Naser, 1: 228  
gamelan, 1: 633, 649  
Gandhi, 1: 228, 379, 669, 824  
Gates, Bill, 1: 585, 619, 622; 2: 961  
GBHN, 1: 276, 277  
Gedong (ibu), 2: 1599  
Geertz, Clifford, 1: 394, 410; 2: 1167, 1342, 1668, 1676, 1687  
*genocide*, 1: 567  
*gentlement agreement*, 2: 1073  
gereja Ortodoks, 1: 768  
Ghazali, al-, 1: 68, 69, 429, 557, 608, 683, 685, 691, 837, 838, 840, 859; 2: 1229, 1709, 1717, 1723  
*ghetto*, 1: 783; 2: 1590, 1684  
Giddens, Anthony, 1: 665  
Gilligan, Carol, 1: 588, 589  
globalisasi, 1: 28, 29, 66, 138, 154, 164, 165, 218, 306, 470, 574, 583, 584, 586, 624, 660; 2: 907, 910, 961, 979, 980, 1019, 1193, 1195, 1196, 1197, 1344, 1491, 1528, 1590, 1657, 1658, 1659, 1665, 1720, 1722, 1723  
*Globalizing Indonesian Local Islam*, 1: 164  
Goenawan Mohamad, 1: 418; 2: 1158  
Gogarten, Friedrich, 1: 262  
*golden rule*, 1: 270; 2: 1614  
Goldziher, Ignác, 1: 608  
Golkar, 1: 67, 147, 158, 219, 222, 242, 435, 481, 502, 613, 650, 844; 2: 932, 1280, 1359, 1363, 1434  
*good governance*, 1: 141, 145, 390, 586; 2: 1041  
*good government*, 1: 808  
*Gospel's mandate*, 1: 286  
*grammar of action*, 2: 1676

Granger, Gilles-Gaston, 1: 657  
 Griffin, David Ray, 1: 821

## H

- Habasyah, 1: 92, 93, 876  
 Habermas, 1: 371, 374, 514, 520, 521, 525; 2: 1150, 1151, 1152  
 Habibie, 1: 423, 497, 729; 2: 933, 1323, 1452  
 Habibie Center, 1: 729  
*ḥablun min Allāh*, 1: 1068  
*ḥablun min al-nās*, 1: 226, 231; 2: 1068, 1742  
 Hadikusumo, TB., 2: 1667  
 haji, 1: 64, 68, 82, 91, 194, 217, 443, 449, 531, 613; 2: 935, 936, 973, 997, 1105, 1111, 1228, 1273, 1274, 1283, 1390, 1399, 1402, 1404, 1405, 1408, 1412, 1616, 1625, 1669, 1757, 1763  
 Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqaf, 2: 1396  
 halal *food*, 1: 836  
 Hallaj, al-, 1: 18, 452, 488, 492  
 HAM, 1: 8, 9, 11, 18, 62, 79, 81, 100, 122, 141, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 167, 168, 233, 323, 371, 388, 398, 437, 467, 468, 472, 481, 496, 501, 513, 519, 522, 523, 529, 543, 569, 572, 582, 586, 595, 610, 622, 623, 625, 636, 675, 683, 684, 685, 701, 785; 2: 887, 888, 897, 901, 930, 931, 951, 963, 964, 967, 979, 1006, 1031, 1040, 1045, 1065, 1085, 1123, 1205, 1207, 1297, 1302, 1310, 1327, 1345, 1375, 1386, 1387, 1465, 1483, 1490, 1491, 1494, 1496, 1500, 1501, 1503, 1505, 1506, 1507, 1522, 1528, 1569, 1571, 1581, 1593, 1594, 1604, 1605, 1739, 1745  
 Hamas, 1: 164, 299, 533; 2: 1044, 1061, 1084  
 Hamilton, Alexander, 1: 137  
 Hanafi (mazhab), 1: 645, 648; 2: 930, 1013, 1285, 1694  
 Hanafi, Imam, 1: 694; 2: 1178  
 Hanbali, 2: 966, 972, 1401  
*ḥanif*, 1: 254; 2: 1247  
 Hantington, 1: 394  
 Harun (Nabi), 1: 1098  
 Harun al-Rasyid, 1: 196, 688; 2: 1398  
 Harun Nasution, 2: 1721  
 Harvard Divinity School, 1: 264  
 Harvard University, 2: 893  
 Hasan Basri, 1: 608  
 Hasan Hanafi, 2: 1277, 1718, 1729  
 Hassan al-Banna, 1: 701  
 Hasyim Asy'ari, 1: 112; 2: 973, 974, 1413  
 Hasyim Muzadi, 1: 133, 134, 794, 797; 2: 1246  
 Hayek, Friedrich August von, 1: 495  
 Hayy ibn Yaqzhan, 1: 111  
 HB Jasin, 2: 1370  
 Heather Sutherland, 1: 418  
 Hefner, Robert W., 1: 159, 160  
 Hegel, 2: 1300  
 Heidegger, 2: 1170  
 Henry VIII, 1: 290  
 hermeneutika (metode), 1: 657; 2: 1108  
 Hermes, 2: 1104  
 Hick, John, 1: 270, 821, 828; 2: 1083, 1704  
*Hidayah* (majalah), 1: 716  
 Hidayat Nur Wahid, 1: 616  
*ḥifẓ al-'aql*, 1: 683; 2: 952, 955  
*ḥifẓ al-bi'ah*, 1: 684  
*ḥifẓ al-dīn*, 1: 683; 2: 952, 955  
*ḥifẓ al-mâl*, 1: 683, 684; 2: 952, 955  
*ḥifẓ al-nafs*, 1: 683  
*ḥifẓ al-nashl*, 2: 952  
*ḥifẓ al-nasl*, 1: 683, 684; 2: 955  
 Hindia-Belanda, 1: 130; 2: 1132  
 Hindu, 1: 34, 35, 48, 54, 63, 64, 76, 118, 120, 125, 126, 152, 270, 274,



## Membela Kebebasan Beragama

286, 296, 342, 357, 391, 394, 413, 479, 484, 492, 498, 499, 505, 507, 508, 510, 516, 536, 538, 578, 638, 646, 647, 669, 720, 778, 784, 815, 821, 823, 824, 825, 847, 862; 2: 908, 909, 915, 936, 1013, 1044, 1071, 1072, 1091, 1092, 1102, 1116, 1247, 1275, 1282, 1283, 1322, 1326, 1328, 1329, 1360, 1408, 1588, 1589, 1590

Hirsch, E., 2: 1154

Hitler, 1: 492, 499; 2: 1154, 1155

HIV-AIDS, 1: 466

HMI, 1: 71, 503, 617; 2: 933, 1224

Hobbes, 1: 66, 384; 2: 1024, 1179, 1353

Hobsbawm, Eric, 2: 1674

Holoyake, George, 2: 1270

*homo homini lupus*, 2: 1179, 1353, 1732

Hongkong, 2: 980, 1666

Hourani, Albert, 2: 1075

HT (Hizbut Tahrir), 1: 440; 2: 1288, 1289

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), 1: 71, 83, 84, 153, 195, 240, 257, 440, 464, 620, 643, 850, 858; 2: 995, 996, 1037, 1039, 1115, 1271, 1288, 1423, 1425, 1494, 1532

*hudûd*, 1: 182, 201, 202, 203, 560; 2: 1538, 1627

hukum adat, 1: 149

*human trafficking*, 1: 444, 445; 2: 1302, 1626

*humanities*, 2: 1035, 1037, 1038

Huntington, 1: 136, 275, 276, 556, 743, 744; 2: 1008

Hurgronje, Snouck, 1: 420, 795; 2: 1539, 1667

Husein Muhammad, 2: 973

Husein Umar, 2: 1312

*Hustler* (majalah), 1: 717

*hypothetical imperative*, 1: 284

## E

IAIN, 1: 105, 188, 840; 2: 894, 911, 936, 973, 1016, 1222, 1455, 1503, 1504, 1506, 1554, 1555, 1669, 1672

Ian Saphiro, 1: 666

Ibn Arabi, 1: 492, 493, 867; 2: 1001, 1410

Ibn Hisyam, 1: 609; 2: 1413

Ibn Ishak, 1: 609

Ibn Jarir al-Thabari, 1: 94, 608, 706

Ibn Katsir, 1: 94, 1715

Ibn Khaldun, 1: 14, 608; 2: 1288, 1704

Ibn Qayyim, 1: 677, 684, 685, 696

Ibn Taimiyyah, 1: 608, 684, 692, 696; 2: 1543, 1634

Ibn Thufail, 1: 111

Ibrahim (agama), 1: 313; 2: 1590

ICCPR, 1: 45, 88, 155, 267, 273; 2: 1364

ICIP, 1: 878

ICMI, 1: 132, 133, 160, 416, 423

ICRP, 1: 877

*identity marker*, 1: 790, 796, 808

ideologi liberal, 1: 374; 2: 938

ideologi pembangkangan masyarakat, 1: 804

ideologisasi, 1: 33, 397; 2: 1071

Idris (Nabi), 2: 1104

Idul Adha, 1: 202, 469, 835; 2: 1015, 1766

Idul Fitri, 1: 195, 202, 593, 835; 2: 1015, 1766, 1769

*ijmâ'*, 1: 107; 2: 1443, 1574, 1576, 1577, 1694

ijtihad, 1: 13, 14, 88, 112, 174, 175, 181, 226, 238, 239, 240, 247, 305, 306, 310, 425, 428, 430, 432, 435, 439, 451, 455, 472, 631, 632, 639, 694, 695, 696; 2: 957, 973, 975, 984, 1075, 1076, 1098, 1137, 1230, 1254, 1265, 1284, 1297, 1299, 1338, 1344, 1348, 1401, 1402,

- 1403, 1515, 1549, 1562, 1565,  
1569, 1573, 1576, 1577, 1578,  
1579, 1738, 1739, 1740
- Ikhwanul Muslimin, 2: 1084, 1271,  
1289, 1718
- illiberal democracy*, 1: 22, 501, 505; 2:  
989, 994, 999
- IMF, 2: 959, 960
- imperialisme, 1: 19, 174, 494, 524, 794,  
867, 878; 2: 960, 961, 1020, 1037,  
1074, 1082, 1379, 1400, 1494,  
1513, 1514, 1515, 1528, 1702
- incommensurability*, 2: 1523, 1528
- India, 1: 54, 63, 221, 228, 296, 300,  
306, 313, 355, 379, 418, 489, 510,  
516, 574, 622, 623, 624, 767, 797,  
824, 845; 2: 941, 1007, 1071, 1072,  
1329, 1392, 1446, 1590, 1692,  
1693
- indigenous value*, 2: 1531, 1535, 1537
- individual function of religion*, 2: 1028
- individualisme, 1: 20, 330, 502, 595,  
613, 619; 2: 895, 897, 898, 899,  
1158, 1647, 1649
- indoktrinasi, 2: 1100, 1680
- Indonesia, 1: 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33,  
34, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48,  
49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71,  
75, 76, 77, 79, 80, 88, 96, 97, 98,  
99, 100, 101, 104, 105, 112, 118,  
132, 135, 139, 141, 142, 143, 144,  
145, 146, 147, 150, 151, 152, 153,  
154, 155, 156, 157, 159, 160, 161,  
163, 164, 165, 166, 167, 168, 175,  
176, 179, 180, 181, 182, 183, 184,  
185, 187, 192, 195, 198, 201, 202,  
203, 207, 212, 213, 214, 215, 216,  
217, 218, 219, 220, 221, 223, 225,  
228, 229, 231, 232, 234, 237, 239,  
240, 241, 242, 243, 246, 247, 253,  
258, 259, 262, 266, 268, 270, 271,  
272, 274, 276, 280, 281, 283, 284,  
290, 301, 312, 314, 319, 320, 325,  
326, 327, 330, 333, 335, 336, 338,  
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,  
346, 347, 348, 349, 350, 352, 353,  
354, 355, 356, 357, 358, 360, 361,  
362, 363, 364, 365, 367, 380, 381,  
382, 384, 386, 390, 391, 392, 393,  
394, 398, 403, 404, 407, 408, 409,  
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,  
417, 418, 419, 421, 426, 434, 437,  
438, 439, 440, 443, 445, 446, 447,  
449, 451, 452, 454, 455, 456, 457,  
460, 461, 464, 479, 481, 482, 483,  
485, 487, 491, 496, 497, 498, 499,  
500, 502, 503, 506, 507, 508, 509,  
513, 518, 519, 522, 524, 528, 529,  
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,  
538, 544, 547, 549, 553, 555, 557,  
558, 560, 563, 566, 567, 570, 572,  
576, 581, 592, 593, 602, 612, 615,  
618, 620, 621, 627, 630, 631, 633,  
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,  
641, 642, 644, 645, 648, 649, 650,  
655, 660, 663, 664, 672, 673, 675,  
677, 696, 699, 706, 711, 715, 716,  
717, 718, 719, 721, 723, 724, 725,  
726, 727, 728, 729, 744, 746, 748,  
750, 751, 755, 760, 762, 763, 769,  
774, 775, 776, 782, 783, 785, 788,  
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795,  
797, 798, 799, 800, 801, 803, 804,  
806, 807, 808, 809, 812, 813, 814,  
818, 826, 834, 835, 836, 837, 838,  
841, 842, 843, 844, 845, 847, 849,  
850, 851, 852, 853, 856, 857, 858,  
860, 865, 870, 877, 878, 881, 883;  
2: 886, 888, 890, 894, 898, 899, 909,  
910, 912, 921, 923, 925, 926, 927,  
928, 929, 931, 932, 934, 935, 937,  
939, 940, 941, 942, 943, 945, 946,

## Membela Kebebasan Beragama

952, 953, 954, 955, 957, 959, 960,  
961, 962, 963, 964, 969, 978, 979,  
983, 984, 986, 989, 990, 991, 992,  
993, 995, 996, 997, 1001, 1002,  
1003, 1004, 1005, 1006, 1007,  
1017, 1024, 1028, 1030, 1033,  
1034, 1035, 1036, 1037, 1040,  
1044, 1045, 1047, 1053, 1054,  
1055, 1059, 1060, 1061, 1062,  
1065, 1066, 1067, 1069, 1072,  
1073, 1074, 1075, 1076, 1077,  
1082, 1083, 1086, 1087, 1088,  
1089, 1091, 1096, 1097, 1099,  
1100, 1102, 1103, 1108, 1111,  
1112, 1113, 1115, 1118, 1119,  
1120, 1122, 1123, 1130, 1131,  
1132, 1133, 1134, 1136, 1138,  
1140, 1143, 1144, 1147, 1149,  
1154, 1159, 1166, 1167, 1168,  
1173, 1175, 1176, 1184, 1188,  
1190, 1191, 1193, 1194, 1195,  
1197, 1206, 1208, 1209, 1211,  
1218, 1219, 1221, 1222, 1223,  
1224, 1225, 1226, 1227, 1228,  
1229, 1232, 1233, 1234, 1237,  
1240, 1243, 1246, 1252, 1256,  
1257, 1258, 1261, 1262, 1263,  
1264, 1270, 1271, 1272, 1273,  
1274, 1276, 1278, 1279, 1280,  
1281, 1282, 1283, 1284, 1285,  
1286, 1287, 1288, 1289, 1290,  
1291, 1292, 1293, 1297, 1301,  
1302, 1303, 1305, 1306, 1307,  
1308, 1309, 1310, 1316, 1320,  
1323, 1325, 1326, 1327, 1328,  
1329, 1330, 1338, 1339, 1341,  
1349, 1350, 1351, 1352, 1354,  
1355, 1358, 1359, 1361, 1362,  
1364, 1365, 1366, 1374, 1375,  
1379, 1386, 1394, 1399, 1404,  
1414, 1417, 1419, 1420, 1422,  
1423, 1425, 1426, 1427, 1429,  
1432, 1433, 1443, 1444, 1446,  
1447, 1450, 1451, 1452, 1454,  
1456, 1457, 1460, 1461, 1465,  
1466, 1469, 1470, 1476, 1477,  
1480, 1484, 1489, 1492, 1494,  
1495, 1496, 1497, 1498, 1499,  
1500, 1501, 1503, 1505, 1506,  
1510, 1511, 1512, 1513, 1514,  
1515, 1521, 1525, 1531, 1532,  
1534, 1535, 1536, 1537, 1538,  
1541, 1550, 1551, 1556, 1557,  
1558, 1570, 1571, 1572, 1573,  
1575, 1578, 1581, 1583, 1584,  
1588, 1595, 1598, 1600, 1606,  
1610, 1614, 1618, 1619, 1622,  
1633, 1634, 1639, 1640, 1646,  
1650, 1651, 1652, 1653, 1654,  
1655, 1656, 1657, 1658, 1659,  
1660, 1664, 1666, 1667, 1668,  
1669, 1670, 1672, 1673, 1674,  
1678, 1681, 1682, 1683, 1686,  
1687, 1688, 1693, 1694, 1695,  
1701, 1702, 1706, 1707, 1708,  
1717, 1718, 1719, 1720, 1721,  
1723, 1725, 1728, 1730, 1731,  
1732, 1734, 1735, 1736, 1737,  
1738, 1742, 1743, 1744, 1745,  
1751, 1753, 1754, 1755, 1757,  
1758, 1764  
*inferiority complex*, 1: 39, 96, 310  
Inggris, 1: 142, 194, 216, 290, 322, 368,  
371, 394, 480, 481, 486, 593, 621,  
797, 843; 2: 888, 908, 909, 941, 975,  
991, 992, 1000, 1024, 1026, 1048,  
1059, 1131, 1133, 1138, 1156,  
1240, 1270, 1304, 1334, 1450,  
1456, 1459, 1484, 1505, 1665,  
1672, 1685, 1692, 1723  
Inglehart, 1: 741, 742, 743, 744; 2: 1428  
Injil, 1: 93, 280, 281, 355, 515, 638,  
768, 769, 793, 847, 873; 2: 1079,  
1179, 1705, 1746

- Injil Filipus, 1: 769  
 Injil Maria Magdalena, 1: 769  
 Injil Thomas, 1: 769  
 Injil Yudas, 1: 769  
 inklusivisme, 1: 254, 821, 824; 2: 1746  
 inkuisisi, 1: 6, 18, 88, 168, 616, 617; 2: 1385, 1386, 1571, 1764  
 Interfidei, 1: 332, 347, 354, 360, 361  
*internal colonialism*, 2: 1514  
 Internal Security Act (ISA), 1: 153  
*international human rights law*, 2: 1342  
*international humanitarian laws*, 2: 1342, 1354  
*interpersonal trust*, 2: 1417, 1438  
*intifādah*, 1: 719  
 Inul Daratista, 1: 412  
 IPNU, 1: 617  
 Iqbal, 1: 67, 68, 69, 669; 2: 1019  
 Irak, 1: 96, 230, 296, 409, 414, 426, 432, 533, 589; 2: 909, 1016, 1044, 1058, 1402, 1448, 1459, 1460  
 Iran, 1: 11, 15, 16, 62, 63, 70, 240, 246, 426, 432, 486, 488, 489, 593, 599, 612, 636, 640, 642, 691, 828, 853, 856, 861, 875; 2: 890, 909, 934, 1016, 1019, 1058, 1236, 1323, 1394, 1407, 1451, 1516, 1705  
 Iranian Corner, 1: 853  
 Irigaray, 1: 588; 2: 1487, 1490  
 Irsyad, al-, 1: 317  
 Irwandi Yusuf, 2: 1556  
 Isa al-Masih, 2: 1173  
 ISEAS, 1: 136  
 Iskandar Muda, 2: 1538, 1539  
 Islam:  
     budaya—, 1: 367, 382, 843, 845  
     ekonomi—, 1: 161, 202, 548, 621, 678, 683, 859; 2: 1002, 1003, 1444, 1631  
     formalisasi syariat—, 1: 37, 78, 79, 81, 242, 798; 2: 1099, 1101, 1135, 1145, 1275, 1276, 1304, 1735, 1736  
     —Abad Pertengahan, 2: 1228, 1230  
     —abangan, 2: 1184  
     —Jamaah, 2: 1280  
     —liberal, 1: 34, 41, 43, 44, 45, 136, 417, 421, 422, 423, 767, 845, 856, 857, 869, 877; 2: 1000, 1001, 1002, 1003, 1009, 1161, 1240, 1241, 1305, 1401, 1494, 1559, 1720  
     —progresif, 1: 158; 2: 1471, 1472, 1560  
     —radikal, 1: 59, 183, 423, 561; 2: 1092, 1246  
     kerajaan—, 1: 130, 805; 2: 1132, 1471  
     negara—, 1: 11, 13, 14, 15, 16, 27, 34, 35, 55, 58, 74, 129, 130, 135, 137, 146, 174, 175, 176, 181, 185, 213, 214, 216, 217, 220, 223, 238, 239, 240, 241, 259, 280, 296, 341, 342, 418, 426, 438, 439, 440, 445, 451, 462, 464, 487, 488, 489, 532, 533, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 556, 558, 560, 562, 573, 576, 635, 677, 678, 679, 683, 685, 700, 744, 799, 848, 849, 850, 851, 859, 860, 864, 870, 879, 881, 882; 2: 943, 999, 1021, 1026, 1061, 1062, 1098, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1143, 1144, 1165, 1226, 1236, 1238, 1253, 1255, 1273, 1277, 1291, 1304, 1305, 1361, 1366, 1374, 1389, 1392, 1394, 1396, 1404, 1405, 1407, 1413, 1414, 1481, 1516, 1538, 1558, 1621, 1622, 1693, 1696, 1700, 1711, 1757  
     nilai-nilai—, 1: 35, 44, 45, 129, 138, 159, 160, 174, 181, 182, 216, 228, 243, 340, 548, 835; 2: 900, 902, 903, 910, 955, 1018, 1021, 1032, 1076, 1125, 1126, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1137, 1138, 1143,

## Membela Kebebasan Beragama

- 1144, 1273, 1274, 1307, 1338, 1392, 1405, 1407, 1414, 1465, 1512, 1622, 1631, 1650, 1693, 1735, 1747
- sejarah—, 1: 17, 34, 54, 64, 75, 107, 143, 248, 249, 257, 294, 463, 493, 607, 712, 836, 877; 2: 1279, 1516, 1560, 1562, 1570, 1571, 1576, 1577, 1578, 1580, 1582, 1704, 1730
- tradisi—, 1: 36, 40, 110, 138, 139, 469, 633, 846, 852, 886; 2: 1107, 1150, 1151, 1427, 1507, 1576
- islamic textual civilization*, 2: 1084
- islamisasi, 1: 548, 555, 604, 739; 2: 891, 892, 1002, 1092, 1266, 1277, 1336, 1337, 1366, 1367, 1426, 1553, 1663, 1669, 1760, 1761
- proses—, 2: 1092, 1366
- Islamisme, 1: 35, 218, 221, 382, 787, 789, 793; 2: 1357, 1359, 1361, 1362, 1363
- Islamizing Capitalism*, 1: 159, 160
- islamo-fascism*, 2: 989, 1004, 1009
- Ismail al-Faruqi, 2: 1761
- Isra Mi'raj, 1: 612
- Israel, 1: 43, 56, 164, 166, 180, 216, 432, 486, 487, 544, 591, 748, 749, 760; 2: 1044
- Italia, 1: 291, 409, 506, 523; 2: 901, 1019, 1665, 1723
- ITB, 2: 911, 978
- ITS, 1: 421
- ittibâ' muthlâq*, 1: 693, 694
- J**
- Ja'far Umar Thalib, 1: 97
- Jainisme, 1: 313
- Jalaluddin al-Rumi, 2: 1410
- Jalaluddin al-Suyuthi, 1: 91
- Jalaluddin Rahmat (Kang Jalal), 1: 814, 823
- Jamaah Islamiyah, 1: 850; 2: 1289, 1423, 1425
- Jamal (perang), 1: 248, 712
- Jawa Barat, 1: 79, 344, 364, 407; 2: 933
- Jawa Pos*, 1: 43
- Jawa Timur, 1: 97, 227, 797, 853
- Jefferson, Thomas, 1: 137; 2: 996
- Jembatan Besi, 2: 1002
- Jepang, 1: 56, 59, 60, 63, 136, 387, 410, 834, 882; 2: 980, 1000, 1193, 1195, 1667, 1700
- Jerman, 1: 142, 162, 246, 262, 291, 371, 373, 374, 383, 387, 394, 409, 480, 484, 485, 492, 494, 498, 499, 500, 504, 506, 515, 517, 518, 524, 525, 529, 530, 544, 578, 611, 621, 725, 744, 745, 881, 882; 2: 901, 950, 990, 994, 997, 1024, 1026, 1154, 1155, 1157, 1206, 1217, 1257, 1723
- Jesuit (ordo), 1: 125
- JL, 1: 850
- jihād, 1: 164, 682, 719, 850; 2: 932, 1058, 1123, 1146, 1159, 1253, 1297, 1299, 1300, 1413, 1448
- JIL, 1: 136, 439, 767, 877; 2: 1115, 1305, 1401, 1494, 1499, 1720
- jilbab, 1: 20, 21, 56, 57, 78, 84, 101, 193, 194, 200, 243, 350, 369, 405, 421, 434, 436, 514, 554, 576, 577, 591, 610, 638, 701, 737, 746, 747, 836, 838, 864, 880, 881; 2: 926, 930, 931, 932, 964, 965, 979, 1034, 1277, 1286, 1303, 1304, 1308, 1422, 1446, 1451, 1454, 1474, 1476, 1617, 1619, 1623, 1631, 1632, 1646, 1650, 1651, 1740, 1759, 1766, 1767
- Jilbab Award, 1: 576
- Jombang, 2: 974, 977
- Judeo-Christian Ethic*, 2: 1015
- Judeo-Kristiani, 1: 216
- jumhûr*, 2: 1266, 1343

Jurgensmeyer, Mark, 1: 264  
*Just War*, 2: 1448  
*Justice and Development Party*, 1: 132  
 Jusuf Kalla, 2: 1004, 1298  
*juz'iyât*, 1: 241

## K

Kahar Muzakkar, 1: 1414  
 Kaharingan, 1: 88, 336, 339; 2: 943, 1282, 1283  
 Kahin, George Mc T, 1: 220  
*kalimah sawâ'*, 1: 1087, 1096  
 Kamboja, 1: 883; 2: 1460, 1538  
 Kanada, 1: 24, 77, 194, 356, 363, 486, 558, 790; 2: 1026, 1044, 1045, 1189, 1502, 1503, 1505, 1672, 1685  
 Kant, Immanuel, 1: 284, 373, 383; 2: 1024  
 KAPAL Perempuan, 2: 1656, 1660, 1661  
 kapitalisme, 1: 19, 59, 62, 63, 137, 159, 160, 161, 162, 215, 216, 306, 383, 470, 494, 495, 496, 502, 523, 524, 525, 583, 584, 585, 586, 620, 759; 2: 898, 899, 900, 938, 960, 961, 975, 980, 1009, 1019, 1020, 1037, 1038, 1039, 1074, 1120, 1157, 1160, 1299, 1300, 1310, 1379, 1380, 1400, 1475, 1476, 1489, 1495, 1513, 1628, 1631, 1643, 1644, 1659, 1758  
 Kartini, 1: 66  
 Kasman Singodimedjo, 1: 278  
 Katolik, 1: 34, 48, 54, 63, 91, 118, 125, 126, 132, 152, 180, 208, 255, 268, 275, 276, 284, 320, 321, 342, 355, 357, 370, 392, 474, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 487, 490, 493, 494, 495, 501, 508, 509, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 533, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 564, 596, 597, 600, 601, 610, 630, 646, 650, 659, 669, 730, 768, 803, 825, 826, 828, 833, 848, 851, 877; 2: 924, 950, 952, 970, 975, 1013, 1024, 1025, 1026, 1030, 1044, 1102, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1151, 1153, 1154, 1155, 1158, 1168, 1236, 1252, 1264, 1293, 1316, 1322, 1326, 1328, 1329, 1392, 1412, 1443, 1448, 1486, 1514, 1546, 1547, 1619, 1666, 1717, 1763  
 Kaum Muda, 1: 134, 317, 484, 841; 2: 1002  
 Kaum Tua, 1: 317  
 KB, 2: 1445, 1764  
 kearifan lokal, 1: 101, 755, 773, 783; 2: 984, 985, 986, 987, 1526, 1527, 1528  
 Kebangkitan Kristus, 1: 1161  
 kebenaran teologi, 1: 198, 867, 879; 2: 1266  
*Kedaulatan Rakyat*, 1: 645, 729  
 keindonesiaan, 1: 3, 8, 11, 17, 21, 23, 27, 34, 55, 164, 176, 211, 328, 381, 521, 627, 629, 719, 724, 728, 831; 2: 889, 890, 894, 910, 932, 941, 946, 951, 960, 967, 1083, 1102, 1141, 1197, 1210, 1215, 1340, 1359, 1441, 1496, 1516, 1533, 1549, 1572, 1730, 1744  
 Kejawan, 1: 508; 2: 1259  
 Kennedy, John F., 1: 180  
 Kepel, Gilles, 1: 264  
 Kerry, John, 1: 137  
 Khadijah, 1: 441; 2: 1406  
 Khairil Anwar, 2: 1152  
 Khairiyah Hasyim, 2: 974  
*khalîfah fi al-ardl*, 1: 619  
 Khandaq (perang), 1: 92  
 Khawarij, 1: 74, 75; 2: 1279  
 Khazraj, 2: 1126, 1392  
 KHI, 2: 1720  
*khalîfah* (konsep), 1: 34, 35, 73, 195,

## Membela Kebebasan Beragama

- 463, 678, 679, 697; 2: 1004, 1061, 1129, 1305
- khilâfah* (system), 1: 463, 552, 691, 841; 2: 1237, 1443, 1494
- khilâfah fi al-ardl*, 1: 679, 697
- khilâfah islâmiyah*, 1: 73, 75, 77, 218, 552, 609; 2: 1047, 1061, 1062, 1100, 1101, 1129, 1297, 1305, 1309, 1375, 1377
- Khomeini, 1: 856, 861; 2: 934
- Khulafâ' al-Râsyidûn, al-*, 1: 36, 75, 77, 195, 196, 462, 463, 552, 553, 607; 2: 951, 1129, 1338, 1396, 1397, 1398, 1570, 1695, 1696
- Khwaja Jamal, 1: 300
- killling the others*, 2: 1732
- Kinabalu, 1: 487
- kitab kuning, 1: 797
- Kittel, Gerhard, 2: 1154
- kloning, 1: 177
- KNIP, 2: 1668
- knowledge management*, 1: 388
- kolonialisme, 1: 19, 63, 494, 524, 794, 796, 797, 798; 2: 938, 960, 1000, 1003, 1020, 1037, 1074, 1082, 1340, 1359, 1379, 1400, 1494, 1513, 1537, 1538, 1667, 1668, 1702
- Komaruddin Hidayat, 2: 952, 1188
- Komnas Perempuan, 2: 964, 970, 1323, 1496, 1656
- Kompas*, 1: 265, 398, 416, 499, 724, 730; 2: 960, 966, 1545, 1589
- komprehensif-obyektif, 1: 360
- komunikasi rasional, 1: 380
- komunisme, 1: 494, 528, 584, 585, 598; 2: 1013, 1152, 1622
- Komunitas Eden, 1: 85, 471, 721, 750, 806; 2: 1561, 1563, 1575, 1618
- Konferensi Pekabaran Injil, 1: 355
- Konfusianisme, 1: 877; 2: 1666
- Konfusius, 1: 275, 503
- Konghucu, 1: 87, 118, 125, 126, 152, 313, 342, 503, 505, 507, 508, 646, 795; 2: 1116, 1322
- konservatif, 1: 6, 18, 41, 82, 117, 137, 147, 162, 229, 251, 278, 290, 332, 374, 440, 460, 468, 471, 472, 488, 541, 557, 616, 620, 649, 650, 697, 728, 794, 795; 2: 965, 1000, 1002, 1005, 1021, 1102, 1110, 1111, 1142, 1231, 1241, 1302, 1486, 1507, 1543, 1550, 1556, 1580, 1617, 1635, 1650, 1665, 1678, 1693, 1696, 1701, 1702, 1703, 1723, 1725, 1756, 1759, 1762
- konservatisme, 1: 157, 158, 193, 491, 616, 762, 831
- Konsili Nicea, 2: 1706, 1712
- Konsili Vatikan I, 1: 659
- Konsili Vatikan II, 1: 48, 91, 126, 208, 255, 276, 284, 285, 355, 484, 509, 538, 541, 564, 803, 825; 2: 1168, 1546
- konsumerisme, 1: 478, 481, 485, 542; 2: 980
- kontraproduktif, 1: 385, 389, 554, 840; 2: 1558
- Korea Selatan, 1: 518; 2: 1000, 1193, 1195
- “korporatokrasi”, 2: 1017
- korupsi, 1: 42, 47, 78, 81, 134, 145, 217, 233, 296, 390, 399, 434, 435, 450, 496, 500, 543, 584, 707; 2: 935, 953, 955, 965, 997, 1034, 1040, 1051, 1103, 1106, 1123, 1134, 1135, 1160, 1196, 1227, 1228, 1267, 1286, 1317, 1319, 1320, 1321, 1329, 1359, 1392, 1404, 1405, 1452, 1467, 1473, 1479, 1555, 1556, 1557, 1732, 1753, 1755, 1757, 1761, 1763, 1765
- kosmopolitanisme, 2: 1663, 1681
- KPI, 1: 718, 723, 725

- KPK, 2: 1135  
 Krisdayanti, 1: 70  
 Kristen, 1: 18, 34, 43, 48, 54, 63, 64, 65, 69, 76, 78, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 118, 125, 126, 136, 138, 142, 149, 152, 158, 166, 193, 194, 203, 204, 205, 207, 208, 219, 246, 269, 270, 271, 272, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 291, 294, 295, 296, 320, 321, 330, 331, 332, 334, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 347, 348, 350, 356, 357, 391, 393, 394, 404, 418, 450, 452, 473, 474, 479, 480, 481, 483, 484, 487, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 505, 507, 508, 509, 510, 516, 519, 526, 536, 537, 538, 542, 550, 563, 566, 606, 611, 612, 626, 633, 636, 638, 646, 647, 740, 744, 756, 757, 760, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 774, 775, 777, 778, 779, 782, 784, 795, 812, 821, 822, 823, 825, 827, 850, 851, 862, 872, 877, 878; 2: 891, 896, 909, 915, 916, 936, 952, 975, 991, 994, 997, 1006, 1013, 1014, 1037, 1044, 1054, 1057, 1078, 1079, 1085, 1086, 1099, 1102, 1108, 1116, 1117, 1126, 1150, 1151, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1179, 1218, 1247, 1262, 1266, 1282, 1293, 1298, 1301, 1303, 1306, 1322, 1326, 1329, 1360, 1362, 1380, 1383, 1392, 1393, 1394, 1397, 1400, 1406, 1408, 1411, 1412, 1418, 1427, 1428, 1431, 1438, 1449, 1470, 1478, 1480, 1486, 1497, 1504, 1588, 1595, 1598, 1619, 1632, 1634, 1703, 1713, 1714, 1715, 1721, 1722, 1724, 1725, 1748, 1757, 1761, 1762, 1764, 1768  
 Kristenisasi, 1: 10, 321, 774; 2: 1086, 1478, 1722  
 Kristiani, 1: 10, 18, 216, 290, 294, 330, 372, 382, 393, 496, 525, 536, 539, 659, 734, 767, 825, 876; 2: 888, 908, 914, 1014, 1015, 1066, 1160, 1171, 1438, 1614, 1615, 1617, 1618, 1634, 1637, 1692, 1712, 1757  
 tradisi—, 2: 1066  
 Kroasia, 1: 518  
 kuantitatif-eksistensial, 1: 360  
 Kudus, 2: 1092, 1093  
 Kufah, 1: 551, 552, 694  
 Kuhn, Thomas, 1: 107  
 KUHP, 1: 39, 85, 86, 88, 145, 718; 2: 1281, 1361, 1370, 1534, 1605, 1613, 1633, 1750  
*kulliyât al-khamsah, al-*, 2: 952, 955, 1409  
 Kung, Hans, 1: 268, 272, 283, 285  
 Kuntowijoyo, 1: 277; 2: 1611  
 Kupang, 2: 1119  
 Kuwait, 1: 70; 2: 1007, 1303, 1306  
 Kuyper, Abraham, 1: 265, 268, 270, 275
- L**  
 label syariah, 1: 162, 241, 245; 2: 1670, 1671, 1687  
 Laclau, Ernesto, 2: 1603  
 laicitî, 1: 514, 516, 578; 2: 992, 1534, 1536  
*laissez faire*, 1: 395, 397; 2: 1020  
 Laskar Jihad, 1: 201, 850  
 Laurent, Sophia, 1: 523  
*law enforcement*, 1: 156; 2: 1543, 1565, 1674  
 LDII, 2: 1280  
 Lee Kuan Yew, 1: 502, 504; 2: 1009  
*legal pluralism*, 2: 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1457, 1545  
 Leibniz, 2: 1317



## Membela Kebebasan Beragama

- Lembaga Survei Indonesia, 1: 22, 615  
Levinas, 1: 667, 668  
Lewis, Bernard, 1: 611  
Lia Aminuddin (Lia Eden), 1: 24, 25, 47,  
88, 179, 180, 205, 230, 343, 565,  
641, 642, 644, 648, 707, 721, 752,  
771, 861, 862, 863, 866; 2: 1039,  
1056, 1082, 1159, 1173, 1502,  
1504, 1560, 1561, 1575, 1582,  
1708, 1710, 1744, 1749, 1768  
Libanon, 1: 828; 2: 1236, 1455  
*liberal fundamentalism*, 2: 1494, 1499  
*liberal mind*, 1: 569, 579, 580, 587  
*liberal rights*, 2: 1684  
*liberal thinking*, 2: 959, 960, 961  
liberalisasi, 1: 6, 18, 45, 66, 68, 139, 306,  
415, 419, 421, 764, 844, 845, 847;  
2: 1177, 1344, 1491, 1493, 1494,  
1496, 1576  
liberalisme, 1: 3, 4, 13, 18, 19, 20, 23,  
27, 28, 40, 41, 44, 61, 63, 66, 68,  
104, 113, 131, 137, 138, 153, 154,  
161, 162, 163, 164, 165, 175, 178,  
224, 225, 226, 246, 247, 253, 259,  
272, 289, 293, 294, 297, 299, 301,  
304, 305, 306, 325, 336, 337, 367,  
369, 370, 371, 373, 374, 377, 379,  
381, 383, 384, 387, 419, 439, 440,  
446, 447, 453, 454, 455, 456, 460,  
470, 477, 493, 494, 495, 496, 497,  
501, 502, 504, 513, 523, 524, 525,  
526, 527, 531, 533, 542, 545, 558,  
559, 560, 561, 563, 570, 573, 578,  
583, 618, 619, 620, 622, 623, 630,  
635, 636, 641, 644, 645, 646, 657,  
660, 661, 663, 689, 716, 717, 721,  
722, 723, 724, 725, 761, 764, 777,  
782, 785, 794, 795, 797, 799, 817,  
821, 824, 831, 832, 844, 847, 856,  
857, 859, 860, 870, 879, 881, 882;  
2: 886, 887, 891, 895, 896, 897, 898,  
902, 903, 906, 913, 924, 959, 960,  
961, 979, 1000, 1001, 1002, 1003,  
1009, 1011, 1012, 1013, 1014,  
1018, 1020, 1026, 1029, 1036,  
1037, 1039, 1048, 1051, 1055,  
1073, 1074, 1075, 1077, 1103,  
1104, 1105, 1111, 1120, 1131,  
1133, 1137, 1138, 1149, 1154,  
1155, 1156, 1177, 1179, 1183,  
1184, 1210, 1211, 1213, 1221,  
1222, 1227, 1232, 1239, 1240,  
1245, 1276, 1290, 1300, 1315,  
1321, 1324, 1325, 1327, 1337,  
1341, 1342, 1343, 1344, 1358,  
1375, 1376, 1377, 1378, 1379,  
1380, 1400, 1430, 1431, 1448,  
1458, 1467, 1471, 1475, 1476,  
1479, 1480, 1481, 1487, 1492,  
1493, 1494, 1495, 1496, 1506,  
1512, 1513, 1514, 1517, 1525,  
1532, 1541, 1550, 1551, 1558,  
1559, 1561, 1562, 1563, 1575,  
1576, 1577, 1578, 1588, 1595,  
1609, 1613, 1617, 1620, 1623,  
1624, 1625, 1626, 1631, 1632,  
1651, 1664, 1677, 1687, 1692,  
1701, 1702, 1703, 1717, 1723,  
1736, 1737, 1738, 1739, 1762  
—agama, 1: 325, 329, 336, 353  
—ekonomi, 1: 306, 439, 470, 523,  
524; 2: 897, 924, 959, 960, 979,  
1337, 1343, 1344, 1379  
Liga Arab, 2: 1061  
Lijphart, Arend, 1: 745  
Lindholm, Tore, 2: 1550  
*linear decline*, 2: 1025, 1028  
Little, David, 1: 266  
Liu, Lucy, 1: 586  
*local democracy*, 2: 1737  
*local wisdom*, 1: 123, 804; 2: 986, 1092,  
1602  
Locke, John, 1: 66, 525; 2: 1024, 1647  
Lombard, Denis, 2: 1538, 1539

- Lombok, 1: 148, 233, 344; 2: 1044, 1326  
 Lomdom School of Economic, 2: 1157  
 Long, Jeffrey D., 1: 821  
 Lopez, Jennifer, 1: 586  
 LP3ES, 1: 423  
 LSAF, 1: 69; 2: 1439  
 LSM plat merah, 1: 81  
 Lubarsky, Sandra B., 1: 821  
 Luhmann, Niklas, 1: 390  
 Luther, Martin, 1: 271, 282, 330, 332, 337, 338, 379, 600, 768; 2: 959, 1157, 1158, 1161  
 Lutheran (reformasi), 1: 271, 338; 2: 1157  
 Lybia, 1: 299
- M**
- M. Chatib Basri, 2: 1630  
 M. Dawam Rahardjo 1: 278, 417, 478, 489, 490, 502, 503, 815, 816, 817, 820, 866; 2: 1081, 1173, 1310, 1553, 1557, 1736, 1754  
 M. Hatta (Bung Hatta), 1: 63, 117, 212, 213, 277, 278, 300, 418, 503, 623; 2: 1021, 1040, 1091  
 M. Natsir, 1: 176, 177, 212, 213, 216, 220, 222, 276, 277, 623, 738; 2: 957, 999, 1019, 1020, 1021, 1069, 1236  
 M. Rasyidi, 1: 5; 2: 1048  
 M.M. Billah, 2: 1605  
 Ma'ruf Amin, 1: 7, 863; 2: 1104, 1105, 1110, 1378, 1702, 1703  
 MADIA, 1: 877  
 Madinah, 1: 14, 73, 74, 75, 85, 91, 92, 96, 143, 174, 238, 249, 297, 429, 432, 463, 464, 469, 551, 552, 678, 685, 686, 694, 709, 712, 827, 828, 851, 859; 2: 888, 890, 891, 906, 1098, 1099, 1100, 1126, 1127, 1144, 1175, 1182, 1232, 1238, 1251, 1253, 1255, 1261, 1287, 1300, 1392, 1394, 1397, 1406, 1407, 1411, 1413, 1479, 1480, 1570, 1695, 1696, 1697, 1707, 1715, 1729, 1730, 1733, 1748  
 Madura, 1: 38, 56, 67, 227, 843; 2: 1737  
 Magelang, 1: 505, 508  
 Mahatir Muhammad, 2: 1008  
 Mahfud Anwar, KH., 2: 973  
 Mahkamah Agung, 1: 134, 627, 753, 848  
 Mahkamah Tinggi Syariah, 1: 806  
 Mahmakah Konstitusi (MK), 1: 71, 84, 85, 147; 2: 1498, 1499, 1721  
 Mahmud Ayyub, 1: 408  
 Mahmud Shalthout, 1: 174; 2: 1713  
 Mahmud Thaha, 1: 870  
 Majalengka, 2: 1119, 1719  
 Majelis Tarjih Muhammadiyah, 1: 126  
*majority rule*, 2: 1456  
 Majusi, 2: 914, 1396, 1411, 1634  
 Makassar, 1: 843; 2: 1222, 1223, 1233, 1234, 1249, 1504, 1598  
 Maksum Ali (Kiai), 2: 974  
 Malay Moslem, 2: 1537, 1538  
 Malaysia, 1: 63, 80, 81, 98, 153, 158, 168, 240, 246, 446, 482, 487, 501, 503, 506, 533, 582, 621, 622, 836, 842; 2: 890, 1006, 1007, 1019, 1052, 1165, 1199, 1224, 1226, 1271, 1273, 1303, 1323, 1461, 1535, 1538, 1573  
 Malik ibn Anas (Imam Malik), 1: 305, 430, 693, 694; 2: 1178, 1182  
 Maliki (mazhab), 1: 695; 2: 972, 1013, 1477  
 Mangun (Romo), 1: 667; 2: 1304, 1599, 1601  
 Manokwari, 1: 259, 280, 281, 774, 793, 847; 2: 1173, 1558  
*mansùkh*, 1: 241, 702; 2: 1714  
 Mansur, al- (khalifah), 1: 430, 469, 693; 2: 1182  
*manthiq*, 2: 1229, 1230, 1391, 1397, 1411

## Membela Kebebasan Beragama

- maqâshid al-syarî'ah*, 1: 45, 434, 455, 470; 2: 1083, 1086, 1097, 1125, 1126, 1135, 1136, 1145, 1390, 1403, 1404, 1405, 1731
- marginalisasi sosial, 1: 379
- Mariah al-Qibthiyyah, 2: 1393
- Maroko, 1: 269, 621, 624, 851; 2: 909, 1016, 1168, 1291, 1394
- Martin, David, 2: 1157
- Marxis, 2: 998, 1153, 1154, 1167, 1299, 1642, 1643, 1649
- Marxisme, 1: 528, 529, 575, 657; 2: 898, 899, 1009, 1152, 1299, 1300, 1642, 1651
- Masdar F. Mas'udi, 1: 99, 1719
- mashlahah al-âmmah, al-*, 1: 51; 2: 1097, 1727, 1747
- Masyumi, 1: 12, 219, 220, 319, 320, 321, 402, 503, 533, 534, 649
- materialisme, 1: 368; 2: 980, 1068
- Matra* (majalah), 1: 717
- Maturidiyah, 1: 868; 2: 1554
- Maududi, al-, 1: 67, 68; 2: 999, 1271, 1693
- Mawardi, al-, 1: 13; 2: 838, 1503
- mazhab fikih, 1: 79, 825, 865, 866; 2: 983, 1230, 1338
- McDonald, 1: 413; 2: 980
- McDonaldization, 1: 413
- McIntosh, 2: 1642, 1643
- McIntyre, Alasdair, 1: 370
- MDG's (Millenium Development Goal's), 1: 587, 588
- media watch*, 1: 728, 729
- Megawati, 1: 581; 2: 933, 1088, 1323
- Mekah, 1: 92, 143, 297, 299, 437, 444, 712, 834; 2: 1053, 1111, 1390, 1397, 1402, 1407, 1408, 1411, 1667, 1712
- Meksiko, 1: 618
- Merauke, 2: 943
- Merkel, Angela, 1: 498
- Mesir, 1: 228, 296, 306, 307, 432, 433, 694, 768; 2: 890, 909, 1016, 1075, 1308, 1392, 1393, 1394, 1395, 1443, 1491, 1580, 1718, 1732
- Mill, John Stuart, 1: 619
- millah* Ibarhim, 2: 915
- Miller, Robert J., 1: 768
- Minangkabau, 1: 507; 2: 1002
- minimal state*, 1: 20; 2: 1512
- minimum state*, 1: 497
- minority complex*, 1: 341, 363; 2: 934
- minority protection*, 2: 1456
- minus malum*, 1: 667
- misoginis, 1: 237, 245, 573, 698; 2: 973, 975, 1487, 1488
- mistisisme, 1: 592, 824, 827; 2: 1230
- MMI, 1: 80, 83, 153, 850; 2: 1084, 1115, 1422, 1425, 1532
- mobilisasi sosial, 2: 1153, 1159
- moderat secularism*, 2: 1669
- moderating effect*, 2: 1449, 1461
- Moehammad Natsir, 2: 1019, 1021
- Moh. Rajab Thayyib Erdogan, 1: 132
- money politic*, 1: 184
- monisme, 1: 26, 166, 229, 394, 398, 541, 802, 818, 819, 820, 851; 2: 1197, 1522, 1594, 1741, 1742, 1743, 1744
- Monitor* (Tabloid), 2: 1370
- monoteisme, 2: 95, 278, 680, 844, 847; 2: 1168, 1480
- Monroe, Marilyn, 1: 586
- Montesquieu, 2: 1317
- moral argument*, 1: 281
- moral decadence*, 2: 1207
- moral handicap*, 2: 1018
- moral judgement*, 1: 669
- moral obstacle*, 2: 1018
- moral pluralism*, 2: 1457
- moral revivalism*, 1: 844
- Mormon, 1: 847
- MPR, 1: 147, 282, 616; 2: 996, 1438, 1598

- mu'âmalah*, 1: 202; 2: 1266, 1754  
 Mu'tasim Billah, al-, 1: 694  
 Mu'tazilah, 1: 86, 113, 247, 493, 550, 564, 694, 696; 2: 917, 1107, 1182, 1248, 1249, 1391, 1394, 1395, 1397, 1401, 1411, 1554, 1578, 1704, 1709, 1732  
 Muawiyah, 1: 143, 551, 552, 607; 2: 1288, 1410, 1693, 1695, 1728, 1737  
 Mudji Sutrisno (Romo), 2: 952, 1601  
 Muhajirin (kaum), 2: 1392, 1414  
 Muhammad Abduh, 1: 68, 71, 306, 431, 696, 697, 818; 2: 1001, 1002, 1019, 1020, 1700  
 Muhammad Ali (petinju legendaris), 1: 642  
 Muhammad Assad, 1: 173  
 Muhammad ibn Abdul Wahhab, 1: 696  
 Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, 1: 708  
 Muhammad Imarah, 2: 1272, 1278  
 Muhammad Salim al-Awwa, 2: 1285, 1288  
 Muhammad Thahir bin 'Asyur, 2: 1731  
 Muhammad Yunus, 1: 70, 585; 2: 1160  
 Muhammadiyah, 1: 60, 64, 65, 71, 80, 83, 84, 90, 101, 112, 119, 121, 126, 132, 156, 228, 317, 320, 417, 420, 427, 448, 449, 560, 566, 567, 614, 616, 617, 643, 644, 649, 650, 796, 797; 2: 910, 928, 933, 1167, 1222, 1234, 1280, 1282, 1290, 1292, 1307, 1320, 1373, 1394, 1414, 1686, 1730, 1751  
 MUI, 1: 7, 46, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 100, 119, 132, 146, 147, 148, 153, 162, 163, 164, 165, 167, 206, 262, 283, 301, 311, 312, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 391, 392, 393, 403, 405, 414, 426, 427, 428, 439, 443, 445, 452, 453, 455, 456, 460, 471, 472, 473, 560, 561, 592, 593, 619, 630, 632, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 709, 710, 725, 777, 788, 794, 795, 799, 800, 801, 806, 807, 812, 815, 846, 851, 856, 871, 872, 882, 886; 2: 910, 913, 941, 982, 1024, 1026, 1036, 1037, 1043, 1048, 1055, 1056, 1058, 1062, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1083, 1087, 1088, 1102, 1103, 1106, 1107, 1118, 1119, 1138, 1145, 1164, 1166, 1167, 1176, 1222, 1229, 1239, 1243, 1263, 1264, 1265, 1266, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1289, 1290, 1291, 1293, 1301, 1307, 1308, 1313, 1357, 1358, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370, 1373, 1376, 1379, 1476, 1477, 1487, 1492, 1493, 1495, 1496, 1501, 1532, 1542, 1550, 1551, 1559, 1569, 1574, 1575, 1579, 1581, 1582, 1583, 1588, 1599, 1606, 1619, 1633, 1664, 1702, 1731, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1749, 1750  
 fatwa—, 1: 83, 100, 206, 311, 350, 427, 453, 456, 471, 473, 640, 641, 643, 777; 2: 1077, 1081, 1083, 1087, 1088, 1145, 1276, 1283, 1290, 1357, 1367, 1369, 1477, 1501, 1550, 1551, 1569, 1575, 1583, 1588, 1741, 1742, 1743, 1744  
 MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura), 1: 167  
*mujâhadah*, 2: 1123, 1299  
 mujtahid, 1: 305, 310, 696, 699; 2: 1401, 1402  
 Mukhairiq, 1: 91, 92, 876  
 Mukti Ali, 1: 318, 319; 2: 1266, 1599  
*multicultural act*, 1: 167  
*multicultural policy*, 1: 167

## Membela Kebebasan Beragama

- multikulturalisme, 1: 62, 71, 381, 382, 507, 670; 2: 1080, 1187, 1195, 1198, 1216, 1217, 1397, 1413, 1449, 1460, 1491, 1505, 1525, 1526, 1545, 1563, 1602, 1603, 1673, 1674, 1680, 1681, 1744, 1746
- multiple affiliation*, 2: 1663, 1675, 1676
- multiple identity*, 2: 1676
- Munawir Syadzali, 1: 214
- muqallid*, 1: 305
- Murray, John Courtney, 1: 268, 269, 270, 271, 276
- Musa (Nabi), 1: 95; 2: 1098, 1448
- Mushadeq, 2: 1281, 1291, 1309, 1560, 1561, 1749, 1768, 1769
- Muslim Abdurrahman, 1: 534
- Mustafa Kemal, 1: 196, 610, 630; 2: 992, 1693
- Mustasyfâ, al-*, 1: 683
- Musthofa Bisri (Gus Mus), 1: 162, 427
- mutawâthir*, 1: 108, 110, 116, 121, 123
- Muwaththa', al-*, 1: 430, 469, 693
- My Forbidden Face*, 1: 881
- ## N
- Naguib al-Attas, 1: 5
- nahy munkar*, 1: 241, 866; 2: 892, 965, 976, 977, 1067, 1403
- naked public square*, 1: 263, 272
- Nash, Manning, 2: 1273
- nâsikh*, 1: 241
- Nasr Hamid Abud Zayd, 1: 626; 2: 1277, 1278, 1718
- Nasr, S.H., 2: 1339
- Nasrani, 1: 35, 36, 91, 93, 125, 126, 255, 313, 320, 647, 681, 768, 865, 875, 876, 878; 2: 908, 1015, 1113, 1177, 1238, 1704, 1705, 1707, 1716
- Natal, 2: 1158, 1599, 1606
- nation building*, 1: 1206, 1663, 1674, 1675, 1676, 1679, 1680, 1681
- National Guard*, 2: 1457
- National University of Singapore (NUS), 1: 159
- natural liberty*, 1: 384
- natural religion*, 1: 269
- Nawal El-Sadawi, 2: 1491
- Nawawi al-Bantani, 1: 94, 95
- Nazi, 1: 499, 530; 2: 901, 995, 1257
- Nazisme, 1: 409
- Negara Madinah, 1: 14, 174, 678, 709; 2: 1099, 1182, 1251, 1253, 1255, 1261, 1392, 1480, 1696, 1697
- negative immunity*, 1: 266, 267, 273, 279
- negative theology*, 2: 1162
- Nehru, 1: 228, 624
- nemesisi of power*, 1: 1606
- neo-konservatif, 1: 374
- neo-liberalisme, 1: 470, 494; 2: 1337, 1343, 1344
- neopositivisme, 1: 61
- Nestorian, 1: 94
- Neuhaus, John Richard, 1: 263, 272
- New Age, 1: 761, 779
- New York, 1: 114, 150; 2: 972, 1647
- New York Times*, 2: 1758
- New Zealand, 2: 1317, 1318, 1319, 1680
- Nicholls, John, 1: 275
- Nicholson, 1: 608
- nihilisme, 2: 911, 918, 1469, 1478
- NII, 1: 553
- nilai-nilai universal, 1: 39, 150, 376, 379, 540, 633, 634, 635, 637, 638, 649; 2: 929, 933, 956, 986, 1021, 1101, 1126, 1127, 1137, 1274, 1275, 1506, 1556, 1640
- Nizham al-Mulk, 1: 1709
- NKRI, 1: 87, 220, 259, 638, 750; 2: 1125, 1132, 1143, 1144, 1333, 1345, 1347, 1751
- non-derogable rights*, 1: 167, 267, 273
- Norris, 1: 741, 742, 743, 744; 2: 1428

- NTT, 1: 204
- NU, 1: 38, 60, 64, 65, 71, 77, 80, 81, 83, 84, 90, 98, 112, 119, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 156, 157, 228, 320, 402, 420, 427, 439, 448, 449, 451, 508, 535, 560, 566, 567, 614, 616, 643, 644, 649, 650, 696, 794, 795, 796, 797, 850; 2: 910, 928, 933, 972, 975, 1096, 1132, 1133, 1138, 1184, 1280, 1282, 1290, 1292, 1307, 1320, 1394, 1399, 1407, 1412, 1413, 1414, 1676, 1686, 1719, 1730, 1751
- numinosum*, 1: 760
- Nurcholish Madjid (Cak Nur), 1: 4, 5, 16, 32, 70, 77, 87, 138, 222, 229, 262, 265, 280, 328, 402, 403, 420, 507, 525, 596, 599, 615, 631, 734, 790, 807, 833, 857, 881; 2: 990, 991, 1001, 1002, 1048, 1076, 1077, 1079, 1085, 1087, 1108, 1151, 1224, 1239, 1246, 1291, 1310, 1484, 1510, 1552, 1557, 1624, 1635, 1664, 1719
- Nurcholish Madjid Memorial Lecture, 1: 881
- Nuruddin Ar-Raniri, 1: 60
- Nusa Tenggara Barat (NTB), 1: 364; 2: 985, 1719
- Nusantara, 1: 592; 2: 1091, 1092
- nuzûl al-Qur'ân*, 1: 612, 614; 2: 1015
- Nyepi (hari), 1: 847
- O**
- Obama, Barack, 2: 1298
- objektivikasi, 1: 77; 2: 1365
- official religion*, 1: 744, 745
- Ohio University, 1: 176, 185
- Oman, 1: 296, 487
- ontologi, 2: 1336
- option for the poor*, 1: 662
- Opus Dei, 1: 484
- Orde Baru, 1: 66, 78, 86, 87, 98, 100, 118, 119, 124, 147, 152, 215, 225, 319, 321, 348, 358, 359, 386, 413, 415, 427, 471, 565, 575, 614, 626, 636, 649, 670, 718, 722, 795, 804; 2: 924, 926, 930, 932, 933, 940, 942, 943, 944, 1091, 1193, 1196, 1198, 1199, 1217, 1346, 1350, 1352, 1363, 1372, 1383, 1426, 1431, 1434, 1445, 1474, 1584, 1594, 1598, 1599, 1657, 1673, 1684
- Orde Lama, 1: 71, 516; 2: 1002
- Orde Reformasi, 2: 1673
- organized religion*, 2: 1486, 1487
- ortodoksi, 1: 12, 166, 306, 616; 2: 1001, 1367
- Osama bin Laden, 1: 59; 2: 1422
- otonomi daerah, 1: 50, 228, 342, 344, 448, 449, 450, 562, 571, 572, 577, 727, 776; 2: 942, 943, 993, 1035, 1190, 1286, 1287, 1473, 1535, 1708
- otoritarianisme, 1: 6, 17, 18, 19, 24, 295, 808, 831, 832, 835, 845; 2: 1252, 1315, 1318, 1325, 1728, 1747
- otoritas keagamaan, 1: 3, 5, 6, 7, 8, 294, 330, 825; 2: 1015, 1466, 1569, 1583, 1697, 1738
- over simplified*, 2: 1523
- P**
- P3M, 1: 99; 2: 1719, 1734
- PAD, 1: 85
- Padang, 1: 200, 413, 638, 843
- Paderi (perang), 1: 46, 419
- PAKEM, 1: 151, 152, 165, 616, 617, 794, 795; 2: 1154, 1167, 1311, 1312, 1367, 1371, 1372, 1534, 1575
- Pakistan, 1: 15, 62, 70, 216, 276, 277, 296, 298, 299, 323, 533, 605, 621, 851; 2: 890, 909, 941, 950, 1271, 1443, 1516, 1576, 1693
- Palestina, 1: 164, 166, 216, 299, 426, 432, 486; 2: 916, 1044, 1061, 1394
- PAN, 1: 242, 535, 996, 1167, 1425

## Membela Kebebasan Beragama

- Pancasila, 1: 3, 15, 17, 22, 23, 27, 34, 45, 54, 55, 58, 62, 64, 76, 77, 79, 87, 92, 171, 176, 216, 223, 234, 239, 240, 243, 255, 259, 261, 266, 267, 269, 272, 274, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 311, 381, 382, 401, 412, 413, 415, 416, 471, 472, 503, 522, 529, 530, 531, 547, 557, 558, 575, 585, 612, 613, 614, 629, 634, 635, 636, 637, 639, 641, 649, 664, 719, 755, 763, 764, 767, 769, 776, 799, 869, 870; 2: 894, 899, 900, 923, 925, 926, 954, 991, 992, 1020, 1021, 1034, 1040, 1041, 1047, 1053, 1054, 1062, 1065, 1072, 1073, 1077, 1087, 1091, 1102, 1121, 1125, 1131, 1132, 1133, 1142, 1143, 1144, 1149, 1173, 1190, 1193, 1194, 1261, 1270, 1273, 1289, 1316, 1333, 1343, 1349, 1350, 1389, 1413, 1414, 1419, 1420, 1434, 1435, 1458, 1479, 1480, 1500, 1531, 1533, 1534, 1535, 1540, 1558, 1565, 1573, 1594, 1604, 1652, 1668, 1675, 1679, 1680, 1682, 1706, 1707, 1708, 1750
- Pan-Islamisme, 1: 35, 218, 221
- Papua, 1: 101, 627, 638, 774, 883; 2: 942, 1203, 1261, 1630
- Parakitri, 2: 1606
- Paramadina, 1: 67, 273, 857, 869, 877; 2: 1721, 1724
- Paris, 2: 1611, 1619
- Parkindo, 1: 533
- parliament watch*, 2: 1512
- Parsons, Talcott, 1: 657
- Partai Islam, 1: 22, 117, 132, 219, 220, 242, 402, 408, 414, 517, 534, 535, 637, 649, 650, 744, 798, 844; 2: 996, 997, 1122, 1320, 1321, 1363, 1444, 1447, 1472, 1611, 1664
- Partai Katolik, 1: 132, 480, 481, 533
- Partai Kristen Demokrat, 1: 142, 246, 744; 2: 994, 997
- Paskah (hari), 2: 1606
- passing over*, 2: 1683
- patriarkhal, 1: 573
- Paul II, John, 1: 825
- Paus Benediktus XVI, 1: 509
- Paus Johannes Paulus II, 1: 483, 496
- Paus Paulus II, 1: 825
- PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), 2: 1031
- PDIP, 1: 219, 242, 613, 644; 2: 1359, 1363, 1434
- peaceful co-existence*, 2: 981
- Pelita* (harian), 1: 416
- Pemberontakan para petani di Banten, 1: 412
- Pemilu 2009, 1: 642, 643; 2: 1140
- Pensylvania, 1: 847
- Pentakosta, 2: 1153
- Pepsi Cola, 2: 980
- Peradilan Agama, 1: 214, 227
- Perang Dingin, 1: 220
- Perang Dunia I, 1: 246, 499
- Perang Dunia II, 1: 409, 497, 529; 2: 1677
- Perang Salib, 1: 93
- Perda Antimaksiat, 1: 848
- Perda Hindu, 1: 638, 847
- Perda Injil, 1: 280, 281, 638, 793, 847; 2: 1558
- Perda Syariah, 1: 21, 35, 36, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 100, 117, 134, 141, 147, 148, 163, 181, 199, 200, 201, 226, 227, 228, 244, 281, 309, 323, 341, 342, 343, 344, 346, 362, 403, 418, 425, 434, 435, 447, 448, 449, 450, 464, 466, 498, 613, 614, 634, 635, 637, 638, 643, 675, 698, 699, 700, 750, 753, 792, 793, 799, 805, 806,

- 841, 843, 844, 846, 847, 848, 864,  
865, 866; 2: 964, 965, 971, 1021,  
1032, 1035, 1047, 1053, 1054, 1090,  
1100, 1101, 1121, 1122, 1136, 1171,  
1209, 1257, 1274, 1285, 1286, 1287,  
1302, 1303, 1304, 1344, 1346, 1359,  
1361, 1363, 1374, 1402, 1404, 1420,  
1433, 1434, 1435, 1451, 1452, 1453,  
1454, 1455, 1460, 1461, 1473, 1474,  
1496, 1499, 1500, 1511, 1512, 1540,  
1557, 1558, 1571, 1572, 1573, 1656,  
1663, 1671, 1675, 1687, 1708, 1734,  
1735, 1739, 1740
- Perjanjian Baru, 1: 768, 769; 2: 1715
- Perjanjian Lama, 1: 757, 760, 768
- Persatuan Ulama Seluruh Aceh, 1: 419
- Persia, 1: 62, 93, 248, 552, 708; 2: 1391,  
1406, 1407, 1634
- Persis, 1: 79, 317, 344, 381, 417, 643,  
802, 806; 2: 938, 1320, 1367
- PETA, 1: 1667
- PGI, 1: 282, 283, 338, 774, 826; 2: 1599
- phallocentris*, 1: 573; 2: 1487, 1488
- Philips, Anne, 2: 1646, 1648
- Phillips, 2: 1648, 1649
- Phytagoras, 1: 69
- Piagam Jakarta, 1: 62, 76, 132, 147, 148,  
176, 185, 241, 277, 278, 341, 418,  
463, 637, 859; 2: 923, 928, 929, 931,  
996, 1132, 1133, 1272, 1303, 1414,  
1500, 1572, 1667, 1668
- Piagam Madinah, 1: 14, 73, 74, 75, 91,  
92, 463, 464, 469, 678, 859; 2: 1098,  
1099, 1100, 1126, 1175, 1182,  
1287, 1413, 1729, 1730, 1733, 1748
- PKB, 1: 157, 158, 242, 249, 250; 2:  
1425
- PKI, 1: 152, 387; 2: 1598
- PKNU, 1: 158
- PKS, 1: 71, 157, 164, 250, 281, 549,  
744; 2: 995, 996, 997, 1218, 1287,  
1359, 1363, 1423, 1425, 1533, 1655
- Plato, 1: 608, 819; 2: 1104, 1397, 1411
- Playboy*, 1: 716, 717, 718, 719, 727, 807
- Plotinus, 2: 1397, 1411
- pluralisme, 1: 3, 4, 8, 15, 17, 23, 24, 26,  
27, 40, 46, 47, 48, 49, 70, 89, 90, 97,  
98, 99, 100, 104, 106, 113, 119, 120,  
121, 125, 139, 153, 163, 164, 165,  
166, 167, 168, 185, 186, 187, 197,  
206, 207, 226, 228, 229, 230, 231,  
234, 253, 254, 255, 272, 273, 283,  
284, 285, 286, 289, 293, 294, 297,  
307, 309, 311, 312, 315, 318, 325,  
332, 333, 337, 344, 346, 349, 350,  
351, 352, 353, 354, 355, 357, 358,  
359, 360, 361, 364, 365, 367, 369,  
370, 375, 376, 377, 380, 381, 389,  
391, 392, 393, 394, 395, 397, 398,  
399, 411, 417, 427, 450, 451, 452,  
453, 454, 455, 456, 460, 464, 473,  
474, 505, 507, 509, 510, 535, 536,  
537, 538, 542, 563, 564, 567, 575,  
590, 591, 592, 624, 625, 626, 630,  
646, 647, 648, 650, 651, 653, 667,  
668, 670, 671, 679, 699, 704, 705,  
706, 710, 715, 726, 727, 728, 729,  
730, 733, 737, 740, 750, 751, 755,  
776, 777, 778, 779, 781, 782, 785,  
791, 794, 801, 802, 803, 804, 805,  
806, 807, 809, 811, 812, 813, 814,  
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,  
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828,  
829, 832, 849, 850, 851, 852, 855,  
856, 863, 867, 870, 871, 872, 878,  
879, 881, 882; 2: 886, 887, 897, 909,  
913, 914, 915, 918, 929, 941, 942,  
943, 959, 960, 963, 981, 982, 984,  
985, 1001, 1004, 1009, 1011, 1012,  
1013, 1014, 1016, 1018, 1026, 1040,  
1041, 1048, 1055, 1057, 1058, 1061,  
1062, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,



## Membela Kebebasan Beragama

- 1082, 1083, 1087, 1095, 1102, 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1123, 1143, 1144, 1145, 1155, 1159, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1176, 1177, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184, 1187, 1195, 1197, 1198, 1201, 1205, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1222, 1229, 1232, 1239, 1243, 1244, 1245, 1259, 1263, 1264, 1265, 1276, 1277, 1278, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1307, 1315, 1323, 1325, 1326, 1327, 1339, 1347, 1350, 1351, 1352, 1358, 1361, 1373, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1417, 1419, 1437, 1438, 1455, 1469, 1470, 1471, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1493, 1500, 1501, 1504, 1505, 1506, 1515, 1519, 1520, 1524, 1525, 1526, 1531, 1537, 1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1557, 1559, 1562, 1563, 1581, 1582, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1606, 1607, 1619, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1651, 1658, 1660, 1661, 1664, 1672, 1682, 1687, 1710, 1711, 1717, 1723, 1730, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1754, 1756, 1765, 1767, 1768  
—agama, 1: 285, 318, 332, 344, 346, 357, 360, 537, 812, 815, 816, 820; 2: 1307, 1470, 1756, 1767  
—sosial, 1: 815; 2: 1756  
*pluralist indifferent*, 1: 272  
PMII, 1: 617  
PMKRI, 1: 71  
PNI, 1: 320  
PNS, 1: 79, 148; 2: 1122  
Polandia, 1: 518, 577; 2: 1150  
Polanyi, Michael, 1: 263  
polisemik, 2: 1516  
politeisme, 1: 802, 844, 847  
*political capital*, 1: 835, 836, 842, 843, 844  
*political engagement*, 1: 798  
*political influence*, 1: 600  
*political pluralism*, 1: 814, 815, 820  
*political recognition*, 1: 207, 814; 2: 1599, 1600, 1603  
*political revivalism*, 1: 843  
*political rights*, 1: 20, 181, 569, 572, 573, 580, 581, 582, 583, 746; 2: 975, 976, 1077, 1211, 1344, 1599  
*political society*, 1: 274; 2: 1149, 1152, 1734  
*politiconomic*, 2: 1030  
politisasi syariah, 2: 1090, 1572  
Pondok Seblak, 2: 974  
Ponte, Carlo, 1: 523  
Popper, Karl, 1: 819  
*positive discrimination*, 2: 978  
*positive immunity*, 1: 267, 273  
positivisme, 1: 61; 2: 990, 1553  
posmodernisme, 1: 392; 2: 1298, 1299, 1579  
Posporius, 1: 689  
pos-sekular, 1: 377, 380  
Posten, Jyllan, 1: 43, 329, 482, 517  
PPIM, 1: 407, 555, 790, 798, 801, 808, 809  
PPKI, 1: 410; 2: 1667  
PPP, 1: 71, 535; 2: 996, 1359, 1363, 1423, 1425  
Prancis, 1: 10, 24, 77, 135, 142, 194, 264, 290, 304, 368, 369, 405, 421, 480, 485, 493, 494, 497, 500, 506, 514, 515, 516, 517, 518, 578, 593, 596, 597, 609, 610, 621, 669, 744, 745, 759, 790, 856, 861, 876, 881, 882; 2: 992, 1001, 1009, 1024, 1026, 1036, 1189, 1240, 1270, 1308, 1317, 1321, 1456, 1486, 1490, 1491, 1503, 1534,

- 1535, 1536, 1541, 1611, 1619, 1665,  
1672, 1693, 1700, 1723
- predatory capitalism*, 2: 1686
- “preman berjubah”, 1: 98, 179, 183, 186;  
2: 924, 1082
- prior to idea of secularization*, 2: 1025
- privatisasi agama, 1: 8, 106, 107, 172, 265,  
268, 299, 333, 334, 478, 479, 520,  
554, 655, 737, 739, 740, 791; 2:  
1018, 1027, 1028, 1067, 1096,  
1150, 1154, 1167, 1321, 1335,  
1338, 1340, 1470, 1485, 1486, 1700
- pro-domo*, 1: 391, 392, 393
- pro-existence*, 1: 268; 2: 1173, 1383, 1502,  
1503
- proses legislasi, 1: 79, 374; 2: 1346, 1348,  
1512, 1523
- proses sosiologis, 1: 368, 369
- Protestan, 1: 57, 180, 216, 275, 282, 283,  
291, 330, 332, 338, 355, 356, 357,  
370, 392, 478, 479, 508, 515, 516,  
517, 518, 519, 525, 526, 539, 598,  
600, 601, 610, 650, 659, 745, 759,  
764, 768, 825, 826, 828, 877; 2: 1024,  
1026, 1044, 1153, 1154, 1155, 1157,  
1158, 1167, 1168, 1169, 1172, 1173,  
1271, 1316, 1328, 1665, 1666, 1685
- Protestant family value*, 2: 1534
- Protestant Reformed*, 1: 268
- Protestanisme, 1: 58, 66, 271, 337, 338,  
355, 356, 526, 527, 759; 2: 1157,  
1158, 1169, 1172
- PSI, 1: 132, 320, 503, 533, 792
- puasa, 1: 64, 91, 202, 487, 510, 528,  
563, 676; 2: 973, 998, 1007, 1117,  
1228, 1390, 1401, 1402, 1405,  
1722, 1769
- public deliberation*, 2: 1627, 1663, 1666,  
1671
- public justice*, 1: 270
- public life principles*, 2: 1680
- public reason*, 1: 49, 110, 111, 112, 386,  
390, 747; 2: 1445, 1448, 1507, 1524,  
1535, 1536, 1576, 1627, 1665
- public reasoning*, 1: 49, 110, 111, 112,  
386, 390, 747; 2: 1507, 1524, 1627
- public religion*, 1: 8, 10, 38, 109, 267,  
268, 274, 276, 277, 278, 470, 551,  
761; 2: 1018, 1338, 1340, 1458,  
1470, 1510, 1511, 1556, 1574
- puritanisme, 1: 271, 356, 392, 650
- PWI, 1: 716
- ## Q
- qâdlî al-quddlât*, 1: 294
- qânûn*, 1: 78; 2: 1134, 1336, 1453
- Qasim Amin, 1: 697; 2: 1001
- Qatar, 1: 296; 2: 1061
- qath'î*, 1: 122; 2: 934, 939, 1043, 1137,  
1390, 1401, 1402, 1544
- qishâsh*, 1: 203; 2: 1626, 1627
- Qiyadah, al-, 1: 87, 88, 616, 640, 641,  
642; 2: 1308, 1371, 1372, 1563,  
1575, 1744, 1768
- qiyâs*, 1: 455
- Qomaruddin Khan, 1: 13
- Quraish Shihab, 2: 1110, 1111, 1246,  
1248, 1580
- Qurtubi, al-, 1: 94
- ## R
- radical mainstream*, 1: 158
- radical republican*, 2: 1210
- radikalisme, 1: 80, 157, 158, 264, 265,  
271, 272, 550, 849, 850; 2: 903,  
1160, 1434, 1435, 1541, 1675,  
1688, 1732, 1738
- rahmatan li al-'âlamîn*, 1: 36, 37, 57, 59,  
113, 120, 174, 183, 306, 541, 803;  
2: 964, 965, 1029, 1078, 1122,  
1131, 1507, 1747
- Rahner, Karl, 1: 285

## Membela Kebebasan Beragama

- Ramage, Douglas E., 1: 799  
RANHAM National Committee, 2: 963  
Rasyid Ridla, 1: 13, 174, 431, 817, 818, 827; 2: 1712  
Rawls, John, 1: 25, 49, 269, 370, 527, 542, 543, 661, 662; 2: 979, 1524, 1537, 1545, 1684  
Razi, al-, 1: 13, 15, 21, 27, 90; 2: 1301  
reformasi (gerakan), 1: 306, 381; 2: 1024  
regulasi publik, 1: 385; 2: 1421  
regulasi restriktif, 1: 145  
*relatively absolute*, 2: 911, 918  
relativisme, 1: 26, 46, 47, 89, 90, 121, 122, 165, 185, 226, 229, 253, 311, 312, 313, 333, 353, 354, 355, 378, 391, 392, 473, 477, 487, 503, 507, 509, 510, 535, 536, 537, 563, 564, 590, 592, 624, 646, 671, 777, 778, 801, 814, 821; 2: 918, 941, 981, 984, 1078, 1081, 1082, 1083, 1102, 1145, 1164, 1169, 1197, 1279, 1325, 1350, 1351, 1380, 1501, 1519, 1520, 1521, 1522, 1546, 1563, 1564, 1582, 1588, 1590, 1594, 1632, 1636, 1637, 1742, 1743, 1767, 1768  
*religionomic*, 2: 1030, 1033, 1037  
*religious adherent*, 2: 1023, 1029, 1033  
*religious decline*, 1: 262  
*religious freedom*, 1: 230, 276, 806, 878; 2: 1744  
*religious intimacy*, 1: 422  
*religious pluralism*, 1: 812, 821, 814, 815, 820, 821  
*religious rights*, 1: 800  
*religious sciences*, 2: 1038  
*religious secularism*, 2: 1669  
Renaissance, 1: 58, 295; 2: 1001, 1003, 1024, 1532  
*Republika* (harian), 1: 187, 416  
revolusi filsafat, 2: 1270  
Revolusi Islam Iran, 1: 856, 861  
Revolusi Prancis, 1: 264, 506, 516, 596, 610; 2: 1665  
revolusi teknologi, 1: 1239  
*ribâ*, 1: 12, 301, 302; 2: 1284  
Ricouer, 1: 655, 656, 664, 665  
Ricouer, Paul, 1: 655  
Rieke Dyah Pitaloka, 1: 419  
Riffat Hassan, 2: 1650  
Rizieq Shihab, 1: 136  
Rodinson, Maxime, 2: 1009  
Roma Katolik, 1: 768, 851  
Romawi, 1: 93, 552; 2: 1392, 1397, 1398, 1406, 1411, 1570, 1693, 1695  
Roosevelt, Franklin Delano, 2: 1677  
Rousseau, Jean Jacques, 1: 14, 574; 2: 1002, 1008, 1647  
*rûh al-syari'ah*, 1: 12, 307, 308  
Rusia, 1: 506, 749, 768; 2: 1058, 1308, 1621, 1760  
Russell, Bertrand, 1: 601  
RUU APP, 1: 101, 243, 259, 388, 419, 491, 522, 573, 583, 718; 2: 931, 945, 970, 1142, 1143, 1379, 1500, 1655, 1708, 1722  
RUU Hak-hak Minoritas, 1: 348  
RUU KUB, 2: 1513
- ## S
- Sabah, 1: 487  
Sabi'in, 1: 647  
*Sabili*, 1: 716, 720  
Sachedina, Abdulaziz, 1: 875  
Sahrastani, al-, 2: 1709  
Said Aqiel Syiradj, 1: 709  
Saiful Mujani, 1: 567, 602  
Saksi Yehovah, 1: 281, 826  
*samḥah*, 1: 254  
SamHarris, 2: 1160  
Sandel, Michael, 1: 370  
SARA, 1: 65, 124, 319, 321, 348, 358, 359, 565, 649, 650, 670, 716, 804;

- 2: 926, 942, 1198, 1199, 1217, 1352, 1383, 1584, 1657, 1673, 1684
- Sartre, 1: 668
- Sassoon, A.S., 2: 1644
- Saudi Arabia, 1: 11, 15, 16, 246, 298, 299, 433, 487, 488, 505, 702, 767, 782; 2: 966, 1091, 1394, 1399, 1404, 1497
- Sayyed Hossein Nasr, 1: 61, 821; 2: 911, 918
- Sayyid Quthb, 1: 298, 321, 701; 2: 1009, 1271
- SBY-JK (pemerintahan), 1: 148
- Schacht, Joseph, 1: 608
- Schillebeeckx, 1: 659, 668
- Schleiermacher, 2: 1158
- scientific community*, 2: 892
- Scopes, John T., 1: 265
- Scott, James, 2: 1606
- second class citizens*, 1: 842
- secular fundamentalism*, 2: 1490, 1494, 1499
- secularization as differentiation*, 1: 262, 263
- secularization as privatization*, 1: 262
- sektarianisme, 1: 6, 24, 323
- sekularisasi, 1: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 32, 104, 132, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 161, 262, 263, 264, 265, 278, 291, 292, 293, 328, 329, 330, 367, 368, 369, 370, 379, 392, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 411, 420, 421, 427, 434, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 488, 493, 500, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 547, 548, 550, 554, 567, 600, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 645, 648, 658, 734, 735, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 779, 790, 792, 833, 837, 839, 840, 841, 857, 882; 2: 891, 892, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 932, 934, 935, 936, 939, 944, 945, 990, 991, 992, 997, 1014, 1023, 1027, 1028, 1029, 1151, 1152, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1194, 1197, 1201, 1224, 1239, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1322, 1358, 1359, 1362, 1395, 1396, 1397, 1398, 1419, 1424, 1426, 1428, 1431, 1466, 1467, 1469, 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1499, 1506, 1510, 1533, 1552, 1570, 1576, 1611, 1640, 1641, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1693, 1694, 1695, 1728, 1729, 1731, 1733
- sekularisme, 1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40, 54, 56, 58, 59, 61, 70, 74, 104, 105, 106, 107, 125, 129, 130, 132, 135, 142, 143, 151, 153, 163, 164, 165, 172, 173, 176, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 226, 242, 243, 253, 262, 263, 264, 265, 278, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 303, 304, 305, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 336, 368, 369, 371, 402, 403, 405, 408, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 470, 478, 481, 486, 514, 515, 516, 517, 548, 550, 553, 563, 567, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 590, 596, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612, 613, 625, 630, 631, 632, 635, 646, 654, 658, 660, 661, 675, 676, 677, 678, 680, 687, 716, 734, 735, 736, 737, 738, 739,

## Membela Kebebasan Beragama

- 744, 746, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 777, 782, 785, 788, 789, 792, 794, 795, 831, 832, 833, 835, 839, 844, 855, 856, 857, 870, 879, 881, 882; 2: 885, 886, 887, 888, 891, 913, 917, 924, 926, 949, 950, 951, 952, 957, 959, 960, 972, 981, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 997, 998, 1000, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1024, 1025, 1026, 1037, 1048, 1049, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1077, 1089, 1096, 1097, 1101, 1131, 1133, 1138, 1150, 1151, 1152, 1162, 1176, 1177, 1179, 1181, 1183, 1184, 1188, 1189, 1190, 1206, 1208, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1232, 1235, 1236, 1239, 1245, 1252, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1290, 1291, 1298, 1299, 1300, 1316, 1317, 1318, 1321, 1325, 1334, 1336, 1337, 1338, 1358, 1359, 1362, 1390, 1395, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1457, 1458, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1477, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1492, 1493, 1503, 1506, 1510, 1517, 1525, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537, 1541, 1543, 1545, 1550, 1551, 1552, 1570, 1575, 1588, 1609, 1610, 1611, 1618, 1619, 1620, 1621, 1646, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1687, 1691, 1692, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1705, 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1739, 1743, 1753, 1754, 1755, 1759, 1760
- sekularisme liberal, 2: 1610, 1621
- Semit (agama), 1: 120, 823, 824; 2: 1101, 1612, 1634
- Sennett, Richard, 1: 662
- separation between religion and nation*, 1: 833
- separatisme, 2: 1106, 1360
- Shabi'in, 1: 255
- shalawat badar, 1: 112
- Shiffin (perang), 1: 712
- Sikh, 1: 336, 339, 345
- silent majority*, 1: 38, 49, 156, 157; 2: 1474, 1542, 1581, 1600
- Simatupang, T.B., 1: 267, 274, 276, 277; 2: 1173
- Singapura, 1: 136, 158, 159, 167, 221, 626, 834; 2: 1008, 1009, 1304, 1430, 1432, 1535, 1538, 1666
- sinkretisme, 1: 46, 89, 119, 165, 166, 185, 197, 206, 207, 253, 272, 283, 284, 311, 312, 313, 349, 350, 351, 391, 392, 473, 474, 505, 507, 508, 535, 536, 537, 563, 590, 624, 646, 647, 668, 705, 710, 711, 777, 778, 801, 811, 814, 815, 817, 821, 822, 872; 2: 913, 914, 941, 981, 982, 1041, 1078, 1081, 1083, 1145, 1164, 1166, 1167, 1263, 1278, 1293, 1325, 1350, 1351, 1380, 1469, 1478, 1501, 1515, 1519, 1520, 1545, 1546, 1563, 1582, 1588, 1632, 1710, 1742, 1743, 1767, 1768
- sintesa eklektis, 1: 454
- Siti Jenar (Syekh), 2: 1111
- siyāsah*, 1: 13, 307, 430, 677; 2: 1336, 1503
- Sjafruddin Prawiranegara, 1: 315
- Skandinavia, 1: 9, 33, 329, 482, 518, 570, 744; 2: 1008, 1157, 1158, 1165, 1189, 1210, 1321, 1486, 1665, 1685
- Sloterdijk, Peter, 1: 377
- Smith, Adam, 1: 618; 2: 961
- Smith, Huston, 2: 1329

- social argument*, 1: 281  
*social construction*, 2: 1554  
*social contract*, 2: 1030  
*social ethicist*, 1: 286  
*social function of religion*, 2: 1028  
*social humanities*, 2: 1038  
*social responsibility*, 2: 892, 911  
*social sciences*, 2: 1037, 1038  
*social skill*, 2: 1031, 1044  
*society-state distinction*, 1: 270  
*sociological pluralism*, 1: 820  
Socrates, 1: 689; 2: 1397, 1411  
Soeharto 86, 89, 98, 132, 146, 198, 221, 223, 272, 279, 359, 423, 503, 607, 614, 726, 727, 728, 764, 775, 843, 880; 2: 932, 933, 1240, 1322, 1432, 1598, 1657, 1757, 1764  
Soekarno (Bung Karno), 1: 63, 168, 212, 223, 228, 267, 276, 277, 278, 279, 320, 407, 496, 503, 534, 611, 717, 722; 2: 1072, 1133, 1323, 1325, 1431, 1670, 1694  
*soft state*, 1: 532  
sosialisme, 1: 68, 70, 277, 320, 493, 494, 623; 2: 898, 899, 900, 1009, 1019, 1084, 1450, 1622  
—Arab, 1: 623  
Spanyol, 1: 276, 291, 450, 489; 2: 1019, 1665, 1723  
*specific historical course*, 1: 406  
*spiritual argument*, 1: 281  
*spiritual enlightenment*, 1: 608  
*spiritual sanctions*, 1: 404  
*spiritually religious*, 2: 1487  
Spivak, Gayatri Chakravorty, 2: 1490, 1527  
*splitsing theory*, 2: 1667  
STAIN, 2: 911, 1554, 1669  
Star tv, 1: 724, 725  
*state building*, 1: 198; 2: 892, 1674, 1678, 1681  
*state of mind*, 2: 990  
*state rebuilding*, 1: 191, 199, 201  
*state responsibility*, 2: 1604  
*state-like institutions*, 1: 789  
*state-society distinction*, 1: 268  
Steenbrink, Karl, 1: 857  
Stephan, 1: 266, 744, 746  
*strick syari'a minded*, 2: 1085  
*structure of law*, 2: 944  
*Suara Pembaruan* (harian), 1: 269, 283  
substansi ideologi, 1: 310  
Sudan, 1: 461, 487; 2: 993  
*sugih macak kere*, 1: 134  
*suicide*, 1: 271, 275  
Sumarhana, Th., 1: 166; 2: 1599  
Sumatera Barat, 1: 317  
Sumatera Thawalib, 2: 1002  
Sunan Gunung Jati, 2: 1093  
Sunan Kalijaga, 2: 1091, 1092, 1167, 1168  
Sunan Kudus, 2: 1092, 1093  
Sunni, 1: 11, 15, 67, 113, 247, 299, 305, 310, 311, 550, 566, 612, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 837, 852, 853, 867, 877; 2: 919, 1013, 1044, 1107, 1182, 1495, 1496, 1503, 1504, 1554, 1563, 1577, 1706, 1709, 1710, 1730  
*supporting ideas*, 2: 1731  
*supporting morality*, 2: 1731  
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 1: 148, 149, 233, 412, 581, 641, 642; 2: 933, 1004, 1108, 1121, 1640  
Sutan Takdir Alisjahbana, 1: 503  
*swarga nunut neraka katut*, 1: 252  
Swedia, 1: 291, 882, 1165, 1317, 1319  
Swiss, 1: 479, 480, 482, 484, 494, 496, 506, 508; 2: 991, 992, 1455  
Swiss, St.Gallen, 1: 495  
Syafi'i (mazhab), 1: 35, 550, 648, 709; 2: 1283, 1285, 1455, 1477

## Membela Kebebasan Beragama

- Syafi'i, Imam, 1: 305, 688, 689, 694, 695, 708  
Syafuruddin Prawiranegara, 1: 12  
Syah Waliyullah, 2: 1705  
Syahrir, 1: 132, 145; 2: 1040, 1668  
Syatibi, Imam al-, 2: 952, 955, 1402, 1731  
*syaykh al-Islâm*, 1: 294  
Sydie, RA, 2: 1490  
Syi'ah, 1: 11, 15, 67, 68, 182, 205, 299, 343, 347, 451, 550, 566, 612, 640, 643, 644, 828, 829, 837, 841, 842, 852, 853, 856, 868; 2: 1013, 1182, 1373, 1374, 1394, 1554, 1577, 1705, 1720  
Syria, 1: 296  
*system of rights*, 1: 381, 384  
*syûrâ, al-*, 1: 858
- I**
- Tahtawi, al-, 1: 306, 697; 2: 1001  
*tajdid*, 1: 631  
taklid, 1: 420, 693, 695, 828; 2: 957, 1738  
Talal Asad, 1: 740  
*tafîq*, 1: 711  
Taliban, 1: 246, 296, 298, 881; 2: 1136  
Tangerang, 1: 227, 638, 805, 843; 2: 1054, 1090, 1136, 1285, 1540  
Tao Te Cing, 1: 873  
Taoisme, 1: 877  
*taqlid jâmid*, 1: 694  
*taqlid mahdlî*, 1: 694  
*taqlid manhajî*, 1: 696  
*taqlid qawli*, 1: 696  
*Tarbawi*, 1: 720  
tasawuf, 1: 18, 19, 68, 69, 454, 490, 491, 492, 823, 824, 827; 2: 906, 907, 1000, 1001, 1038, 1107, 1229, 1230, 1397, 1411, 1538, 1709  
Taurat, 1: 83, 88, 93, 95; 2: 1079, 1746  
Taylor, Charles, 1: 207, 370; 2: 1600  
Teater Utan Kayu, 1: 878  
teisme, 2: 1364  
*Tempo* (majalah), 2: 1380  
teo-demokrasi, 1: 278; 2: 999  
teokrasi, 1: 16, 217, 218, 599, 855; 2: 1072, 1073, 1221, 1236, 1237, 1238, 1420, 1481, 1534  
teologi pembebasan, 1: 334, 761; 2: 1153, 1154, 1167, 1251, 1252, 1253  
teosentris, 2: 1601, 1727, 1743  
Thaha Husain, 1: 1271  
Thailand, 1: 59, 445, 646, 836, 877; 2: 1044, 1443, 1536, 1538  
*the art of compromise*, 1: 599  
*the art of possible*, 1: 599  
The Asia Foundation, 1: 726, 799  
*the best among the worse*, 1: 557  
*The City of God*, 1: 280  
*The Economist*, 1: 409  
*the essence of modernism*, 2: 1039  
*the essence of religion*, 2: 1027  
*the idea of Holly*, 2: 1028, 1029, 1030  
*the idea of nation-state*, 2: 1036  
*the idea of progress*, 1: 403, 663; 2: 1023, 1027, 1028, 1039, 1074  
*The Jakarta Post*, 1: 408; 2: 980, 986  
*the politics of exclusion*, 2: 1663, 1671  
*the politics of inclusion*, 2: 1663, 1671, 1687  
*the problem of good life*, 1: 369, 370, 371, 373, 374  
*the problem of justice*, 1: 367, 369, 370, 371, 372, 374, 376, 377  
*The Protestan Ethic*, 2: 1024  
*the rise of education*, 2: 1027, 1028  
*The Roles of Religion*, 1: 276  
*the survival of the fittest*, 2: 908, 1020  
*The Third Wave*, 1: 275, 276  
*the ultimate truth*, 1: 23, 186, 256, 538, 540, 802; 2: 1381

- The Wahid Institute, 1: 164, 878  
 Theo Syafei, 2: 1757  
*theological argument*, 1: 281  
 Theresa (ibu), 1: 669  
 Timor Leste, 2: 1443  
 Timor Timur, 2: 1448  
 Timur Tengah, 1: 97, 98, 158, 164, 216, 220, 313, 314, 319, 321, 440, 486, 501, 505, 593, 836; 2: 888, 1030, 1044, 1303, 1306, 1395, 1427, 1448, 1646, 1717, 1738  
 TKW, 1: 443; 2: 1088, 1103, 1330, 1404  
 TNI, 1: 198, 617; 2: 1021, 1262  
 Toffler, Alvin, 2: 1339  
 toleran, 1: 15, 23, 40, 57, 98, 157, 164, 187, 206, 228, 238, 254, 256, 266, 303, 321, 359, 367, 377, 382, 393, 395, 396, 397, 398, 414, 416, 417, 470, 592, 643, 647, 649, 707, 730, 737, 740, 755, 772, 773, 783, 784, 796, 800, 802, 805, 839, 849, 851, 853, 855, 871, 872, 876, 877, 878; 2: 936, 1057, 1078, 1081, 1087, 1097, 1101, 1119, 1145, 1146, 1160, 1164, 1165, 1173, 1203, 1239, 1293, 1328, 1345, 1351, 1353, 1354, 1355, 1382, 1397, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1438, 1439, 1449, 1462, 1470, 1679, 1685, 1687, 1703, 1715, 1719, 1743, 1746, 1748, 1750  
 toleransi, 1: 17, 19, 25, 26, 27, 47, 48, 98, 124, 126, 143, 166, 181, 188, 207, 266, 276, 284, 285, 286, 348, 358, 359, 376, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 451, 525, 530, 542, 570, 649, 662, 672, 682, 733, 737, 740, 751, 791, 796, 808, 814, 840, 851, 865, 871, 876, 878; 2: 954, 975, 1079, 1080, 1114, 1118, 1146, 1149, 1169, 1171, 1172, 1173, 1198, 1199, 1200, 1229, 1243, 1275, 1292, 1328, 1352, 1353, 1382, 1383, 1389, 1397, 1406, 1413, 1417, 1438, 1439, 1441, 1447, 1469, 1502, 1503, 1546, 1599, 1741, 1742, 1746, 1748, 1768  
 totalitarianisme, 1: 6, 370, 373, 377, 387; 2: 1155, 1263, 1513, 1514, 1609, 1610, 1621  
*trafficking*, 1: 702, 703, 704; 2: 944, 945, 946, 1302, 1626  
*transnational fundamentalism*, 2: 941  
*transnational Islamic fundamentalism*, 2: 942, 946  
 Trinitas, 1: 95, 681; 2: 1706, 1712, 1768  
*truth claim*, 1: 357  
 Tunisia, 1: 296, 433, 621, 624; 2: 1395  
 Turki Muda, 1: 295, 296, 304  
 Turki, 1: 10, 35, 70, 132, 194, 242, 243, 295, 296, 298, 303, 304, 408, 433, 462, 486, 516, 609, 610, 611, 612, 630, 645, 648, 735, 737, 744, 746, 749, 759, 789, 790, 845, 882; 2: 888, 924, 926, 992, 1019, 1028, 1040, 1069, 1223, 1224, 1226, 1238, 1305, 1317, 1362, 1443, 1444, 1446, 1447, 1450, 1466, 1467, 1490, 1491, 1577, 1646, 1650, 1693, 1694, 1695, 1730, 1732, 1733, 1758, 1763
- ## U
- UAN sentris, 1: 1192  
 UIN, 1: 105, 407, 507, 555, 566, 567, 672, 764, 838, 839, 840, 841, 843, 852, 853; 2: 892, 893, 894, 895, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 920, 921, 936, 1222, 1223, 1233, 1234, 1248, 1387, 1503, 1504, 1506, 1554, 1669, 1721, 1722, 1758  
 UIN Jakarta, 1: 407, 555, 566, 764, 838, 839, 841, 852, 853; 2: 912, 936, 1387, 1504, 1721, 1722



## Membela Kebebasan Beragama

- UIN Makassar, 2: 1223, 1233, 1234, 1248
- UIN Yogyakarta, 1: 672; 2: 1758
- ulama Dayah, 2: 1455
- Ulil Abshar-Abdalla, 1: 421, 822, 857; 2: 960, 1074, 1076, 1109
- ultimate truth*, 1: 23, 186, 256, 538, 539, 540, 564, 802; 2: 1381
- Umar ibn Abdul Azis, 1: 75, 77, 196; 2: 1398
- Umar ibn Farid, 2: 1410
- Umar ibn Khattab, 1: 115, 195, 249, 307, 308, 442, 552, 693, 701; 2: 1053, 1338, 1393, 1562, 1578, 1697
- Umayyah, 1: 196, 197, 298, 432, 439, 553, 841; 2: 1015, 1238, 1396, 1398, 1560, 1570
- UMI, 1: 1222
- Ummu Salamah, 1: 442
- umûru bi-maqâshidihâ, al-*, 1: 135
- Uni Soviet, 1: 504, 857; 2: 899, 901, 908, 1299, 1610, 1621
- UNICEF, 2: 985
- unintended consequence*, 2: 1534, 1535, 1606
- UNISBA (Universitas Islam Bandung), 2: 1222
- UNISMA (Universitas Islam Malang), 2: 1222
- Universitas Airlangga, 2: 977, 978
- Universitas Alighard, 1: 300
- Universitas al-Nizamiyah, 2: 1709
- Universitas Gajah Mada (UGM), 1: 726; 2: 911
- Universitas Indonesia (UI), 1: 159, 576, 578, 584; 2: 911, 978, 1188
- Universitas Islam Indonesia (UII), 2: 1222
- Universitas Osaka, 1: 136
- Universitas Paramadina, 1: 67
- University of Chicago, 1: 176, 185
- University of South Carolina, 2: 962
- US Government, 2: 952
- Usman Roy, 1: 24, 25, 179, 205, 471, 648, 706, 708, 709, 752, 806, 861, 862, 863; 2: 1058, 1082, 1112, 1146, 1159, 1291, 1371, 1502, 1575, 1582, 1618, 1708, 1749, 1768
- Utomo Dananjaya, 2: 1173
- Utsman ibn Affan, 1: 14, 115, 195, 298, 552, 693; 2: 1098, 1288, 1338
- Utsmani (dinasti), 1: 196, 295, 296, 553, 607; 2: 1238
- UU Administrasi Kependudukan, 2: 1364
- UU Anti-Diskriminasi, 2: 1361, 1364
- UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, 1: 388, 491; 2: 924
- UU Anti-Trafiking, 1: 580, 581; 2: 944
- UU Haji, 1: 227, 243, 255; 2: 1385
- UU KDRT, 1: 445, 581; 2: 970
- UU Kewarganegaraan, 1: 152
- UU KKR, 2: 1524
- UU LSM, 1: 258
- UU Partai Politik, 1: 154; 2: 969
- UU Peradilan Agama, 1: 214, 227
- UU Perbankan Syariah, 1: 80, 161, 243; 2: 1360, 1361, 1362
- UU Perbankan, 1: 80, 160, 161, 243; 2: 1360, 1361, 1362
- UU Perkawinan, 1: 201, 243, 255, 573; 2: 1639, 1655
- UU Pidana Islam, 2: 1361
- UU PNPS, 1: 151, 281
- UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), 1: 446, 704
- UU Wakaf, 1: 243, 255; 2: 1361, 1385
- UU Zakat, 1: 227, 243, 255; 2: 1362
- UUD, 1: 3, 17, 45, 55, 58, 62, 64, 65, 71, 76, 79, 81, 84, 85, 134, 145, 146, 151, 153, 176, 217, 232, 240, 243, 255, 277, 278, 279, 311, 346, 471,

- 573, 629, 635, 636, 639, 641, 664,  
719, 744, 748, 752, 772, 799, 870;  
2: 1021, 1040, 1041, 1054, 1062,  
1073, 1121, 1122, 1133, 1193,  
1261, 1273, 1302, 1310, 1349,  
1350, 1414, 1420, 1421, 1434,  
1435, 1479, 1499, 1500, 1535,  
1540, 1558, 1565, 1571, 1604,  
1605, 1652, 1656, 1706, 1707,  
1750
- Uzair, 1: 95
- V**
- value free*, 1: 738; 2: 1069, 1336
- van der Kroef, J.M., 1: 284
- Vatikan, 1: 48, 91, 126, 208, 255, 276,  
284, 285, 355, 483, 484, 509, 538,  
541, 564, 597, 598, 659, 803, 825;  
2: 1117, 1168, 1179, 1236, 1546
- Vietnam, 1: 883, 1460
- Voltaire, 2: 1002, 1008, 1317
- von Bismarck, Otto, 1: 504
- von Hayek, 1: 495
- W**
- Wahhabi, 1: 16, 63, 67, 68, 296, 298,  
299, 306, 402, 487, 649, 696, 818,  
850; 2: 942, 1107, 1394, 1447, 1737
- Wahhabisme, 1: 402, 487, 649, 850; 2:  
942, 1737
- Wahid Hasyim, 1: 278; 2: 1414, 1667
- Walby, Sylvia, 2: 1649
- Walisongo, 1: 649; 2: 955, 1168
- Walzer, Michael, 1: 267, 279, 746; 2:  
1461
- Waraqah bin Naufal, 1: 91; 2: 1406
- Washington Consensus*, 2: 1628
- Washington DC, 1: 136; 2: 1308
- Washliyah, al-, 2: 1292
- watak primordial, 2: 934
- Watson, S., 2: 1642
- Watt, James, 1: 620
- Watt, Montgomery, 1: 608
- Weber, Max, 1: 58, 265, 271, 368, 371,  
654, 759, 760; 2: 1024, 1025, 1157,  
1664
- Weedon, Christ, 2: 1490
- Weigel, George, 1: 276
- welfare state*, 2: 1631, 1644
- wilāyat al-faqīh*, 1: 15, 110, 121, 691
- wilāyat al-hisbah*, 2: 1453, 1454
- Wilders, Geert, 1: 43, 450
- Wilson, AM, 1: 601
- WTO (World Trade Organization), 1: 586
- Y**
- Yahudi, 1: 35, 36, 74, 83, 85, 88, 91, 92,  
93, 94, 95, 101, 118, 125, 126, 136,  
138, 152, 166, 192, 194, 255, 313,  
336, 339, 345, 405, 406, 421, 432,  
450, 473, 487, 538, 544, 565, 591,  
610, 611, 621, 647, 681, 705, 749,  
760, 768, 821, 823, 827, 828, 875,  
876; 2: 908, 909, 915, 916, 1015,  
1079, 1085, 1099, 1113, 1114,  
1262, 1287, 1373, 1380, 1392,  
1393, 1406, 1408, 1414, 1544,  
1547, 1632, 1695, 1697, 1707,  
1713, 1714, 1715, 1716, 1748, 1758
- Yakobit, 1: 94
- Yale Divinity School, 1: 264
- Yale University, 1: 265
- Yatsrib, 2: 1392, 1412
- Yesus, 1: 94, 166, 294, 329, 490, 492,  
508, 518, 525, 526, 536, 537, 538,  
539, 769, 770; 2: 908, 1168, 1173,  
1189, 1282, 1381, 1405, 1406,  
1480, 1496, 1497, 1703, 1704,  
1705, 1706
- Yogyakarta, 1: 83, 114, 126, 360, 361,  
407, 465, 466, 482, 507, 672, 727,  
729, 731, 796; 2: 956, 1045, 1091,

## Membela Kebebasan Beragama

- 1222, 1223, 1462, 1504, 1507,  
1528, 1758, 1759
- Yordan, 1: 296, 440; 2: 1288, 1291
- Yudi Latif, 1: 281
- Yunani, 1: 493, 596, 606, 608, 688, 689,  
768, 779; 2: 927, 1316, 1391, 1397,  
1411, 1562, 1761
- Yusuf al-Najjar, 2: 1406
- Yusuf Qardlawi, 2: 1289, 1738
- Z**
- Zaenuddin MZ, 1: 404, 421, 835
- Zaid ibn Tsabit, 1: 442
- Zainal Abidin, 1: 432
- Zakaria, Fareed, 1: 433, 501, 502; 2: 994,  
999
- zakat, 1: 82, 85, 91, 148, 182, 202, 227,  
243, 255, 314, 315, 501; 2: 973,  
1105, 1111, 1348, 1358, , 1361,  
1362, 1390, 1402, 1544, 1755, 1762
- zhannî*, 1: 42, 122; 2: 934, 939, 1043,  
1129, 1137, 1401
- zhibâr*, 1: 442, 443
- zhillullâh fi al-ardl*, 2: 1728
- Ziauddin Sardar, 2: 950
- Zionis, 2: 1044
- Zoroaster, 1: 152, 270; 2: 1013, 1396,  
1407, 1408, 1411, 1544, 1547